

LKIP 2022



LAPORAN CAPAIAN AKUNTABILITAS KINERJA



PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iii
Daftar Gambar	iii

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2.3 Rencana Strategis	2
2.3.1 Visi dan Misi	2
A. Visi	2
B. Misi	4
2.3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023	9
2.3.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2022	10
2.3.4 Indikator Kinerja Utama	12
2.3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	15
2.3.6 Rencana Anggaran Tahun 2022	17
2.3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama	22
2.3.8 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis	26
2.3.9 Akuntabilitas Keuangan	30
2.3.10 Analisis Pencapaian Per Sasaran Strategi	37
Sasaran 1 : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	37
Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	45
Sasaran 3 : Meningkatnya Masyarakat Kota Yang Humanis	54
Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	65
Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	83
Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	104
Sasaran 7 : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	143
Sasaran 8 : Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	161

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah	4
Tabel 2.2	Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	6
Tabel 2.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023	10
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Sebelum Perubahan)	13
Tabel 2.5	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Berdasarkan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023)	13
Tabel 2.6	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Berdasarkan Hasil Reviu)	14
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung (Sebelum Reviu)	16
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 (Setelah Reviu)	17
Tabel 2.9	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	18
Tabel 2.10	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	19
Tabel 2.11	Alokasi Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2022	21
Tabel 2.12	Predikat Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal	23
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	23
Tabel 2.14	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	24
Tabel 2.15	Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	28
Tabel 2.16	Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	28
Tabel 2.17	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	28
Tabel 2.18	Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	30
Tabel 2.19	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	31
Tabel 2.20	Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)	32
Tabel 2.21	Pagu Dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	34
Tabel 2.22	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022	35
Tabel 2.23	Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Tahun 2022	37
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022	45
Tabel 2.26	Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2022	48
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Masyarakat Kota Yang Humanis Tahun 2022	54
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2022	65
Tabel 2.29	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	67
Tabel 2.30	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2022	67
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota Tahun 2022	83
Tabel 2.32	Rekapitulasi Penerima Bantuan Perbaikan Rutilahu Kota Bandung Tahun 2022	92
Tabel 2.33	Jenis Bantuan Sosial di Kota Bandung Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid 19 Tahun 2022	93
Tabel 2.34	Rekapitulasi Data Warga Yang Tercantum dalam DTKS Per Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2022	93
Tabel 2.35	Rekapitulasi Bantuan Sosial pada Tahun 2022	95
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Tahun 2022	104
Tabel 2.37	Pengujian Titik Pantau Kualitas Air Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	114
Tabel 2.38	Rekapitulasi Data Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Kota Bandung Tahun 2022	117
Tabel 2.39	Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan Hidup yang Dikeluarkan Tahun 2022	120
Tabel 2.40	Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Sampai Tahun 2022	127
Tabel 2.41	Daftar RW di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Kawasan Bebas Sampah (KBS)	135
Tabel 2.42	Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)	136
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas Tahun 2022	143
Tabel 2.44	Data Penurunan Titik Genangan Tahun 2022	157
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan Tahun 2022	161
Tabel 2.46	Akumulasi Biaya Non-APBD Kota Bandung	162
Tabel 2.47	Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK Per Kecamatan Tahun Anggaran 2022	163
Tabel 2.48	Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat (Swadaya Murni) Per Kecamatan Tahun 2022	165
Tabel 2.49	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD Kota Bandung	169
Tabel 2.50	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD Provinsi Jawa Barat	171
Tabel 2.51	Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR	171
Tabel 2.52	Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSJ Perusahaan Tahun 2022	173
Tabel 2.53	Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitas Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2022	175
Tabel 2.54	Status Implementasi Infrastruktur <i>ISWMP</i> - Kota Bandung	176

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)	18
Grafik 2.2	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)	20
Grafik 2.3	Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022	21
Grafik 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	26
Grafik 2.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022	29
Grafik 2.6	Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)	32
Grafik 2.7	Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)	33
Grafik 2.8	Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah	41
Grafik 2.9	Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah	44
Grafik 2.10	Realisasi UHH Kota Bandung Tahun 2019 - 2022	48
Grafik 2.11	Keterkaitan Konsep-konsep Kota	55
Grafik 2.12	Aspek Liveable City	55
Grafik 2.13	Capaian Nilai AKIP Pemerintah Kota Bandung Tahun 2019-2022	72
Grafik 2.14	Hasil Evaluasi SPBE 2022	79
Grafik 2.15	Target dan Realisasi SPBE	81
Grafik 2.16	Kerangka Kerja Daya Saing Pariwisata	84
Grafik 2.17	Capaian Indeks Daya Saing Pariwisata Tahun 2019-2022	85
Grafik 2.18	Rekapitulasi DTKS (KK) Per Kecamatan Tahun 2020-2022	89
Grafik 2.19	Perbandingan Capaian Kinerja TPT Tahun 2019-2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	97
Grafik 2.20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	97
Grafik 2.21	Perbandingan Capaian Kinerja Pengangguran Tahun 2019-2022 Data Pengangguran	98
Grafik 2.22	Perbandingan TPT Tahun 2021-2022 Berdasarkan Jenis Kelamin TPT Berdasarkan Jenis Kelamin	99
Grafik 2.23	Grafik Capaian IKLH Kota Bandung Tahun 2019-2022	107
Grafik 2.24	Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung	128
Grafik 2.25	Grafik Perkembangan Capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2020-2022	133
Grafik 2.26	Capaian Partisipasi Masyarakat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)	162
Grafik 2.27	Rekapitulasi Besar-besaran TJLS Tahun 2021 Per Bidang Prioritas	172
Grafik 2.28	Realisasi Program TJLS Tahun 2019-2022 (Miliar Rupiah)	173

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pengembangan Ekonomi Keluarga Miskin	88
Gambar 2.2	Kegiatan Job Fair	96
Gambar 2.3	Taman Sister City Tahap 1	105
Gambar 2.4	Taman RW 06 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong	106
Gambar 2.5	Pembangunan Sarana Air Bersih di SDN 158 Kel Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong	108
Gambar 2.6	Drainase Lingkungan di Jl. Aki Padma Utara (Gang Bapa Omay, Gang Bapa Maja) RT. 04 RW. 06 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay	151
Gambar 2.7	Pemeliharaan Sungai	156
Gambar 2.8	Pemeliharaan Saluran Drainase	156
Gambar 2.9	Pembuatan Sumur Resapan	157



BAB 2

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

2.3 RENCANA STRATEGIS

2.3.1 Visi dan Misi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dituangkan merupakan pemaparan dari kerangka pembangunan strategis Kota Bandung untuk periode lima tahun. Segala hal terkait seperti penjabaran visi, misi, serta program pemerintah Kota Bandung tertuang di dalamnya.

Pedoman RPJMD mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Tak hanya itu, RPJPN dan RPJMN Nasional juga turut menjadi bahan pertimbangan. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022.



A. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung 2018-2023 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai yaitu: **“TERWUJUDUNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS”**

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Bandung Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang;

Unggul Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di setiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan

daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.;

Nyaman

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan;

Sejahtera

Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga, dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil, dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya;

Agamis

Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan



Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

B. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

VISI	MISI
<p style="text-align: center;">TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, SEJAHTERA DAN AGAMIS</p>	Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih
	Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan
	Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan
	Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi

Misi Pertama Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing. Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

Misi Kedua Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih. Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

Misi Ketiga Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan. Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.



Misi Keempat Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Misi Kelima Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Penjabaran pelaksanaan kelima misi di atas, telah diuraikan melalui janji politik Wali Kota Bandung. Semuanya tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Penetapan janji politik, merupakan cerminan tentang urgensi permasalahan yang jadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan Wali Kota Bandung.

Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 merupakan dokumen strategis Kota Bandung untuk mengimplementasikan janji-janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang disampaikan pada saat kampanye. Janji-janji dimaksud menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RPJMD, dan oleh karenanya menjadi contoh baik dalam tata kelola pemerintahan dan perencanaan pembangunan, bahwa janji-janji yang telah disampaikan mutlak harus diimplementasikan dalam dokumen perencanaan.

Berkenaan dengan janji-janji wali kota dan wakil wali kota terpilih, tercatat ada 26 item janji politik yang terbagi atas aspek, diantaranya : Bandung Unggul (10 item), Bandung Nyaman (8 item), Bandung Sejahtera (14 item), dan Bandung Agamis (3 item). Berikut janji-janji dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Janji Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

NO	JANJI POLITIK/ KAMPANYE	PENJELASAN	KATEGORI	PENANGGUNG JAWAB
1	PIPPK Plus	100 juta per LKK pada tahun pertama mengacu pada pelaksanaan PIPPK periode sebelumnya, sedangkan pada tahun pelaksanaan kedua terdapat kenaikan pada anggaran RW	Bandung Unggul	Kecamatan Bagian Pemerintahan
2	1 Pusat Kreativitas Pemuda per Wilayah	6 pusat kreativitas pemuda di 6 wilayah	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga
3	Youthspace di Setiap Kelurahan	151 kelurahan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga
4	1 Perpustakaan Keliling / Kecamatan	Melayani seluruh kelurahan di 30 kecamatan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Perpustakaan
5	Beasiswa Pendidikan bagi Siswa, Guru dan ASN Berprestasi	Beasiswa yang dimaksudkan adalah beasiswa prestasi, perlu disusun kriteria penerima	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
			Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Kepegawaian
6	Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan per Kelurahan	Penanganan terpadu tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak: (1). Call center, (2). Konselor untuk pendampingan penanganan kasus	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Partisipasi perempuan dalam ruang publik (1). pembinaan perempuan di bidang politik, (2). pembinaan perempuan di bidang ekonomi, (3). pembinaan perempuan di bidang	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pd Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Pusat Pelayanan dan Kreatifitas Anak per Kelurahan	Pembentukan kelurahan ramah anak dengan maksud untuk memotivasi dan mendorong kelurahan agar mampu mempromosikan, memenuhi dan menghormati hak - hak anak kreatifitas anak	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Kampung Wisata di Setiap Wilayah	Konsep kampung wisata disesuaikan dengan konsep penembangan kawasan strategis pengembangan pariwisata sebagaimana tertuang dalam rencana induk pembangunan	Bandung Unggul	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
9	Pembangunan Flyover / Underpass	Pembangunan flyover/ underpass	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan PUPR
10	Pembangunan Kolam/Saluran Retensi	Pembangunan kolam/ saluran retensi	Bandung Nyaman	PD penanggung Jawab urusan PUPR
11	Fasilitas Disabilitas di Semua Ruang Publik	Fasilitas disabilitas, adanya di SKPD lintas sektoral, aksesibilitas di semua layanan publik.	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Sub Urusan Pertamanan
		PD Penanggung Jawab Urusan Sosial, PUPR, Kawasan Permukiman,	Bandung Nyaman	
		Penbanguan taman RW dan taman tematik yang ramah disabilitas,		
		diantaranya disediakan jalur untuk pengguna kursi roda, toilet yang ramah untuk kaum difabel dan sarana		

12	25.000 Sambungan Air Bersih Baru	Dalam kaitan mengatasi kehilangan air (bukan kebocoran saja), kehilangan dalam faktor administrasi (meteran tidak bagus, sambungan ilegal). Saat ini angka kehilangan air PDAM sebesar 42%. Target kehilangan air dalam 5 tahun ke depan bisa 30% (berkurang 12%). Sambungan air saat ini 174.000 SR.	Bandung Nyaman	PDAM Tirtawening
13	Revitalisasi Sarana Olahraga/ Kecamatan	30 Kecamatan	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Pemuda dan Olahraga dan Kecamatan
14	Bank Sampah per Kecamatan	Membangun bank sampah per kecamatan dengan tujuan utama untuk mengurangi sampah dari sumber.	Bandung Nyaman	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
15	Menuntaskan Revitalisasi Pasar Tradisional	Melakukan revitalisasi, rehabilitasi dan renovasi pasar-pasar tradisional	Bandung Nyaman	PD Pasar Bermartabat, PD Penanggung Jawab Urusan Perdagangan
16	Pusat Pemberdayaan Ekonomi dan Kreatifitas Masyarakat (<i>Co-Working space</i>) Per Kecamatan	Pendampingan WUB pada 30 kecamatan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan KUMKM
		Pusat pemberdayaan ekonomi dan Kreatifitas masyarakat (<i>co-working space</i>) di dispangtan terkait dengan 4 subsektor, yaitu pertanian, peternakan, perikanan, dan urban farming.	Bandung Sejahtera	Pd Penanggung Jawab Urusan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
		Konsep <i>co-working space</i> digabungkan dengan konsep kampung wisata kreatif: konsep pembentukan <i>co-working space</i> , direncanakan dibangun dengan konsep <i>social business hub</i> , yakni menitikberatkan pada pembentukan kelompok ekonomi dan kreatif berbasis teknologi yang dikembangkan dengan platform bisnis sosial.	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pariwisata
		(1). Bandung Bersih melalui KANG PISMAN (kurangi, pisahkan, manfaatkan sampah per keluarga), (2). Kerja sama dengan BPR fasilitasi Kredit Bagja per kelompok masyarakat	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
		1. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan teknologi tepat guna dengan maksud meningkatkan usaha ekonomi dan mengembangkan kewirausahaan	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pemberdayaan Masyarakat
		2. Fasilitasi kredit Bagja per kelompok masyarakat, bekerja sama dengan PD. BPR Kota Bandung		
17	UMK untuk Guru Honorer	Guru honorer mendapatkan kompensasi sesuai dengan UMK secara bertahap	Bandung Sejahtera	PD Penanggung Jawab Urusan Pendidikan
18	Gratis Biaya Pemakaman Bagi Warga Tidak Mampu	Pembebasan biaya pemakaman bbagi warga miskin	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab sub urusan Pemakaman
19	Peningkatan Insentif RT dan RW	Besaran tidak didefinitifkan, yang ditekankan ada peningkatan	Bandung Sejahtera	Kecamatan
			Bandung Sejahtera	Bagian Pemerintahan

20	Subsidi Harga Sembako	Subsidi harga sembako di Dispangtan diaplikasikan dalam Program Penguatan Cadangan Pangan dan ATM Beras. Pengadaan beras diperuntukkan pengisian ATM Beras dan apabila terjadi bencana	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Pangan
		Anggaran subsidi bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat.	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Perdagangan
		Disdagin Kota Bandung memfasilitasi dalam hal penyaluran komoditi yang disubsidi di seluruh Kecamatan Se- Kota Bandung		
21	Kartu Bandung Sejahtera bagi Warga Tidak Mampu	Kartu Bandung sejahtera bagi warga tidak mampu yang multifungsi (untuk akses bansos, akses atm beras, akses proteksi kesehatan, akses Koperasi Juara, dan hal- hal kebutuhan yg terkait dukungan kepada warga tidak mampu)	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan Sosial
22	Menciptakan 1 Koperasi Juara Setiap Kelurahan	Seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
23	1 Koperasi di Setiap Tempat Ibadah di Kelurahan	Seluruh kelurahan tercapai dalam 5 tahun	Bandung Sejahtera	PD penanggung Jawab urusan KUMKM
24	Peningkatan Intensif untuk Guru Ngaji	Guru ngaji di Kota Bandung berjumlah kurang lebih	Bandung Agamis	Bagian Kesra
25	Gratis Sertifikasi Tanah Tempat Ibadah	Dari 3.802 masjid yang ada di Kota Bandung, belum seluruhnya memiliki tanah yang bersertifikat begitupula beberapa rumah ibadah agama lain. Dalam Mewujudkan Bandung Agamis, Pemerintah Kota Bandung memfasilitasi sertifikasinya secara gratis	Bandung Agamis	Bagian Kesra
26	Gerakan Meyemarakkan Tempat Ibadah	Dengan telah dikeluarkannya program Gerakan Sholat Subuh Berjama'ah, Gerakan Maghrib Mengaji dan Berjama'ah Shalat Waktu merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bandung untuk menyemarakkan tempat ibadah. Kegiatan ini tidak lepas pula dari bantuan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Agama Kota Bandung, MUI, dan Ormas Islam	Bandung Agamis	Bagian Kesra

Janji-janji tersebut bukanlah sekadar janji belaka. Banyak sisi positif yang bermanfaat bagi kesejahteraan warga Kota Bandung. Dengan janji-janji tersebutlah, Walikota Bandung terus memelihara keinginan dan tekad kuat untuk menyelesaikan permasalahan kota, terutama terkait bebas sampah, bebas banjir, bebas macet, serta persoalan infrastruktur.

Tak hanya soal infrastruktur Permasalahan pelayanan publik, juga terus diperhatikan Pemkot Bandung. Seluruh jajaran pemerintahan sadar, pelayanan publik merupakan satu hal penting yang bersentuhan langsung dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja unsur pemerintah.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga kota juga menjadi pembentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Bandung dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan selain ukuran-ukuran keberhasilan pendukung lainnya.

2.3.2 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam dokumen perencanaan perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (policy planning) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan RPJMD. Secara skematik keterkaitan antara visi, misi dengan perumusan tujuan dan sasaran, program dan kegiatan menjadi arsitektur kinerja pembangunan daerah. tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Selaras dengan penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan daerah pun menggunakan prinsip yang sama dengan lebih menekankan pada target kinerja. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi wali kota dan wakil wali kota menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran renstra perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Hubungan antara kepala daerah dan perangkat daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Pada Penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebelum perubahan, tujuan tidak memiliki indikator sehingga tingkat keberhasilannya tidak dapat diukur, pada perubahan RPJMD ini disertakan indikator untuk setiap tujuan sebagai penjabaran dari misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut dilakukan reviu atas tujuan dan sasaran strategis RPJMD Perubahan Kota Bandung 2018-2023 menetapkan sebanyak 8 (delapan) sasaran dan 20 (dua puluh) indikator sasaran sebagai berikut :



Tabel 2.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Perubahan Kota Bandung
Tahun 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing		
Membangun Masyarakat Kota Bandung yang Mandiri dengan Jaminan Pendidikan, Kesehatan dan Sosial yang Bermutu, Adil dan Merata Berdasarkan Nilai-Nilai Agama dan Budaya	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah Angka Rata-rata Lama Sekolah
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)
	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih		
Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"
		Nilai AKIP
		Opini BPK
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
		Nilai EPPD
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan		
Terciptanya Pertumbuhan Ekonomi yang Maju, Berkelanjutan dan Berkeadilan	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Indeks Daya Saing Pariwisata
		Angka Kemiskinan
		Tingkat Pengangguran Terbuka
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan		
Terwujudnya Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		Persentase Luasan RTH
		Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah
	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Persentase Penurunan Kemacetan
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh
		Cakupan Pelayanan Air Minum
		Persentase Penurunan Titik Genangan
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi		
Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan

2.3.3 Prioritas Pembangunan Tahun 2022

Dalam mencapai keberhasilan pembangunan jangka menengah daerah, tentu saja harus ada beberapa kebijakan yang dijadikan dasar dalam perumusan perencanaan. Kebijakan tersebut adalah : Kebijakan perencanaan pembangunan Kota Bandung Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

RPJMD Kota Bandung 2018-2023, itu kemudian dijabarkan ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 44 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Perencanaan strategis yang dituangkan dalam RPJPD dan RPJMD harus dapat diterjemahkan kedalam perencanaan operasional, dalam RPJMD yang disusun saat ini keselarasan antara visi, misi daerah, serta sasaran pokok, dan arah kebijakan di elaborasi dalam visi, misi kepala daerah, serta strategi dan arah kebijakannya. Program pembangunan daerah merupakan program atau agenda strategis kepala daerah pada periode RPJMD yang akan menjadi prioritas atau target selama lima tahun yang secara langsung didedikasikan untuk mencapai sasaran daerah. Implementasi program pembangunan daerah dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023 adalah untuk menjawab isu strategis yang terdiri atas:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
3. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
4. Peningkatan perekonomian kota
5. Tata kelola pemerintahan
6. Optimalisasi infrastruktur dan penataan ruang
7. Lingkungan hidup berkualitas dan optimalisasi pengelolaan persampahan
8. Sinergitas pembiayaan pembangunan

Program pembangunan daerah dilaksanakan untuk menjawab visi misi kepala daerah yang merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang kemudian diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

Selain dalam rangka menjawab isu strategis daerah, program pembangunan daerah juga diarahkan untuk penerapan standar pelayanan minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial

2.3.4 Indikator Kinerja Utama

Sasaran akan tercapai ketika strategi yang digunakan tepat. Pemerintah Kota Bandung selalu optimistis mampu mencapai sasaran berbekal strategi matang untuk seluruh lini yang ingin dibenahi.

Adapun strategi Pemerintah Kota Bandung mencakup penentuan kebijakan, program, serta kegiatan. Untuk itu sebaiknya terlebih dahulu membahas secara singkat tentang arti dari kebijakan, program, serta kegiatan.

Kebijakan: pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang disepakati pihak-pihak terkait lalu ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Maka pedoman itulah yang nanti dijadikan petunjuk bagi setiap kegiatan demi tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Program: adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.

Kegiatan: adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut. sebagai arah dari pencapaian sasaran kinerja yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tugas fungsi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana kinerja yang berturut-turut diarahkan untuk mencapai sasaran.

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung melaksanakan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Terutama, indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam BAB VIII Tabel 8.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubataan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.



Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung
(Sebelum Perubahan)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun
		1.2	Angka Kelulusan	Persentase
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase
		3.2	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat
		3.3	Nilai LPPD Kota	Predikat
		3.4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat
		3.5	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat
4	Meningkatnya Perekonomian Kota	4.1	PDRB Per kapita	Juta Rp
		4.2	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin
		4.3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah/org/Tahun
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	5.1	Angka Kemiskinan	Persen
6	Meningkatkan Kesempatan Kerja	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
7	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	7.1	Persentase RTH	Persen
8	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	8.1	Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan	Menit
		8.2	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek
		8.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%
9	Meningkatnya Layanan Air Bersih	9.2	Cakupan Layanan Air Bersih	%
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
		10.2	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%
11	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta Dalam Pembangunan	11.1	Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSI dan Sumbangan Pihak Ketiga	%
		11.2	Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)	%

Tabel 2.5
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung
(Berdasarkan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin

4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persen
		4.2	Nilai AKIP	Predikat
		4.3	Opini BPK	Predikat
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin
		4.5	Nilai EPPD	Skor
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin
		5.2	Angka Kemiskinan	Poin
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin
		6.2	Persentase Luasan RTH	Persen
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen

Tabel 2.6

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandung (Berdasarkan Hasil Reviu)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KET
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	IKU
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	IKU
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	IKU
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	IKU
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persen	IKU
		4.2	Nilai AKIP	Predikat	IKU
		4.3	Opini BPK	Predikat	-
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	-
		4.5	Nilai EPPD	Skor	-
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	-
		5.2	Angka Kemiskinan	Poin	IKU
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	IKU
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	IKU
		6.2	Persentase Luasan RTH	Persen	-
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	-
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen	-
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	-
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	-
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	-
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	-

Sumber: Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022



2.3.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan Perjanjian Kinerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih, dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan sistem manajerial dalam perjanjian kinerja, segala sesuatu menjadi terbuka dan bukannya sekadar tandatangan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022 mengacu pada dokumen RPJMD Perubahan Kota Bandung Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2022, dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung
(Sebelum Reviu)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing					
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.01
		1.2	Angka Kelulusan	Persentase	100
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.92
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih					
3	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	3.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	70
		3.2	Nilai Evaluasi AKIP Kota	Predikat	A
		3.3	Nilai LPPD Kota	Predikat	Sangat Tinggi
		3.4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WTP
		3.5	Level Kematangan Smart City Kota Bandung	Tingkat	Integrative
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan					
4	Meningkatnya Perekonomian Kota	4.1	PDRB Per kapita	Juta Rp	73.38
		4.2	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3.55
		4.3	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Ru-piah/ org/ Tahun	16.584
5	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	5.1	Angka Kemiskinan	Persen	3.66
6	Meningkatkan Kesempatan Kerja	6.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.34
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					
7	Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman, dan Berkelanjutan	7.1	Persentase RTH	Persen	12.6
8	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	8.1	Lama Genangan yang Tertangani Pada Titik Genangan	Menit	80
		8.2	Jumlah Aspek Penyebab Kemacetan	Aspek	10
		8.3	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	%	3.96
9	Meningkatnya Layanan Air Bersih	9.2	Cakupan Layanan Air Bersih	%	80
10	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung	10.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	35.47
		10.2	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah Kota	%	98.3
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi					
11	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Swasta Dalam Pembangunan	11.1	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSJ dan Sumbangan Pihak Ketiga	%	85.71
		11.2	Persentase Realisasi Program/ Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)	%	33.33

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022
(Setelah Reviu)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
Misi 1: Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas, dan Berdaya Saing					
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1.1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.22
		1.2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.77
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	2.1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.96
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	3.1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6.7
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih					
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	4.1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	90
		4.2	Nilai AKIP	Predikat	A
		4.3	Opini BPK	Predikat	WTP
		4.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3.30
		4.5	Nilai EPPD	Skor	3.4033
Misi 3: Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan					
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	5.1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3.30
		5.2	Angka Kemiskinan	Poin	3.32
		5.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10,86
Misi 4: Mewujudkan Bandung Nyaman melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	6.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51.71
		6.2	Persentase Luasan RTH	Persen	13,26
		6.3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	98.70
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	7.1	Persentase Penurunan Kematian	Persen	14,78
		7.2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2.76
		7.3	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	82.00
		7.4	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	50.00
Misi 5: Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi					
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	8.1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6,48

2.3.6 Rencana Anggaran Tahun 2022

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan

daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.412.915.234.850 dengan capaian realisasi Rp6.474.571.811.554 (capaian realisasi 87,34%) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.9

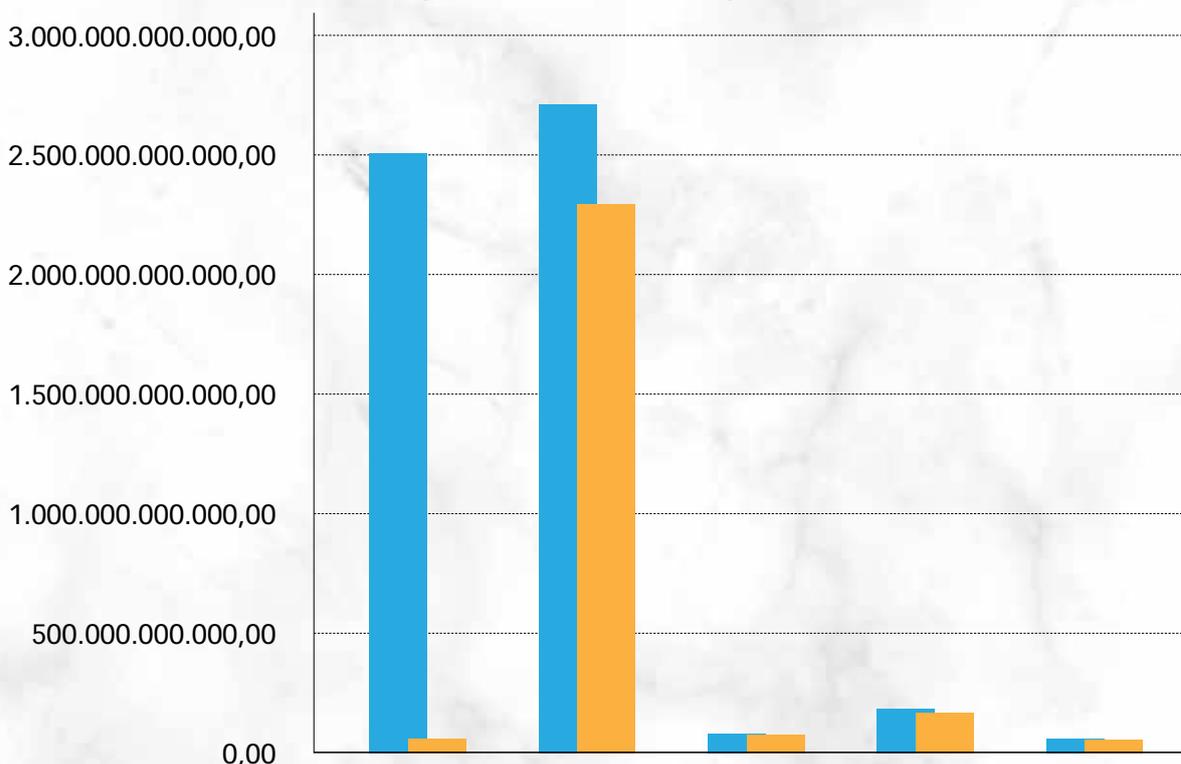
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi	6.541.691.801.049	5.780.415.847.033	88.36%
2	Belanja Modal	773.786.484.922	644.171.724.240	83.25%
3	Belanja Tidak Terduga	69.985.448.879	22.532.740.280	32.20%
4	Belanja Transfer	27.451.500.000	27.451.500.000	100%
Jumlah		7.412.915.234.850	6.474.571.811.554	87.34%

Sumber: LRA Kota Bandung 2022 Sebelum Review

Grafik 2.1

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)





Belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2022 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Hibah; dan
4. Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Operasi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 6.541.691.801.049 dengan capaian realisasi Rp 5.780.415.847.033 (capaian realisasi 88,36%) dengan rincian pada tabel berikut:

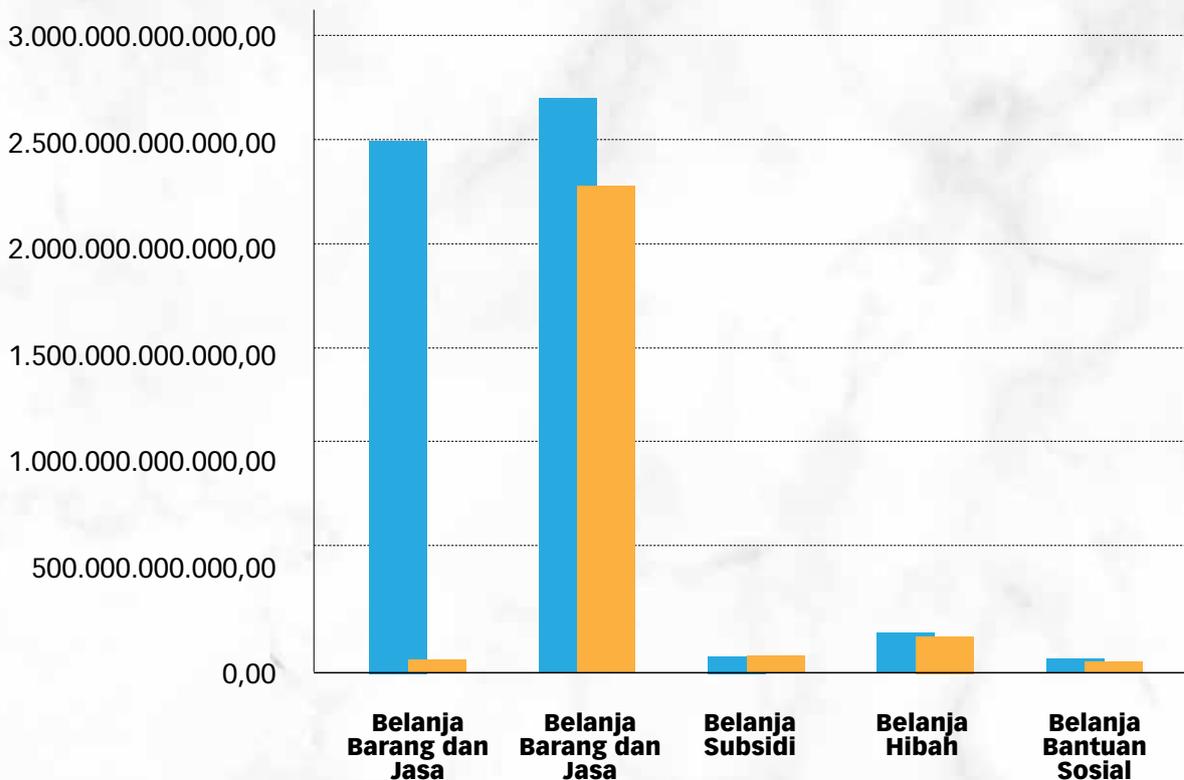
Tabel 2.10
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022
(Sebelum Audit BPK-RI)

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Pegawai	2.861.519.800.665	2.480.313.890.636	86.68%
2	Belanja Barang dan Jasa	3.083.711.650.924	2.721.885.348.875	88.27%
3	Belanja Hibah	515.385.139.460	498.500.022.522	96.72%
4	Belanja Bantuan Sosial	81.075.210.000	79.716.585.000	98.32%
Jumlah		6.541.691.801.049	5.780.415.847.033	88.36

Sumber: LRA Kota Bandung 2022 Sebelum Review

Grafik 2.2

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)



1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.861.519.800.665 dengan capaian realisasi Rp 2.480.313.890.636 (capaian realisasi 86,68%). Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 3.083.711.650.924 dengan capaian realisasi Rp 2.721.885.348.875 (capaian realisasi 88,27%).

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 515.385.139.460 dengan capaian realisasi Rp 498.500.022.522 (capaian realisasi 96,72%). Belanja ini diberikan kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 81.075.210.000 dengan capaian realisasi Rp 79.716.585.000 (capaian realisasi 98,32%). Belanja ini digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Tabel 2.11
Alokasi Anggaran Perubahan Per Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)
1	Angka Harapan Lama Sekolah	762,310,215,200.00	698,549,085,261.00
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,458,009,100.00	9,270,262,461.00
3	Umur Harapan Hidup	1,871,720,514.164.00	1,586,372,281.301.50
4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	379,662,552,521.00	367,115,299,194.74
5	Perentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	393,447,599,002.00	345,822,376,096.00
6	Nilai AKIP	11,691,517,234.00	9,949,448,769.00
7	Opini BPK	109,893,777,758.00	60,849,542,911.00
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	16,112,089,066.00	14,553,494,799.00
9	Nilai EPPD	569,272,300.00	552,887,050.00
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	55,789,816,381.00	52,226,493,619.00
11	Angka Kemiskinan	22,666,400,034.00	13,702,184,225.00
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	32,652,097,948.00	26,463,052,462.00
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	10,584,942,087.00	9,748,022,393.00
14	Persentase Luasan RTH	97,540,637,792.00	91,354,012,779.00
15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	288,386,096,280.00	256,727,098,357.00
16	Persentase Penurunan Kemacetan	271,602,635,518.00	150,653,175,425.00
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	117,396,990,751.00	101,943,035,361.00
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	10,859,308,130.00	10,332,969,323.00
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	99,413,237,584.00	90,671,578,417.00
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan		
JUMLAH		4,564,757,708,850.00	3,896,856,300,204.24

Grafik 2.3
Laporan Capaian Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2022





2.3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama

Guna mempertanggungjawabkan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, serta dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Bandung menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung. Sebelum pembahasan lebih jauh, ada baiknya memahami terlebih dahulu pengertian Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum, Akuntabilitas Kinerja artinya jawaban transparan terkait keberhasilan misi dan kegagalan misi. Jawaban tentang dua hal itu, disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang dalam menerima laporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Lantas, siapa saja yang punya kewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja itu sendiri? Jawabannya, ada tiga: Perorangan, Badan Hukum, Pimpinan Kolektif. Berakuntabilitas jadi hal wajib dilakukan Pemerintah Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat. Kewajiban ini sudah dilakukan dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung.

Isi laporan menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis, yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, RKT Tahun 2022, RKPD Tahun 2022, dan PK Tahun 2022. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 2.12
Predikat Nilai Capaian Kinerja dalam Skala Pengukuran Ordinal

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

No.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	Biru
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Kuning
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Abu-abu



Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tujuannya, demi mengukur peningkatan kinerja, serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah, adalah menentukan kinerja utama dari instansi pemerintah bersangkutan. Kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) jadi ukuran keberhasilan dari suatu tujuan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan, dan Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 20 (dua puluh) Indikator yang tertuang dalam BAB VIII Tabel 8.3 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2021.

Dalam upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bandung melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bandung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 2.14
Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.22	14.23	100.07%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.77	11.00	102.14%
3	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.96	74.75	101.07%
4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6.70	7.05	105.22%
5	Perentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	90	90	100%
6	Nilai AKIP	Predikat	A	A	100%
7	Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3.30	3.61	109.39%
9	Nilai EPPD	Skor	3.4033	N/A	N/A
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3.30	3.41	103,33%
11	Angka Kemiskinan	Poin	3.32	4.25	71.99%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10.86	9.55	112.06%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51.71	55.70	107.72%
14	Persentase Luasan RTH	Persen	13.26	12.44	93.82%
15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	98.70	98.70	100%
16	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen	14.78	14.78	100%
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2.76	2.32	115.94%
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	82.00	85,14	103.83%
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	50.00	14.71	170.58%
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6.48	10,75	165,90

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sebelum Reviu pada :

- A. MISI 1 :** Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing. Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.



1. Angka Harapan Lama Sekolah, mencapai 100,07%
2. Angka Rata-rata Lama Sekolah, mencapai 102,14%
3. Umur Harapan Hidup, mencapai 101,07%
4. Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya, mencapai 105,22%

B. MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih. Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan prima.

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”, mencapai 100%
2. Nilai AKIP, predikat A atau 100%
3. Opini BPK, N/A (Belum Keluar Nilai atau Predikat)
4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 109,39%
5. Nilai EPPD, N/A (Belum Keluar Nilai)

C. MISI 3 : Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan. Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal.

1. Indeks Daya Saing Pariwisata, mencapai 103,33%
2. Angka Kemiskinan, mencapai 71,99 %
3. Tingkat Pengangguran Terbuka , mencapai 112,06%

D. MISI 4 : Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan. Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

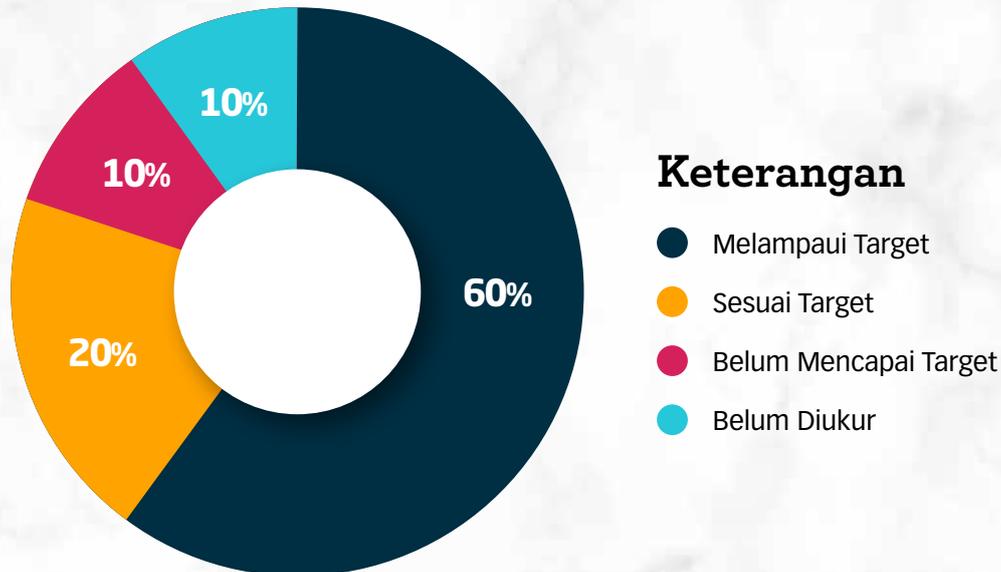
1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, mencapai 107,72%
2. Persentase Luasan RTH, mencapai 93,82%
3. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah, mencapai 100%
4. Persentase Penurunan Kemacetan, mencapai 100%
5. Persentase Luasan Kawasan Kumuh, mencapai 115,94%
6. Cakupan Pelayanan Air Minum, mencapai 103,83%
7. Persentase Penurunan Titik Genangan, mencapai 170,58%

E. MISI 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi. Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta.

Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan , mencapai 165,90 %

Grafik 2.4

Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022



Hasil dari capaian di atas turut didukung program prioritas daerah di Kota Bandung. Itu telah ditetapkan dan merupakan kesinambungan substansi program-program yang sudah berjalan pada periode sebelumnya serta mempertimbangkan janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandung.

Program-program pembangunan lima tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023, yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penjelasan tentang Capaian Janji walikota dan Wakil Walikota sebagai substansi yang terkait erat dengan pencapaian Visi dan Misi. Berkenaan dengan janji-janji Walikota dan Wakil Walikota, tercatat ada 26 item janji politik yang terdiri atas aspek: Bandung Unggul, Bandung Nyaman, Bandung Sejahtera dan Bandung Agamis.

Tidak seluruh item janji tersebut merupakan indikator outcome sasaran strategis RPJMD Kota Bandung tetapi merupakan output penting, sehingga diperlukan penjelasan tersendiri. Pencapaian kinerja terhadap Janji Walikota dan Wakil Walikota diuraikan dalam sub bab pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang relevan.

2.3.8 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisa Kinerja Sasaran Strategis

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi Pemerintah Kota Bandung untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018-2023, lebih lanjut diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022.

Dalam laporan ini, Pemerintah Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2018-2023 maupun RKPD Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kota Bandung Tahun 2022, telah ditetapkan 8 (delapan) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut :

1	Sasaran	1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	Sebanyak	2	Indikator
2	Sasaran	3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Sebanyak	1	Indikator
3	Sasaran	4	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	Sebanyak	1	Indikator
4	Sasaran	9	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Sebanyak	5	Indikator
5	Sasaran	12	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	Sebanyak	3	Indikator
6	Sasaran	15	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Sebanyak	3	Indikator
7	Sasaran	19	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	Sebanyak	4	Indikator
8	Sasaran	20	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	Sebanyak	1	Indikator



Berdasarkan hasil reviu oleh KemenPAN-RB telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 050/Kep.2223-Bappelitbang/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, menjadi 8 (delapan) sasaran dengan 9 (sembilan) indikator kinerja (outcome).

Secara umum Pemerintah Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 sebagai berikut:

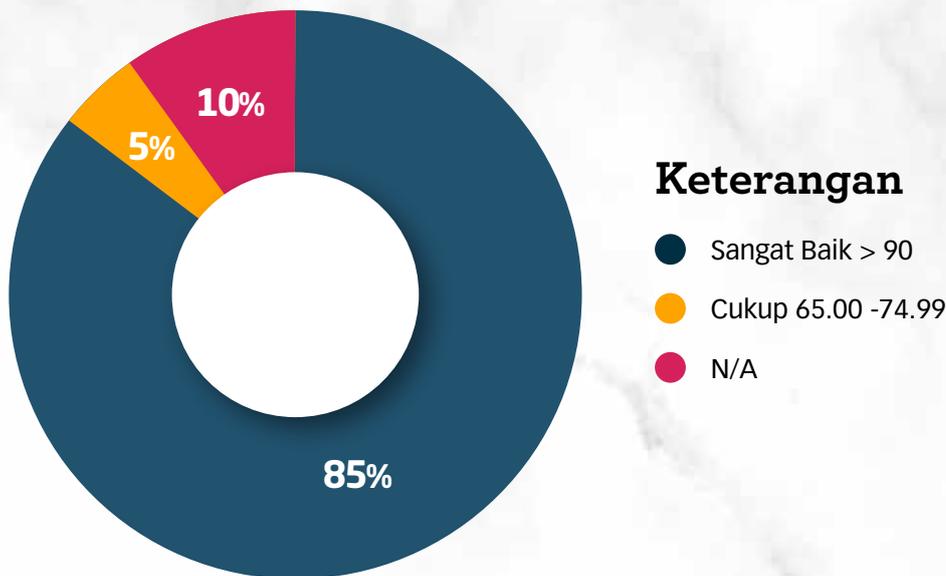
Tabel 2.15
Pengukuran Kinerja
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TAHUN 2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14.22	14.23	100.07%
		2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.77	11.00	102.14%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Umur Harapan Hidup	Tahun	73.96	74.75	101.07%
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	Poin	6.70	7,05	105,22%
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	Perentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	Persentase	90	90	100%
		6	Nilai AKIP	Predikat	A	A	100%
		7	Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A
		8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	3.30	3.61	109.39%
		9	Nilai EPPD	Skor	3.4033	N/A	N/A
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	10	Indeks Daya Saing Pariwisata	Poin	3.30	3.41	103.33%
		11	Angka Kemiskinan	Poin	3.32	4.25	71.99%
		12	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	10.86	9.55	112.06%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	51.71	55.70	107.72%
		14	Persentase Luasan RTH	Persen	13.26	12.44	93.82%
		15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	Persen	98.70	98.70	100%
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	16	Persentase Penurunan Kemacetan	Persen	14.78	14.78	100%
		17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	Persen	2.76	2.32	115.94%
		18	Cakupan Pelayanan Air Minum	Persen	82.00	85.14	103.83%
		19	Persentase Penurunan Titik Genangan	Persen	50.00	14.71	170.58%
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	Persen	6.48	10,75	165,90%

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Sasaran di atas dapat digambarkan Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022, sebagaimana grafik dan tabel berikut :

Grafik 2.5

**Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022**



Keterangan

- Sangat Baik > 90
- Cukup 65.00 - 74.99
- N/A

Tabel 2.16

**Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022**

No.	Predikat	Rata-Rata Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat Baik	>90	17
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	1
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	
6	N/A	Tidak Diukur	2
Jumlah			20

Adapun kategori pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.17

**Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah
Kota Bandung Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	JUM-LAH INDI-KA-TOR	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN	0-49.9	50.00-64.99	65.00-74.99	75.00-89.99	>90
				SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	SANGAT BAIK
MISI 1 Membangun Masyarakat Yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing								
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101,10%					SANGAT BAIK
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	101,07%					SANGAT BAIK
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	105,22%					SANGAT BAIK
MISI 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih								
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	SANGAT KURANG				

MISI 3 Membangun Perekonomian Yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan							
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	95,79%				SANGAT BAIK
MISI 4 Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan							
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	100,51%				SANGAT BAIK
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	122,59%				SANGAT BAIK
MISI 5 Mengembangkan Pembiayaan Kota Yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi							
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	165,90%				SANGAT BAIK

Tabel 2.18

Pencapaian Target Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	JUM-LAH IN-DOKA-TOR	PRE-SENTASE RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
				MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TAR-GET		BELUM MEN-CAPAI TARGET (<100%)	
				JUMLAH	%	JUMLAH	%	JUMLAH	%
MISI 1 Membangun Masyarakat Yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing									
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2		2	101.10%				
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1		1	101.07%				
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1		1	105.22%				
MISI 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih									
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	1	109.39%	2	100%	2	N/A
MISI 3 Membangun Perekonomian Yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan									
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	95,79%	2	107.70%			1	71,99%
MISI 4 Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan									
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3		1	107,72%	1	100%	1	93,82%
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	122,59 %		130,12%	1	100%		
MISI 5 Mengembangkan Pembiayaan Kota Yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi									
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1		1	165,90%				

2.3.9 Akuntabilitas Keuangan

Belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Komponen yang mengindikasikan aktivitas dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah belanja daerah. Komponen ini merupakan pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah yang diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja yang pengeluarannya disesuaikan dengan kemampuan dan potensi fiskal daerah.

Arah kebijakan belanja daerah disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, prioritas pembangunan sesuai potensi dan permasalahannya, serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun depan.

Anggaran belanja daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, seharusnya belanja daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Belanja daerah Pemerintah Kota Bandung pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp7.412.915.234.850 dengan capaian realisasi Rp6.474.571.811.554 (capaian realisasi 87,34%) dengan rincian pada tabel berikut:



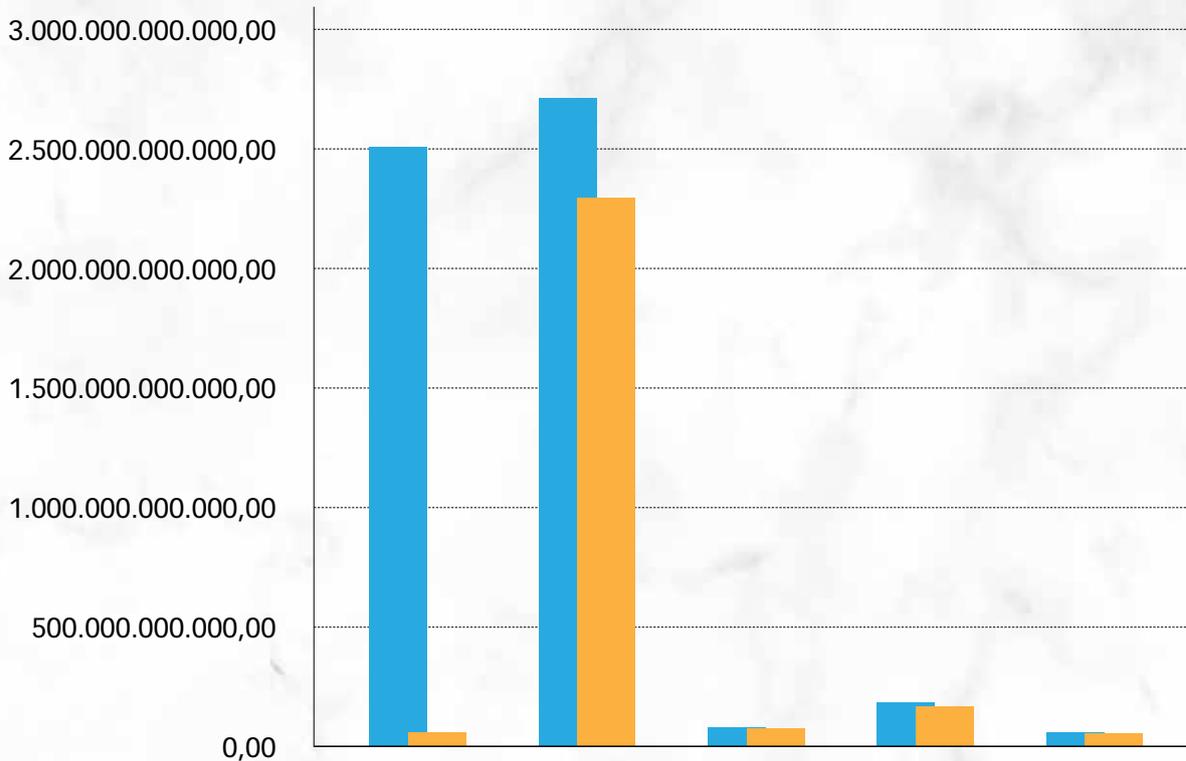
Tabel 2.19
Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung
Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Operasi	6.541.691.801.049	5.780.415.847.033	88,36%
2	Belanja Modal	773.786.484.922	644.171.724.240	83,25%
3	Belanja Tidak Terduga	69.985.448.879	22.532.740.280	32,20%
4	Belanja Transfer	27.451.500.000	27.451.500.000	100%
Jumlah		7.412.915.234.850	6.474.571.811.554	87,34%

Sumber: LRA Kota Bandung 2022 Sebelum Review

Grafik 2.6

Realisasi Belanja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)



Belanja operasi Kota Bandung pada tahun 2022 terbagi menurut jenis belanja, yang terdiri atas:

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa;
3. Belanja Hibah; dan
4. Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Operasi pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp6.541.691.801.049 dengan capaian realisasi Rp5.780.415.847.033 (capaian realisasi 88,36%) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 2.20

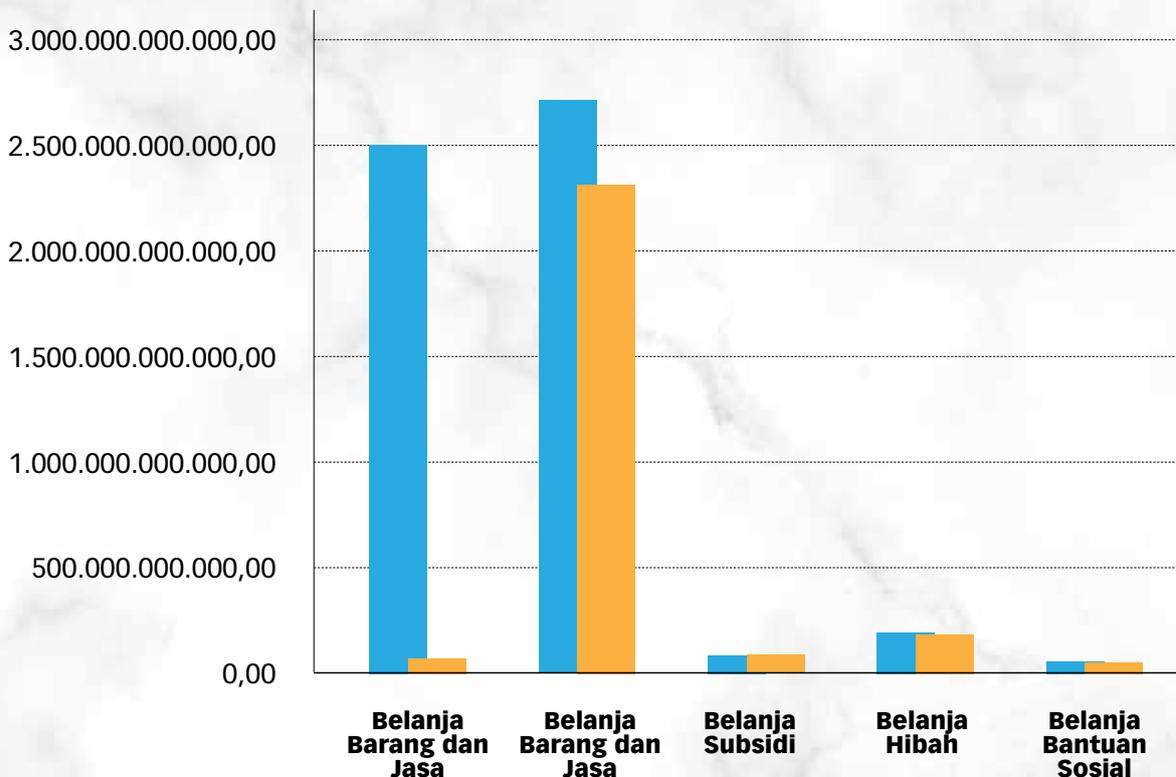
Perincian Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Audit BPK-RI)

NO	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Belanja Pegawai	2.861.519.800.665	2.480.313.890.636	86.68%
2	Belanja Barang dan Jasa	3.083.711.650.924	2.721.885.348.875	88.27%
3	Belanja Hibah	515.385.139.460	498.500.022.522	96.72%
4	Belanja Bantuan Sosial	81.075.210.000	79.716.585.000	98.32%
Jumlah		6.541.691.801.049	5.780.415.847.033	88.36

Sumber: BKAD Kota Bandung Tahun 2023

Grafik 2.7

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 (Sebelum Review)



Sumber: BKAD Kota Bandung Tahun 2023

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp2.861.519.800.665 dengan capaian realisasi Rp2.480.313.890.636 (capaian realisasi 86,68%). Belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji pegawai dan tambahan penghasilan PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp3.083.711.650.924 dengan capaian realisasi Rp2.721.885.348.875 (capaian realisasi 88,27%).

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp515.385.139.460 dengan capaian realisasi Rp498.500.022.522 (capaian realisasi 96,72%). Belanja ini diberikan kepada pemerintah pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah.

4. Belanja Bantuan sosial

Belanja bantuan sosial pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp81.075.210.000 dengan capaian realisasi Rp79.716.585.000 (capaian realisasi 98,32%). Belanja ini digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).



Tabel 2.21

Pagu Dan Realisasi Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022

NO	INDIKATOR SASARAN	RENCANA ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah	762,310,215,200.00	698,549,085,261.00	91.64%
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	12,458,009,100.00	9,270,262,461.00	74.41%
3	Umur Harapan Hidup	1,871,720,514,164.00	1,586,372,281.301.50	84,75%
4	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	379,662,552,521.00	367,115,299,194.74	96.70%
5	Perentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM "Baik"	393,447,599,002.00	345,822,376,096.00	87.90%
6	Nilai AKIP	11,691,517,234.00	9,949,448,769.00	85.10%
7	Opini BPK	109,893,777,758.00	60,849,542,911.00	55.37%
8	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	16,112,089,066.00	14,553,494,799.00	90.33%
9	Nilai EPPD	569,272,300.00	552,887,050.00	97.12%
10	Indeks Daya Saing Pariwisata	55,789,816,381.00	52,226,493,619.00	93.61%
11	Angka Kemiskinan	22,666,400,034.00	13,702,184,225.00	60.45%
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	32,652,097,948.00	26,463,052,462.00	81.05%
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	10,584,942,087.00	9,748,022,393.00	92.09%
14	Persentase Luasan RTH	97,540,637,792.00	91,354,012,779.00	93.66%
15	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	288,386,096,280.00	256,727,098,357.00	89.02%
16	Persentase Penurunan Kemacetan	271,602,635,518.00	150,653,175,425.00	55.47%
17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	117,396,990,751.00	101,943,035,361.00	86.84%
18	Cakupan Pelayanan Air Minum	10,859,308,130.00	10,332,969,323.00	95.15%
19	Persentase Penurunan Titik Genangan	99,413,237,584.00	90,671,578,417.00	91.21%
20	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan			
Jumlah		4,564,757,708,850.00	3,896,856,300,204.24	84,31%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja sasaran, yang diperjanjikan Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang direalisasikan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran
Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2022

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PRESENTASE RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	ANGGARAN		TINGKAT EFEKTIFITAS
				REALISASI (RP)	%	
MISI 1 Membangun Masyarakat Yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing						
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101.10%	707,819,347,722.00	91,36%	110,67%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	101.07%	1,586,372,281.301.50	84,75%	119,25%
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	105,22%	367,115,299,194.74	96,70%	108,82%
MISI 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih						
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	431,727,749,625.00	81.20%	N/A
MISI 3 Membangun Perekonomian Yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan						
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	95,79%	92,391,730,306.00	83.15%	115,20%
MISI 4 Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan						
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	100.51%	Rp 357,829,133,529.00	90.24%	111.38%
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	122.59%	Rp 353,600,758,526.00	70.82%	173.09%
MISI 5 Mengembangkan Pembiayaan Kota Yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi						
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	165,90%	-	-	-



Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2022 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran Pemerintah Kota Bandung.

Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 8 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 6 sasaran strategis. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 2.23

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	PRESENTASE RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
MISI 1 Membangun Masyarakat Yang Humanis, Agamis, Berkualitas dan Berdaya Saing					
1	Meningkatnya Pendidikan Masyarakat	2	101.10%	91.36%	9.74%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	101.07%	84.76%	16.31%
3	Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis	1	105.22%	96.70%	8.53%
MISI 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih					
4	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	5	N/A	81.20%	N/A
MISI 3 Membangun Perekonomian Yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan					
5	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota	3	95.79%	83.15%	12,64%
MISI 4 Mewujudkan Bandung Nyaman Melalui Perencanaan Tata Ruang, Pembangunan Infrastruktur, Serta Pengendalian Pemanfaatan Ruang Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan					
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	3	100.51%	90.24%	10.27%
7	Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	4	122.59%	70.82%	51.76%
MISI 5 Mengembangkan Pembiayaan Kota Yang Partisipatif, Kolaboratif dan Terintegrasi					
8	Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan	1	165,90%	0	165,90%

2.3.10 Analisis Pencapaian Per Sasaran Strategi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pendidikan Masyarakat

Meningkatnya Pendidikan Masyarakat. Sasaran-sasarannya berupa Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 (empat) RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.24

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pendidikan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14,00	14,19	101,29	14,01	14,20	100,71	14,21	14,21	100
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	N/A	10,74	N/A	N/A	10,75	N/A	10,76	10,99	102,13
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A			101,07		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Angka Harapan Lama Sekolah	14.22	14.23	100.07	14.23
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	10.77	11.00	102.14	10.78
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		101,10			

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat dapat dilihat dari sebanyak 2 (dua) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)” yaitu dari target 14,22 tahun tercapai melebihi target yaitu 14,23 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100.07%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 14,21 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 14,23 tahun maka capaian kerjanya 100%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian HLS Kota Bogor tahun 2022 sebesar 13,43 tahun.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Angka Rata-rata Lama Sekolah” dari target 10.77 tahun tercapai melebihi target yaitu 11.00 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 102.14%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 10.99 tahun mengalami peningkatan sebesar 0.01 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 10.78 maka capaian kerjanya 102.04%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian RLS Kota Bogor tahun 2022 sebesar 10,63 tahun.

1. Angka Harapan Lama Sekolah

The screenshot shows the BPS website interface with a table titled "[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun), 2021-2022". The table lists various districts and their corresponding HLS values for 2021 and 2022. The 'Kota Bandung' row is highlighted in blue.

Provinsi/Kabupaten/Kota	2021	2022
Kabupaten Bandung	12,77	12,77
Kabupaten Bandung Barat	12,00	12,00
Kabupaten Bandung Barat	11,89	11,89
Kabupaten Bandung Barat	12,00	12,00
Kabupaten Bandung Barat	12,44	12,44
Kabupaten Bandung Barat	12,58	12,58
Kota Bandung	14,25	14,25
Kota Bandung	12,11	12,11
Kota Bandung	12,10	12,10
Kota Bandung	12,88	12,88
Kota Bandung	12,81	12,81
Kota Bandung	12,46	12,46
Kota Bandung	12,54	12,54
JAWA TENGAH	12,77	12,77
Daerah	12,89	12,89
Sampurna	12,87	12,87
Purabaya	12,80	12,80

Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2022

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.



Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$EYS'_a = FKx \sum_{i=a}^n \frac{E'_i}{P'_i}$$

Dimana:

EYS'_a : Harapan lama sekolah pada umur a di tahun t ;

E'_i : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t ;

P'_i : Jumlah penduduk usia i pada tahun t ;

i : Usia ($a, a+1, \dots, n$) ;

FK : Faktor koreksi.

Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan Pendidikan dan digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.

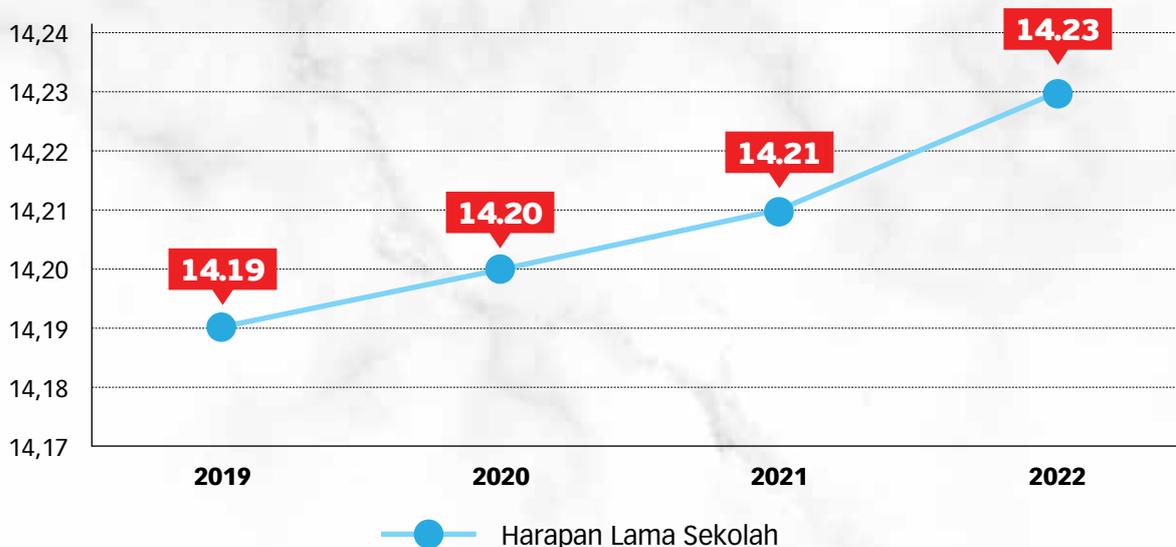
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari dimensi pengetahuan di Indonesia menunjukkan kemajuan sepanjang 2011-2022. Ini tercermin dari membaiknya Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan anak-anak yang pada 2020 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 14,21 tahun (hingga Diploma III) lebih lama 0,01 tahun dari tahun sebelumnya yang 14.20 tahun. Capaian kinerja indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) pada tahun 2022 yaitu dari target 14,22 tahun tercapai sesuai target yaitu 14,23 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100,07%.

Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 14,21 tahun mengalami peningkatan sebesar 0,02 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 14,23 maka capaian kerjanya 100,00%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian HLS Kota Bogor tahun 2022 sebesar 13,43 tahun.



Dengan semakin tingginya HLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Berikut grafik perkembangan capaian Harapan Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Grafik 2.8
Perkembangan Capaian Harapan Lama Sekolah



Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator Harapan Lama Sekolah adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2. Program Pengembangan Kurikulum
Kegiatan:
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan:

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Harapan Lama Sekolah terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP
3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
4. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah

sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah
2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik



2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Program Pendidikan	2021	2022
Tarbiyah	7,76	7,86
Bahasa	8,80	8,80
Bahasa Barat	8,80	8,80
Perdagangan	7,80	8,00
Kejuruan	10,00	10,00
Kota Sukabumi	8,84	10,00
Kota Bandung	10,00	11,00
Kota Cirebon	10,00	10,00
Kota Bekasi	11,33	11,44
Kota Depok	11,00	11,40
Kota Ciamis	11,00	11,00
Kota Tasikmalaya	8,70	8,70
Kota Bogor	8,77	8,78
Jawa Tengah	7,70	7,80
Cirebon	7,80	7,80
Bandung	7,80	7,80

Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2022

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.



Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.



Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS). Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$MYS = \frac{1}{P15+} \sum_{i=1}^{P15+} xi$$

Keterangan:

MYS: Rata-rata lama sekolah

P15+ : Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas

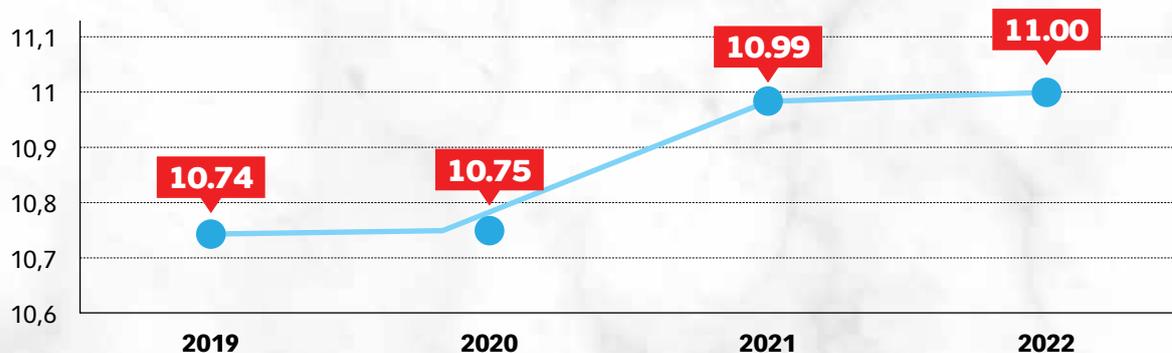
Xi: Lama sekolah penduduk ke i

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bandung mencapai 11.00 tahun, naik 0,01 tahun dibandingkan tahun 2020.

Capaian kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2022 yaitu dari target 10.77 tahun tercapai melebihi target yaitu 11.00 tahun dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 102.14%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu sebesar 10.99 tahun mengalami peningkatan sebesar 0.01 tahun. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 10.78 maka capaian kerjanya 102.04%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian RLS Kota Bogor tahun 2022 sebesar 10,63 tahun. Dengan semakin tingginya RLS maka pemerintah Kota Bandung perlu meningkatkan upaya agar anak-anak yang saat ini sedang bersekolah SD/MI dan SMP/MTs dapat mengikuti proses pendidikan selanjutnya. Capaian Kinerja Rata-Rata Lama Sekolah diukur oleh Badan Pusat Statistika (BPS) dan terus meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Capaian RLS tahun 2019 adalah 10.74 tahun, capaian RLS tahun 2020 adalah 10.75 tahun, capaian RLS tahun 2021 adalah 10.99 tahun, dan capaian RLS tahun 2022 adalah 11.00 tahun. Berikut grafik perkembangan capaian Rata-Rata Lama Sekolah dari tahun 2019 sampai dengan 2022.

Grafik 2.9

Perkembangan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah



Sumber: Data Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2022

Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja indikator Rata-Rata Lama Sekolah adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan:
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - c. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - d. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2. Program Pengembangan Kurikulum
Kegiatan:
 - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan:

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan.

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Rata-Rata Lama Sekolah terdapat beberapa faktor pendukung, hambatan serta solusi sebagai berikut:

Faktor Pendukung :

1. Ketersediaan sarana, prasarana dan bangku sekolah yang mencukupi
2. Adanya Bantuan Pendidikan untuk warga yang kurang mampu agar bisa sekolah untuk jenjang SD dan SMP
3. Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten
4. Terimplementasinya Kurikulum Pendidikan yang memenuhi standar

Faktor Penghambat:

1. Masih ada sekolah yang belum terdata dalam dapodik
2. Masih adanya anak putus sekolah yang disebabkan oleh faktor pembiayaan, faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak

Solusi:

1. Akan diadakan sebuah tim unit reaksi cepat untuk pendataan anak putus sekolah
2. Pendayagunaan penilik dan pengawas dalam pendataan sekolah yang belum terdata dalam dapodik.

Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. Sasarannya berupa Umur Harapan Hidup. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.25

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Umur Harapan Hidup	73,9	74,14	100,32	73,92	74,28	100,48	73,94	74,46	100,70
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,32			100,49			100,70		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Angka Harapan Lama Sekolah	73,96	74,75	101,07	73,98
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		101,07			

Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yaitu :

Capaian indikator kinerja “Umur Harapan Hidup” yaitu dari target tahun 2022 yaitu 73,96 tercapai melebihi target yaitu 74,75 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 101.07%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 74,46 mengalami peningkatan sebesar 0,29. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 73,98 tahun maka capaian kerjanya 101,04%. Realisasi UHH Kota Bandung pada Tahun 2022 yaitu 74,75 telah melebihi realisasi UHH Provinsi Jawa Barat yaitu 73.52 . Kota Bandung menempati urutan ketiga capaian UHH tertinggi setelah Kota Bekasi dengan 75.48 dan Kota Depok dengan 74.97.

1. Umur Harapan Hidup (UHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. AHH juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang setelah orang tersebut mencapai ulang tahun yang ke-X. Ukuran yang umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan pada saat itu. Sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir.

Angka harapan Hidup dihitung oleh BPS berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian.

Kategori IPM Nasional Berdasarkan	2020	2021	2022
Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,25	74,46	74,75
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	14,20	14,21	14,23
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	10,75	10,94	11,09
Pengeluaran Perkapita Domestik (Rp Rp)	18.847,00	18.494,00	17.526,00
Indeks Pembangunan Manusia	61,51	61,86	62,50
Perubahan UHH	-0,22	0,25	0,44

Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2022

Indeks Kesehatan merupakan salah satu komponen dari Indeks Pembangunan Manusia. Ukuran yang digunakan sebagai bahan perhitungan Indeks Kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH). Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk.

Angka Harapan Hidup dijadikan Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja pada Misi I RPJMD karena AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Capaian Kinerja nyata Umur Harapan Hidup (UHH) adalah sebesar 74,75 dari target 73.96 yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101.07%. Data ini diperoleh dari Berita resmi <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/26/98/1/indeks-pembangunan-manusia.html>.

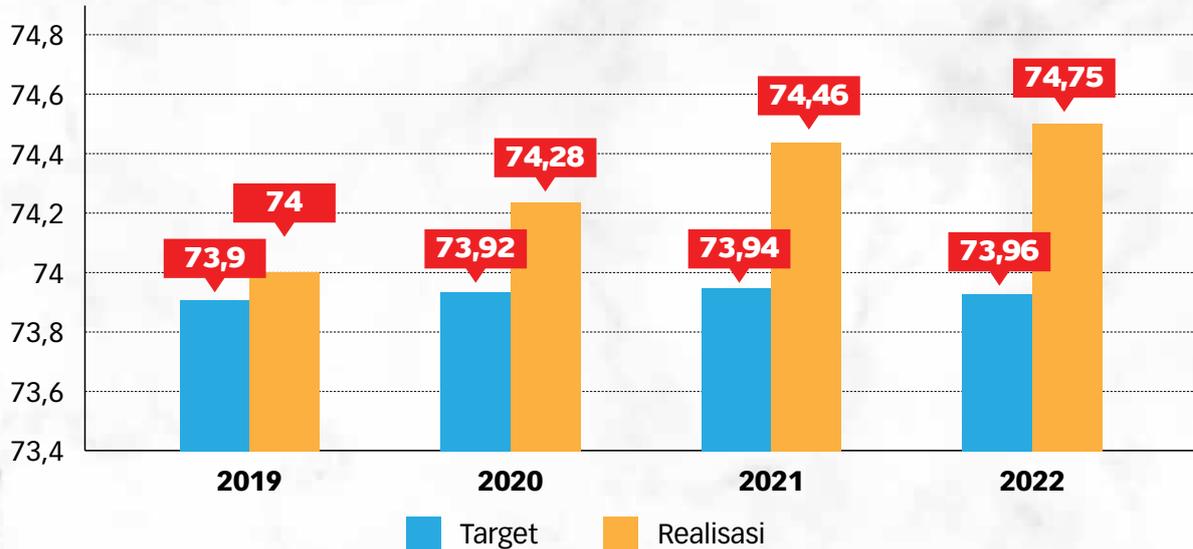


UHH 74,75 mempunyai interpretasi bahwa secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 74.75 tahun.



Realisasi UHH dibandingkan dari tahun 2019 sampai dengan 2022 dapat dilihat peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini dapat terlihat secara lebih jelas pada grafik sebagai berikut :

Grafik 2.10
Realisasi UHH Kota Bandung Tahun 2019 - 2022



Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 sampai dengan tahun 2022, UHH mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2022 adalah sebesar 0,29.

Perbandingan capaian indikator kinerja UHH Kota Bandung dengan Kabupaten Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.26
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2022

No	Wilayah Jawa Barat	IPM Menurut Komponen			
		Angka Harapan Hidup			
		2019	2020	2021	2022
	Provinsi Jawa Barat	72.85	73.04	73.23	73.52
1	Bogor	71.01	71.17	71.36	71.65
2	Sukabumi	70.73	70.97	71.21	71.54
3	Cianjur	69.91	70.13	70.32	70.58
4	Bandung	73.40	73.53	73.72	74.01
5	Garut	71.22	71.41	71.59	71.85
6	Tasikmalaya	69.21	69.47	69.67	69.95
7	Ciamis	71.57	71.83	72.02	72.30
8	Kuningan	73.35	73.59	73.78	74.03
9	Cirebon	71.82	71.99	72.18	72.47
10	Majalengka	69.97	70.27	70.46	70.76
11	Sumedang	72.29	72.43	72.62	72.91
12	Indramayu	71.37	71.63	71.84	72.15
13	Subang	72.13	72.35	72.58	72.92

14	Purwakarta	70.80	70.99	71.18	71.47
15	Karawang	71.98	72.15	72.33	72.62
16	Bekasi	73.56	73.68	73.81	74.04
17	Bandung Barat	72.18	72.34	72.52	72.79
18	Pangandaran	71.12	71.40	71.60	71.89
19	Kota Bogor	73.41	73.61	73.82	74.13
20	Kota Sukabumi	72.26	72.42	72.58	72.85
21	Kota Bandung	74.14	74.28	74.46	74.75
22	Kota Cirebon	72.13	72.26	72.44	72.74
23	Kota Bekasi	74.89	75.01	75.19	75.48
24	Kota Depok	74.31	74.44	74.62	74.92
25	Kota Cimahi	73.89	74.03	74.21	74.50
26	Kota Tasikmalaya	71.93	72.15	72.34	72.63
27	Kota Banjar	70.79	70.99	71.19	71.49

Sumber: Berita Resmi Statistik No. 74/12/32/Th. XXIV, 1 Desember 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi UHH Kota Bandung pada Tahun 2022 yaitu 74,75) telah melebihi realisasi UHH Provinsi Jawa Barat yaitu 73.52 . Kota Bandung menempati urutan ketiga capaian UHH tertinggi setelah Kota Bekasi dengan 75.48, Kota Depok dengan 74.97.

Faktor pendorong tercapainya AHH dari bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Meningkatnya akses terhadap pelayanan kesehatan, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah Kota Bandung . Pada Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Bandung memiliki :
 - a. 3 RS milik Pemerintah yaitu RSKIA, RSUD, RSKGM dan 38 RS Milik Swasta
 - b. 82 UPT terdiri dari 80 UPT Puskesmas yang tersebar di 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, 1 UPT P2KT dan 1 UPT Laboratorium Kesehatan
2. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan, hal ini dapat dilihat dari tercapainya indikator Kinerja Utama Kepala Dinas Kesehatan Tahun 2022 , pengukuran kinerja dilakukan terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 7 indikator yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022. Dari 7 indikator diperoleh 5 indikator (71,43%) melebihi target, 1 indikator (14,29%) sesuai target dan 1 indikator (14,29%) tidak mencapai target. Adapun faktor pendorong tercapai dan terlampauinya pencapaian indikator tersebut di atas adalah :

A. **Angka Kematian Ibu** , faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- a. Pemenuhan sumber daya serta sarana dan prasarana yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk menjamin Ibu memperoleh layanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan sesuai standar. Diantaranya adalah penyediaan alat bantu diagnosis berupa mesin Ultra Sonography (USG) di Puskesmas yang menjadi pendukung terlaksananya skrining kesehatan Ibu hamil sehingga faktor risiko kehamilan dapat diketahui dan ditatalaksana sedini mungkin.
- b. Penambahan fasilitas RS sebagai penyedia layanan rujukan kasus kegawatdaruratan Ibu dan Bayi menjadi salah satu fokus perhatian Pemerintah Kota Bandung untuk menurunkan kematian Ibu.
- c. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan juga terus dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.

- d. Perbaikan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan ibu anak termasuk pelaporan kematian dan audit kematian juga telah dilaksanakan secara berkala, sehingga dapat dihasilkan analisa penyebab kematian dan rekomendasi perbaikan layanan kesehatan secara berkesinambungan.
- e. Upaya Perbaikan lingkungan baik lingkungan fisik, sosial maupun biologis oleh Pemerintah Kota Bandung, salah satu caranya adalah dengan terus meningkatkan akses sanitasi. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menurunkan kematian Ibu.
- f. Peningkatan upaya promotif untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat terus dilakukan oleh Dinas Kesehatan melalui berbagai media informasi dan komunikasi yang dimungkinkan.

B. Angka Kematian Bayi, faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- a. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan melalui pemanfaatan aplikasi MPDN yang menjadi salah satu faktor terlaporkannya seluruh kematian bayi yang sebelumnya tidak dilaporkan.
- b. Perbaikan jejaring komunikasi dengan para penanggungjawab layanan kesehatan ibu dan anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) juga menyebabkan kualitas pelaporan semakin meningkat.
- c. Pengkajian kematian yang diselenggarakan secara rutin telah menghasilkan analisa penyebab serta rekomendasi untuk mencegah terjadinya kematian berikutnya. Meski demikian, perlu kebijakan lebih kuat untuk mendorong agar rekomendasi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
- d. Upaya Pemerintah Kota Bandung dengan membentuk Tim Penyelamat Ibu dan Bayi melalui Keputusan Walikota Nomor 440/Kep.1001-Dinkes/2021 menjadi salah satu jalan untuk menyediakan dasar pelibatan seluruh lintas sektor terkait dalam menjalankan rekomendasi tersebut.
- e. Peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pemanfaatan buku KIA yang telah didistribusikan kepada seluruh sasaran ibu hamil sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya keluarga tentang perawatan bayi baru lahir serta deteksi dini faktor risiko yang dapat terjadi pada bayi, sehingga mencegah terjadinya kesakitan dan komplikasi yang berujung pada kematian.
- f. Upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan anak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) juga telah dilakukan melalui penambahan sarana dan prasarana yang mampu menangani kegawatdaruratan perinatal.
- g. Pelaksanaan kegiatan orientasi ataupun pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam perawatan kesehatan dan penanganan komplikasi pada neonatus dan bayi dengan melibatkan tenaga dokter spesialis di Fasyankes rujukan juga menjadi salah satu faktor penguat dalam peningkatan kompetensi tersebut.

C. Cakupan Rumah Sehat, faktor yang mendorong tercapainya target adalah:

- a. Terjadinya peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi dasar, yang menyebabkan penurunan tingkat risiko terhadap penyakit berbasis lingkungan
- b. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan, OPD terkait dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sanitasi dari sanitasi dasar yang layak menjadi sanitasi dasar yang aman

- D. Persentase balita gizi buruk**, faktor yang mendorong tercapainya target adalah:
- Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan melalui pemanfaatan ePPGBM oleh Puskesmas telah mendorong peningkatan pengelolaan masalah gizi di wilayah. ePPGBM merupakan sistem pencatatan dan pelaporan program gizi yang membantu Puskesmas dalam menyelenggarakan surveilans gizi buruk di wilayah kerjanya, dimana sistem pada ePPGBM akan menunjukkan tanda lonceng sebagai pemberitahuan untuk Puskesmas jika data balita yang telah diunggah memiliki status gizi rawan.
 - Tanda lonceng pada sistem e-PPGBM menjadi sistem peringatan dini bagi Puskesmas untuk segera melakukan penanganan dan intervensi yang diperlukan, baik berupa penyuluhan, pembinaan keluarga maupun pemberian PMT Pemulihan maupun rujukan bilamana diperlukan.
 - Kolaborasi serta dukungan dari lintas sektor dan kewilayahan yang harmonis memberikan dampak positif penanganan permasalahan gizi buruk di Kota Bandung. Kolaborasi dan kerjasama semua pihak, baik pemerintah, unsur swasta, institusi pendidikan, masyarakat maupun media di Kota Bandung melahirkan berbagai inovasi dalam upaya peningkatan intervensi masalah gizi. Kader posyandu yang aktif dalam melakukan pemantauan balita bermasalah gizi di tiap wilayah juga menjadi salah satu faktor pendorong tercapainya target.
 - Pemantauan status gizi balita secara berkala sangat menentukan keberhasilan penanganan masalah gizi pada anak sehingga sangat penting untuk mendorong ibu dan keluarga untuk terlibat aktif dalam pemantauan tumbuh kembang balita nya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu setiap bulan sangat menentukan hasil surveilans gizi masyarakat di wilayah. Dukungan aparat kewilayahan untuk penggerakkan sasaran ke posyandu setiap bulannya mutlak diperlukan.
 - Edukasi dan promosi kesehatan terkait gizi juga selalu diberikan oleh tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan sehingga dapat lebih mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemantauan kesehatan dan status gizi balita secara rutin sehingga pada akhirnya kasus gizi buruk semakin turun dan permasalahan gizi di Kota Bandung dapat terselesaikan seutuhnya.
- E. Cakupan Pengendalian Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular.**
- Adanya dasar hukum kebijakan program penanggulangan Tuberkulosis (TBC) yaitu Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TBC
 - Sejalan dengan Surat Edaran Dirjen P2P nomor 936 tahun 2021 bahwa TCM (Test Cepat Molekuler) adalah alat diagnosis utama untuk penegakan diagnosis TBC, di Kota Bandung sudah ada 15 Fasyankes yang mempunyai alat TCM dan berjejaring dengan Fasyankes di wilayah Kota Bandung yaitu 1 BBKPM, 4 Rumah Sakit, 1 Labkes Prov Jawa Barat dan 9 Puskesmas
 - Capaian penemuan Pasien TBC di Kota Bandung di tunjang oleh kontribusi Fasyankes di luar Puskesmas yaitu Rumah Sakit baik pemerintah maupun swasta, BBKPM, DPM/Klinik Swasta dan Lapas Rutan
 - Adanya sistem pencatatan pelaporan program TBC yang sudah baku sehingga memudahkan untuk pengolahan data dan membuat perencanaan baik untuk kegiatan maupun untuk rencana penganggaran
 - Rumah Sakit di Kota Bandung yang sudah mempunyai MOU untuk pelaksanaan program penanggulangan TBC sesuai standar nasional sebanyak 26 dari 31 Rumah Sakit di Kota Bandung yang wajib DOTS
 - Adanya program spesimen tranport yang di danai oleh Global Fund melalui

- kurir PT. Pos untuk mempermudah Fasyankes melakukan rujukan spesimen pemeriksaan sampel sputum ke Fasyankes TCM
- g. Puskesmas melakukan kegiatan Active Case Finding (ACF) untuk melakukan skrining gejala TBC di populasi umum sehingga penemuan Terduga TBC tidak hanya mengandalkan penemuan secara masif di Fasyankes
 - h. Adanya tenaga terlatih mampu tatalaksana DOTS
 - i. Perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan hipertensi, rekonsiliasi data kasus kesakitan hipertensi FKTP swasta, bimbingan teknis dan monev berkala kepada petugas UPTD Puskesmas
 - j. Sudah dilakukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan tata laksana Hipertensi
 - k. Tersedianya alat dan obat-obatan untuk tata laksana kasus Hipertensi
 - l. Telah dilaksanakannya PANDU PTM di UPTD Puskesmas
 - m. UPTD Puskesmas telah memiliki SOP deteksi dini dan tata laksana kasus Hipertensi
 - n. Telah dilakukan rekonsiliasi data kasus kesakitan PTM dengan FKTP dan FKRTL di Kota Bandung
 - o. Sudah dilakukan penguatan kapasitas tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan tata laksana Kasus Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - p. Telah dilaksanakannya Surveilans Aktif berbasis Rumah Sakit dan Masyarakat
 - q. Telah dilaksanakannya pemantauan penyakit secara dini melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)

F. Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Kategori Baik

- a. Faktor yang mendorong tercapainya target adalah karena puskesmas dan RS Puskesmas dan RS (Milik pemerintah dan swasta) sebagai pemberi pelayanan kesehatan sudah terakreditasi. Di Kota Bandung ada 66 Puskesmas dan 34 RS dari 38 RS yang sudah diakreditasi, sehingga baik sarana, prasarana maupun pelayanan sudah lebih baik dan tentu saja hal ini akan berimplikasi kepada meningkatnya kepuasan dari pengguna layanan puskesmas yaitu masyarakat
- b. Tersedianya anggaran untuk perbaikan dan pemenuhan sarana dan prasarana baik di Puskesmas maupun di RS milik pemerintah

Keberhasilan program kesehatan terutama dalam pencapaian indeks kesehatan dan usia harapan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara unsur pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. **Sehubungan dengan hal tersebut, agar di tahun-tahun mendatang angka harapan hidup meningkat, maka pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat perlu bersama-sama melakukan hal-hal sebagai berikut :**

1. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Upaya peningkatan Kesehatan Lingkungan yang perlu dilakukan adalah :

 - a. Perbaikan kualitas lingkungan fisik bertujuan untuk menghindari Lingkungan yang memiliki kondisi sanitasi buruk yang dapat menjadi sumber berkembangnya penyakit dan dapat membahayakan kesehatan masyarakat .
 - b. Perbaikan kualitas lingkungan social bertujuan untuk memperbaiki :
 - i. kondisi perekonomian suatu masyarakat karena Semakin miskin individu/ masyarakat maka akses untuk mendapatkan derajat kesehatan yang baik akan semakin sulit.
 - ii. tingkat pendidikan individu/masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikan individu/masyarakat maka pengetahuan untuk hidup sehat akan semakin baik.

2. Peningkatan Perilaku Sehat

Upaya peningkatan perilaku sehat yang perlu dilakukan adalah dengan penerapan program Perilaku hidup bersih dan sehat mencakup perilaku individu & keluarga dalam rangka meningkatkan kesehatannya serta perilaku kelompok dan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Sebagai indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) setiap rumah tangga harus terpenuhi 10 (sepuluh) kriteria terdiri dari :

- a. Persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan
- b. Memberi bayi ASI eksklusif
- c. Menimbang bayi dan balita
- d. Menggunakan air bersih
- e. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun
- f. Menggunakan jamban sehat
- g. Memberantas jentik di rumah
- h. Makan buah dan sayur setiap hari
- i. Melakukan aktifitas fisik setiap hari
- j. Tidak merokok di dalam rumah.

3. Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Upaya peningkatan Pelayanan Kesehatan sesuai standar yang perlu dilakukan adalah dengan memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan sumber daya dan prosedur pelayanan yang meliputi : sumber daya manusia (petugas kesehatan yang profesional), sumber daya sarana dan prasarana (bangunan dan sarana pendukung) serta sumber daya dana (pembiayaan kesehatan) yang memadai.

4. Peningkatan Upaya Pencegahan Resiko Penyakit Genetik

Agar masyarakat dapat terhindar dari Resiko Penyakit Genetik genetik diperlukan intervensi pendidikan kesehatan disertai upaya pendekatan kepada pengambil keputusan (tokoh agama, tokoh masyarakat, dan penguasa wilayah). Intervensi berupa pendidikan kesehatan melalui konseling genetik, penyuluhan usia reproduksi, persiapan pranikah dan pentingnya pemeriksaan genetik dapat mengurangi resiko munculnya penyakit atau masalah kesehatan pada keturunannya.



Sasaran 3 : Meningkatnya Masyarakat Kota Yang Humanis

Meningkatnya Masyarakat Kota Yang Humanis. Sasarannya berupa Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.27

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Masyarakat Kota Yang Humanis Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	7,58	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,6	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A			N/A		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya	6,70	7.05	105.22	6,80
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		105.22			

Sasaran Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis dapat dilihat dari indikator sebagai berikut, yaitu :

Capaian indikator kinerja “Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya” dari target tahun 2022 yaitu 6.70 dengan realiasi yaitu 7.05 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 105.22%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun lalu N/A (karena tidak dilakukan pengukuran).

1. Indeks Liveable City Aspek Sosial Budaya

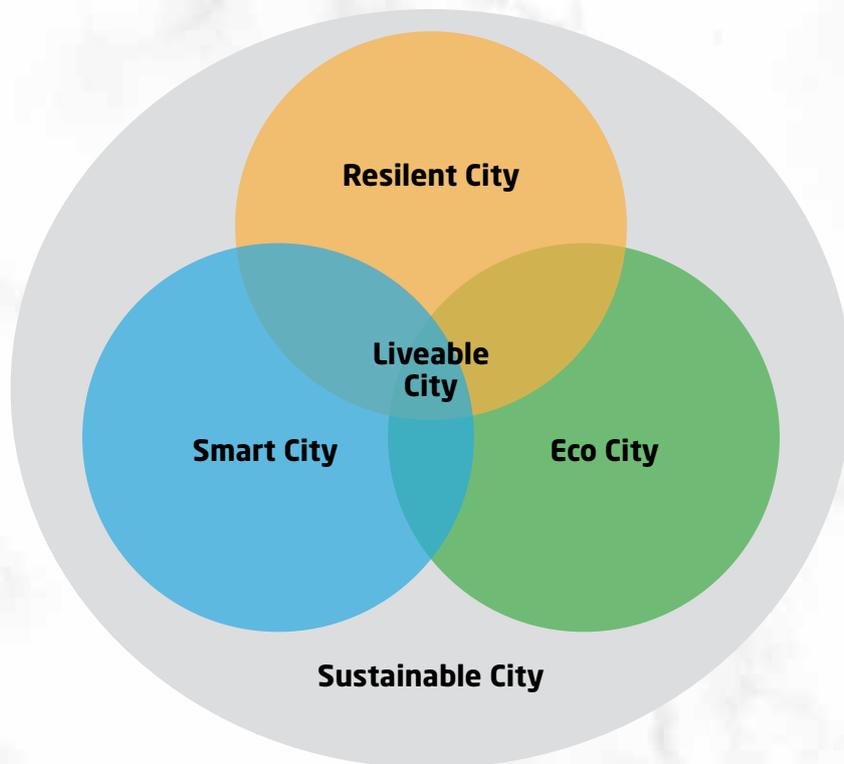
Livable City merupakan istilah yang menggambarkan sebuah lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat untuk beraktivitas ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain). Berbagai teori tentang ruang kota yang layak huni (livable) mengacu pada ruang kota yang nyaman dan aman bagi aktivitas manusia (Appleyard, 1981, www.livable.org). Konsep Livable City digunakan untuk mewujudkan gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup yang membutuhkan sinkronisasi aspek fisik dan habitat sosial untuk realisasinya.

Kajian terhadap konsep-konsep kota yang ada menyimpulkan bahwa konsep Livable City adalah irisan dari konsep-konsep lain seperti smart city, resilient city, dan eco-city. Ada sejumlah aspek dari konsep-konsep tersebut yang berkaitan dengan substansi dari Livable City, namun ada juga yang tidak. Konsep eco-city, misalnya, menekankan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan melebihi dari kenyamanan atau kemudahan penduduk dalam mengonsumsi sumberdaya. Aspek-aspek tersebut yang terdapat di luar irisan konsep Livable City dengan eco-city.

Lebih jauh, ciri utama dari konsep Livable City adalah sifatnya anthropocentric

atau berorientasi pada manusia. Artinya, mengukur livability dari sebuah kota harus mempertimbangkan aspek preferensi atau opini dari manusia yang menempatinnya. Selain itu, orientasi pada opini manusia juga dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi mengutamakan kenyamanan manusia melebihi aspek lain seperti keberlanjutan lingkungan, kekuatan politik pemerintah, atau ketersediaan teknologi. Konsep yang melingkupi konsep-konsep yang disebut di atas adalah sustainable city yang menilai kualitas kota secara komprehensif. Index Livable City lebih sempit dibandingkan sustainable city karena sifatnya yang lebih berorientasi pada manusia. Gambar dibawah menunjukkan keterkaitan antara konsep Livable City dengan konsep-konsep lainnya

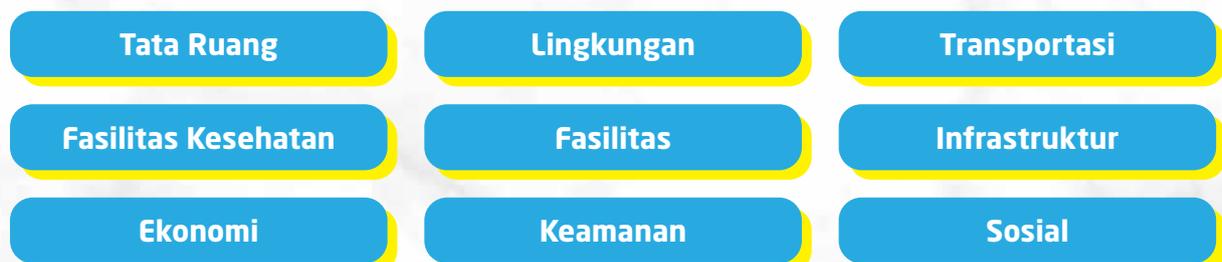
Grafik 2.11
Keterkaitan Konsep-konsep Kota



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Aspek Livable City yang dikaji dalam laporan ini meliputi 9 aspek, sesuai dengan konsepsi yang terdapat di dalam RPJMD Kota Bandung 2018-2023. Ke-9 aspek tersebut antara lain:

Grafik 2.12
Aspek Liveable City



Penjabaran mengenai masing-masing aspek meliputi:

- a. Aspek tata ruang terdiri atas indikator-indikator terkait dengan RTH, kebencanaan, penataan bangunan, dan kawasan kumuh.
- b. Aspek lingkungan terdiri atas indikator-indikator terkait kualitas lingkungan, taman, dan prevalensi penyakit.
- c. Aspek transportasi terdiri atas indikator-indikator terkait dengan kemacetan, angkutan umum, dan berjalan kaki.
- d. Aspek fasilitas kesehatan terdiri atas indikator-indikator terkait dengan rasio, cakupan, dan persepsi dari fasilitas kesehatan di Kota Bandung.
- e. Aspek fasilitas Pendidikan terdiri atas indikator-indikator terkait dengan rasio, cakupan, dan persepsi dari fasilitas Pendidikan di Kota Bandung.
- f. Aspek infrastruktur-utilitas terdiri atas indikator-indikator terkait dengan jalan, air bersih, persampahan, listrik, sanitasi, dan fasilitas ramah difabel.
- g. Aspek ekonomi terdiri atas indikator-indikator terkait dengan pengangguran dan persepsi tentang masalah-masalah ekonomi.
- h. Aspek keamanan terdiri atas indikator-indikator terkait dengan kriminalitas dan persepsi keamanan warga dari ancaman-ancaman.
- i. Aspek social terdiri atas indikator-indikator terkait dengan konflik dan kerukunan warga.

Kota Bandung saat ini terus berkembang menjadi salah satu Kota Besar di Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 2.452.900 jiwa pada Tahun 2021 (BPS Kota Bandung, 2022). Laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung juga cukup besar, mencapai 0.48 pada Tahun 2021 (BPS, 2022). Laju pertumbuhan penduduk tersebut telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2020 yang berada di angka 0.21. Selain tingginya tingkat kelahiran, migrasi masuk ke Kota Bandung juga memiliki andil dalam peningkatan laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung perlu bersiap dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat muncul seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kota Bandung.

Kota Bandung dituntut untuk dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien sebagai upaya menyelesaikan berbagai tantangan kota. Solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan harus dilaksanakan dalam penyediaan infrastruktur serta layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Kota yang nyaman sebagai tempat beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dan lain-lain) maupun aspek non fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dan lain-lain) merupakan cita-cita bersama di Kota Bandung. Kreativitas dan aktivitas warganya yang didukung dengan ruang-ruang yang nyaman menciptakan sebuah interaksi dan keselarasan dalam kehidupan perkotaan.

Pengukuran Index Livable City di Kota Bandung diperlukan untuk menggambarkan tingkat kenyamanan lingkungan dan suasana kota di Kota Bandung. Index Livable City dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kelayakhunian Kota Bandung berdasarkan pencapaian program dan persepsi masyarakat. Identifikasi awal faktor-faktor kritis pembangunan di Kota Bandung berdasarkan persepsi dan impresi warganya serta pencapaian program dapat diketahui secara cepat dan aktual. LCI Tahun 2019 dilakukan pada 9 aspek, yaitu :

1. Aspek Tata Ruang;
2. Aspek Lingkungan;
3. Aspek Transportasi;
4. Aspek Fasilitas Kesehatan;
5. Aspek Fasilitas Pendidikan;

6. Aspek Infrastruktur dan-Utilitas;
7. Aspek Ekonomi;
8. Aspek Keamanan; dan
9. Aspek Sosial.

Pengukuran skor indek menggunakan penilaian pada level kecamatan. Nilai LCI Kota Bandung diperoleh berdasarkan rata-rata nilai yang diperoleh masing-masing kecamatan di Kota Bandung.

Berdasarkan pada hasil pengolahan data, didapatkan bahwa skor LCI Kota Bandung pada tahun 2019 adalah sebesar 7,66 dari skala nilai 0 sampai 10 dengan nilai LCI tertinggi didapatkan oleh Kecamatan Cibeunying Kaler dengan skor 8.8 dan LCI terendah didapatkan oleh Kecamatan Ujungberung dengan skor 7,1. Bila dibandingkan dengan skor LCI tahun 2018, LCI Kota Bandung tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar 0,18 poin dan hampir mencapai target LCI tahun 2023 sebesar 8. Aspek yang memiliki nilai tertinggi adalah aspek kesehatan dengan skor 9,5 sedangkan aspek yang memiliki nilai terendah adalah aspek transportasi dengan skor 5,5. Di tahun 2018, aspek transportasi juga merupakan aspek dengan nilai terendah. Kecamatan yang mengalami peningkatan paling banyak adalah Kecamatan Kiaracondong dengan peningkatan skor mencapai 1,43 poin, sedangkan kecamatan yang paling mengalami penurunan adalah kecamatan Cibiru dengan penurunan skor mencapai 1,13.

Keseriusan Pemerintah Kota Bandung dalam mewujudkan Kota yang nyaman dituangkan dengan memasukkan pengukuran Index Livable City menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Perubahan Kota Bandung 2018-2023. Index Livable City Kota Bandung Tahun 2023 ditargetkan mencapai skor 8,00. Mengacu pada hal tersebut, dibutuhkan perhitungan Index Livable City di Kota Bandung Tahun 2022 untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan suasana kota Bandung Tahun 2022. Diharapkan, Index tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebijakan Walikota dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bandung menjadi kota yang nyaman untuk dihuni.



Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan adalah terwujudnya infrastruktur dan tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Indeks Livable City Aspek Tata Ruang, Transportasi, dan Infrastruktur-utilitas Kota Bandung sebagai indikator kinerjanya. Untuk mencapai misi tersebut, terdapat beberapa sasaran:

1. Meningkatnya Ruang Kota yang Nyaman dan Berkelanjutan. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan adalah Persentase RTH.
2. Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya infrastruktur kota terpadu dan berkualitas adalah Lama Genangan yang Tertangani pada Titik Genangan, Jumlah Titik Kemacetan, serta Persentase Luasan Kawasan Kumuh.
3. Meningkatnya Layanan Air Bersih. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya layanan air bersih adalah Cakupan Layanan Air Bersih.
4. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Bandung adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah.

Index Livable City mengukur tingkat kenyamanan kota didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Indeks ini dimaksudkan untuk mengukur kualitas kehidupan warga kota. Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur kelayakhunian kota, yaitu: aspek transportasi, aspek tata ruang, aspek lingkungan, aspek kesehatan, aspek sosial dan demokrasi, aspek ekonomi dan pekerjaan, dan aspek pendidikan. Index Livable City Kota Bandung tahun 2023 ditargetkan sebesar 8 poin, sedangkan realisasi di tahun 2019 adalah 7,66 berdasarkan pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung bekerjasama dengan perguruan tinggi.

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur kelayakhunian kota, responden diminta untuk memilih pernyataan yang dianggap paling penting dan tidak penting. Pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang mewakili aspek-aspek dalam indeks kelayakhunian. Berikut pernyataan-pernyataan yang dinilai kepentingannya oleh responden:

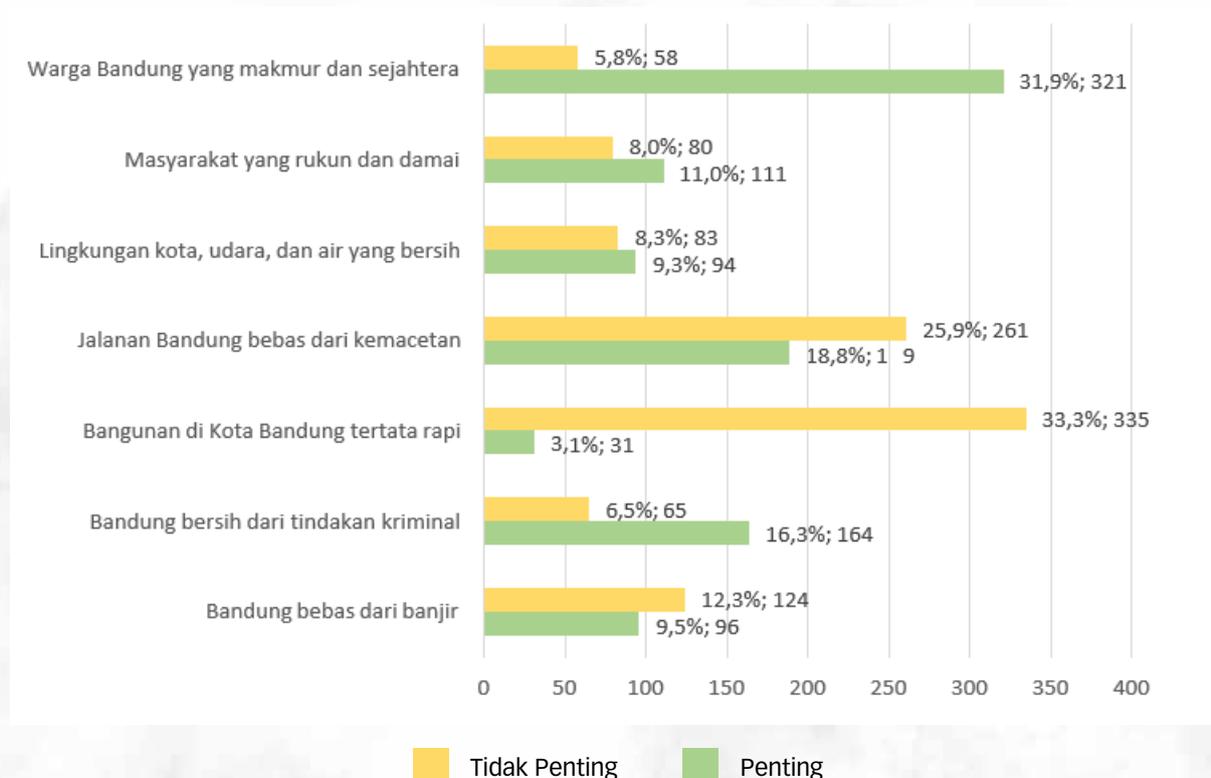
1. warga Bandung yang Makmur dan sejahtera;
2. masyarakat yang rukun dan damai;
3. lingkungan kota, udara, dan air yang bersih;
4. jalanan Bandung bebas dari kemacetan;
5. bangunan di Kota Bandung tertata rapi;
6. Bandung bersih dari tindakan kriminal;
7. Bandung bebas banjir.

Berdasarkan hasil pengolahan data survey, didapatkan bahwa terkait pernyataan yang dianggap paling penting, responden memilih warga Bandung yang makmur dan sejahtera sebanyak 31,9%, yaitu sebanyak 321 responden dari keseluruhan responden. Pernyataan selanjutnya yang dianggap penting adalah jalanan Bandung bebas dari kemacetan dengan jumlah responden yang memilih sebanyak 18,8% atau 189 responden diikuti oleh pernyataan Bandung bersih dari tindakan kriminal sebanyak 16,3% atau 164 responden.

Sedangkan, terkait pemilihan aspek yang dianggap tidak penting, sebanyak 33,3%

responden dari keseluruhan responden, yaitu 335 responden memilih pernyataan bangunan di Kota Bandung tertata rapi sebagai pernyataan yang tidak penting di antara pernyataan yang lainnya. Pernyataan yang dianggap tidak penting selanjutnya adalah pernyataan jalanan Bandung bebas dari kemacetan dengan jumlah responden yang memilih sebanyak 261 responden atau sebesar 25,9% dari total keseluruhan responden kemudian diikuti oleh Bandung bebas banjir sebanyak 12,3% dari total keseluruhan responden, yaitu 124 responden.

Dari pemilihan tersebut, dapat dilihat bahwa aspek yang dianggap penting oleh responden adalah aspek ekonomi yang mana terwujud pada masyarakat yang hidup makmur dan sejahtera dan aspek yang dianggap tidak penting adalah aspek tata ruang yang terwujud pada bangunan yang tertata rapi di Kota Bandung. Yang menarik dari hasil survey yang telah dilakukan adalah Terdapat responden yang menganggap bahwa Kota Bandung bebas dari kemacetan merupakan hal yang penting dan terdapat pula responden yang menganggap hal tersebut tidak penting. Sebanyak 261 responden menganggap Kota Bandung bebas dari kemacetan merupakan hal tidak penting dan sebanyak 189 responden melihat hal tersebut merupakan aspek penting.



Sumber: Data Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2022

Dari total tersebut, dapat dilihat distribusi jumlah responden yang memilih masing-masing pernyataan sebagai pernyataan yang penting dan tidak penting sebagaimana ditunjukkan pada Tabel diatas. Secara umum di masing-masing kecamatan lebih banyak responden yang memilih pernyataan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kota Bandung sebagai pernyataan penting. Walaupun begitu, ditemukan beberapa kecamatan yang menunjukkan pola yang berbeda. Terdapat kecamatan-kecamatan yang memilih pernyataan lain, seperti Kecamatan Antapani, Batununggal, Buahbatu, Cibeunying Kaler, Cicadap, Kiaracondong, Rancasari, Sukajadi, Sukasari, dan Kecamatan Ujungberung, mayoritas

Responden memilih pernyataan bahwa Kota Bandung bebas dari kemacetan sebagai pernyataan yang penting. Kemudian, mayoritas responden di Kecamatan Bojongloa Kaler

lebih banyak memilih pernyataan Kota Bandung yang bebas dari banjir sebagai aspek penting. Situasi tersebut dapat menunjukkan bahwa masing-masing kecamatan memiliki kondisi yang berbeda sehingga preferensi responden terhadap pernyataan yang penting dan tidak penting di masing- masing kecamatan menunjukkan pola yang berbeda.

Populasi dalam studi ini adalah masyarakat Kota Bandung yang tinggal di Kota Bandung. Berdasarkan Kota Bandung dalam Angka Tahun 2022, Kota Bandung memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.452.600 jiwa. Sebagai upaya untuk mendapatkan hasil studi yang mampu mewakili dan menggambarkan populasi Kota Bandung, jumlah sampel diambil dan ditentukan berdasarkan Rumus Slovin. Jumlah sampel ditentukan dengan derajat kepercayaan sebesar 97% dan tingkat kesalahan hanya sebesar 3%.

Berikut Rumus Slovin yang digunakan dalam penentuan sampel pada studi ini:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel (responden) yang diperlukan (jiwa)

N = jumlah populasi (jiwa)

e = sample error (3%)

Dengan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang telah ditentukan, didapatkan bahwa jumlah sampel yang mewakili populasi masyarakat Kota Bandung adalah sebanyak 1006 sampel. Berdasarkan hal tersebut maka kuesioner yang telah disusun akan diberikan kepada 1006 responden dan hasilnya dapat menggambarkan populasi Kota Bandung dengan tingkat kepercayaan sebesar 97%.

Berdasarkan jumlah sampel yang telah ditentukan, banyaknya responden yang dibutuhkan untuk menggambarkan populasi dengan tingkat kepercayaan sebesar 97% adalah sebanyak 1006 responden. Untuk memastikan keterwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kota Bandung, maka dipastikan responden tersebar di seluruh Kecamatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

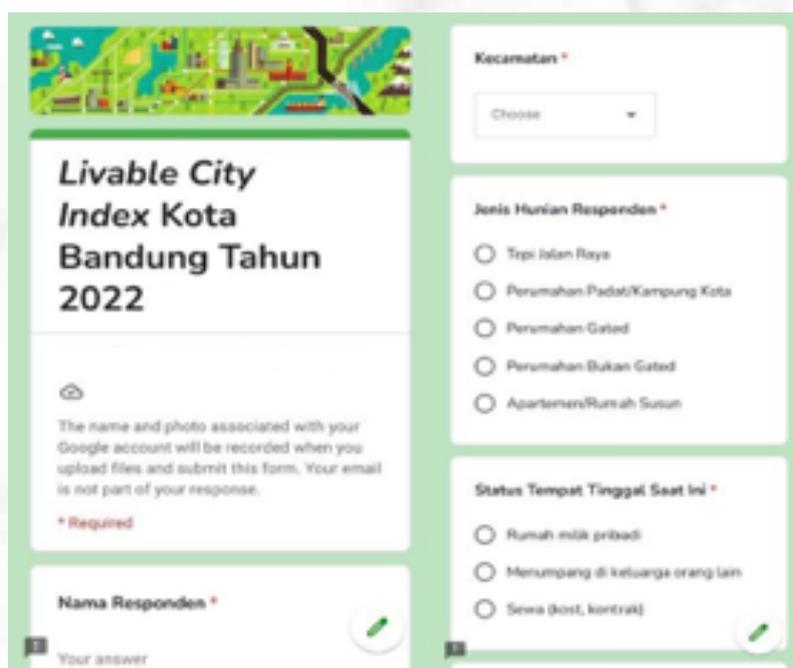
NO	KECAMATAN	JUMLAH RESPONDEN
1	Kecamatan Andir	37
2	Kecamatan Antapani	37
3	Kecamatan Arcamanik	27
4	Kecamatan Astana Anyar	26
5	Kecamatan Babakan Ciparay	62
6	Kecamatan Bandung Kidul	25
7	Kecamatan Bandung Kulon	52
8	Kecamatan Bandung Wetan	12
9	Kecamatan Batununggal	50
10	Kecamatan Bojongloa Kaler	51
11	Kecamatan Bojongloa Kidul	37
12	Kecamatan Buahbatu	38
13	Kecamatan Cibeunying Kaler	25
14	Kecamatan Cibeunying Kidul	49
15	Kecamatan Cibiru	26
16	Kecamatan Cicendo	38
17	Kecamatan Cidadap	24
18	Kecamatan Cinambo	12
19	Kecamatan Coblong	50

20	Kecamatan Gedebage	14
21	Kecamatan Kiaracondong	51
22	Kecamatan Lengkong	25
23	Kecamatan Mandalajati	26
24	Kecamatan Panyileukan	13
25	Kecamatan Rancasari	37
26	Kecamatan Regol	38
27	Kecamatan Sukajadi	38
28	Kecamatan Sukasari	36
29	Kecamatan Sumur Bandung	13
30	Kecamatan Ujungberung	37
TOTAL RESPONDEN		1.006

Selain itu, untuk memastikan bahwa kuesioner diisi oleh penduduk Kota Bandung yang memang mengetahui kondisi Kota Bandung sehingga dianggap dapat terlibat dalam melakukan penilaian dalam studi ini maka ditentukan kriteria dalam penentuan responden, yaitu:

1. memiliki KTP Kota Bandung;
2. tinggal (menempati/memiliki kamar) di persil yang menjadi lokasi sampel;
3. tinggal (bermalam) sehari-hari di Kota Bandung, minimal 5 (lima) hari sepekan; dan
4. bersedia dan sanggup menjawab pertanyaan seputar rumah tangga.

Kuesioner dalam survey penduduk disajikan melalui gawai elektronik berupa *smartphone* atau tablet berbasis android di dalam aplikasi bernama *Google Form*. Aplikasi ini akan mengunduh formulir (kuesioner) yang sebelumnya telah dibuat di dalam *platform* yang diakses melalui website <https://docs.google.com/forms/>. Setiap kali responden diwawancara atau meminta penduduk mengisi kuesioner, responden dapat mengisi langsung jawaban pada *smartphone* atau tablet dengan tampilan kuesioner sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut :



Sumber: Data Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2022

Layanan google form ini mampu membantu dalam menyusun kuesioner secara *online* dengan format kuesioner yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan studi. Selain itu, layanan *google form* ini mampu menyimpan hasil kuesioner yang telah diisi secara real time dan hasil tersebut dapat diakses langsung melalui *spreadsheet*.

Timestamp	Nama Responden	Kecamatan	Jenis Hunian Responder	Status Tempat Tinggal	Luas Bangunan Tempat	Usia Responden (tahun)	Jenis Kelamin
11/2/2022 19:30:25	Aulia	Coblong	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	120	23	Perempuan
11/5/2022 8:53:43	Hary Poenomo	Lengkong	Perumahan Padat/Kamp	Menumpang di keluarga	200	49	Laki-laki
11/5/2022 9:24:50	Erlamarina	Lengkong	Perumahan Padat/Kamp	Menumpang di keluarga	20	38	Perempuan
11/5/2022 9:40:42	Aris Sutisna	Cibeunying Kaler	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	24	52	Laki-laki
11/5/2022 10:19:15	Ujang Suryana	Cicendo	Tepi Jalan Raya	Menumpang di keluarga	350	62	Laki-laki
11/5/2022 10:33:40	Solekha	Cibeunying Kaler	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	36	36	Perempuan
11/5/2022 11:01:11	Taufik Hidayat	Cibeunying Kaler	Tepi Jalan Raya	Rumah milik pribadi	42	39	Laki-laki
11/5/2022 11:29:26	Irfan Budaya	Ujung Berung	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	120	24	Laki-laki
11/5/2022 12:14:24	Santi	Ujung Berung	Perumahan Padat/Kamp	Sewa (kost, kontrak)	200	33	Perempuan
11/5/2022 12:47:33	Partihah	Ujung Berung	Perumahan Gated	Rumah milik pribadi	95	49	Perempuan
11/5/2022 12:49:35	mella crystalline B	Lengkong	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	36	22	Perempuan
11/5/2022 14:01:07	Angga Andriana	Ujung Berung	Perumahan Padat/Kamp	Sewa (kost, kontrak)	90	33	Laki-laki
11/5/2022 14:20:46	yuntha pramesti	Kiaracondong	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	90	35	Perempuan
11/5/2022 16:11:16	Selvi Adrianti	Cicendo	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	30	34	Perempuan
11/5/2022 16:35:58	Randi	Cicendo	Tepi Jalan Raya	Sewa (kost, kontrak)	70	35	Laki-laki
11/5/2022 17:01:43	Mulyana	Cicendo	Perumahan Padat/Kamp	Sewa (kost, kontrak)	20	46	Laki-laki
11/6/2022 9:44:54	Bambang	Antapani	Perumahan Padat/Kamp	Rumah milik pribadi	59	37	Laki-laki
11/6/2022 10:17:34	Marina	Antapani	Perumahan Bukan Gated	Rumah milik pribadi	120	36	Perempuan
11/6/2022 11:42:36	Hardanto	Antapani	Perumahan Padat/Kamp	Sewa (kost, kontrak)	30	48	Laki-laki
11/6/2022 12:07:27	Puja	Antapani	Perumahan Gated	Rumah milik pribadi	110	32	Laki-laki

Sumber: Data Bappelitbang Kota Bandung Tahun 2022

Kuesioner terdiri atas pertanyaan-pertanyaan yang bersifat data objektif maupun subjektif. Data objektif terdiri atas data-data terkait dengan profil umum pribadi responden, profil hunian, dan pola hidup responden. Sementara data subjektif terdiri atas data-data terkait dengan persepsi mengenai kualitas hidup dan penilaian responden terhadap 9 (sembilan) aspek dalam indeks livable city yang diberikan melalui penilaian terhadap pernyataan-pernyataan yang dianggap mewakili aspek-aspek tersebut. Dalam menilai masing-masing aspek tersebut, penilaian disajikan menggunakan skala likert, terdiri dari 4 (empat) nilai dengan makna nilai sebagai berikut:

1. Sangat tidak setuju;
2. Tidak setuju;
3. Setuju;
4. Sangat Setuju.

Berdasarkan analisis skoring Livable City Index yang telah dilakukan, maka dapat dilakukan perhitungan skor Livable City Index Kota Bandung Tahun 2022

Aspek	Skor
Lingkungan	6,60
Transportasi	7,64
Fasilitas Kesehatan	8,64
Fasilitas Pendidikan	7,79
Infrastruktur Utilitas	7,53
Ekonomi	6,96
Keamanan	6,68
Sosial	7,41
Rata-Rata	7,46

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa skor ***Livable City Index Kota Bandung Tahun 2022*** dengan kontribusi nilai tertinggi berasal dari Aspek Fasilitas Kesehatan dan nilai terendah berasal dari Aspek Lingkungan. Hasil analisis baik objektif dan subjektif yang telah dilakukan pada setiap aspek, yaitu aspek tata ruang, lingkungan, transportasi, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, infrastruktur-utilitas, ekonomi, keamanan, dan aspek sosial, didapatkan bahwa **skor *Livable City Index Kota Bandung Tahun 2022* mencapai 7.46.**



Mengacu pada hasil analisis LCI Kota Bandung Tahun 2022, diketahui bahwa skor tertinggi ada pada kesehatan, hal ini karena indikator-indikator dalam Aspek Fasilitas Kesehatan, khususnya indikator objektif telah mencapai skor yang tinggi. Sedangkan skor terendah ada pada aspek Lingkungan. Hal ini disebabkan masih terdapat banyak indikator yang memperoleh skor di bawah 7.

Berdasarkan hasil temuan, diperoleh isu yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Bandung kedepannya dalam konteks membangun kota yang layak huni, khususnya untuk bisa mencapai target penilaian LCI pada Tahun 2023, yaitu:

1. Target pencapaian persentase RTH di Kota Bandung

Saat ini RTH di Kota Bandung mencapai 12.4 % dari target Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2023 sebesar 13.77% pada Tahun 2023. Selain pentingnya menyusun kebijakan dan penganggaran khusus untuk dapat mencapai target, pemerintah juga perlu untuk menyusun basis data yang tepat terkait RTH Privat. Pendataan yang akurat mengenai RTH privat dan RTH publik dapat membantu pemerintah untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Saat ini, pemerintah masih menghadapi kendala dalam perolehan data RTH privat sehingga masih memanfaatkan data potensi.

2. Target pengurangan persentase Kawasan Kumuh

Pemerintah Kota Bandung saat ini telah memiliki berbagai program untuk dapat mengurangi luasan kawasan kumuh di Kota Bandung. Beragam program tersebut terbukti telah berhasil menurunkan luasan kawasan kumuh dan mampu melebihi

target luasan kawasan kumuh Tahun 2021 (Pencapaian 2.79% dari target 2.80%). Meskipun demikian, masih diperlukan usaha yang optimal agar dapat mencapai target akhir di Tahun 2023 sebesar 2.16%.

Pendataan luasan kawasan kumuh per kecamatan juga diperlukan untuk dapat meninjau secara tepat kecamatan yang memerlukan penanganan kawasan kumuh dibandingkan kecamatan lainnya. Informasi ini dapat membantu pemerintah untuk dapat menjawab persoalan penanganan Kawasan kumuh di kecamatan yang memiliki luasan lebih ekstrim dibandingkan kecamatan lainnya.

3. Prevalensi Penyakit (TB dan DBD)

Jumlah kasus Penyakit TB dan DBD di Kota Bandung masih sangat tinggi, mencapai 486 kasus/100.000 penduduk. Meskipun telah berhasil dalam pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan masyarakat dengan penanganan menyeluruh, pemerintah tetap perlu menekankan berbagai program penanggulangan kejadian penyakit TB & DBD untuk dapat mengurangi prevalensi penyakit di Kota Bandung.

4. Akses ke sanitasi dasar untuk mencapai ODF

Saat ini, masih ada 38,42% kelurahan di Kota Bandung yang belum mencapai status ODF (Open defecation free). Selain perlu mempertahankan status kelurahan yang telah mencapai ODF, pemerintah juga perlu membuat kebijakan penganggaran khusus terhadap kelurahan-kelurahan yang belum mencapai status ODF. Pemerintah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan septiktank komunal.

5. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan di Kota Bandung pada Tahun 2022 adalah 4.37%, masih belum mencapai target dalam RPJMD Kota Bandung tahun 2023 yaitu sebesar 3.14%. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bandung dalam menekan angka kemiskinan hingga Tahun 2022 adalah 60.8%

6. Tingkat kriminalitas di kota Bandung cukup tinggi jika dibandingkan dengan berbagai kota lain di Indonesia, saat ini, kasus kriminalitas di Kota Bandung berjumlah 101 kasus/ 100.000 penduduk. Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama antara pemerintah Kota Bandung dengan berbagai pihak terkait dalam menyediakan keamanan dan rasa aman bagi masyarakat di Kota Bandung.

7. Perspektif Masyarakat (dengan skor dibawah 7)

- a. Kerapihan bangunan
- b. Kemacetan
- c. Kenyamanan berjalan di trotoar sekitar lingkungan
- d. Kenyamanan berjalan di jalan raya
- e. Kualitas angkutan umum
- f. Kualitas jalan raya
- g. Kemudahan menanggung biaya hidup
- h. Keamanan dari tindak kejahatan dan kekerasan
- i. Rasa aman berjalan kaki di malam hari

Hasil skoring Index Livable City Kota Bandung Tahun 2022 perlu ditinjau juga berdasarkan kondisi Kota Bandung yang menemui berbagai perubahan serta kendala akibat Pandemi Covid-19. Perubahan RPJMD Kota Bandung 2018-2022 yang kemudian berimplikasi pada adanya pergeseran anggaran dari satu aspek ke aspek lainnya, berimplikasi pada kinerja pencapaian pembangunan. Salah satu dampak dari pandemic covid-19 terhadap pemerintahan Kota Bandung adalah adanya pergeseran anggaran ke kegiatan di sektor kesehatan. Hal ini kemudian mempengaruhi upaya-upaya pencapaian target pembangunan pada sektor-sektor lainnya.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Sasaran-Sasarannya berupa Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”, Nilai AKIP, Opini BPK, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Nilai EPPD. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 5 (lima) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.28

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”,	60	40	66,67	70	96,67	138,10	80	68,33	85,42
2	Nilai AKIP	A	BB	97,49	A	BB	98,70	A	BB	98,75
3	Opini BPK	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,0	3,72	124	3,01	3,20	113	3,25	3,19	98,15
5	Nilai EPPD	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3,4023	N/A	N/A
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			N/A			N/A		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023
		Target	Realisasi	%	Target Akhir Tahun RPJMD
1	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM “Baik”,	90	90	100	100
2	Nilai AKIP	A	A	100	A
3	Opini BPK	WTP	N/A	N/A	WTP
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,30	3,61	109,39	3,35
5	Nilai EPPD	3,4033	N/A	N/A	3,4044
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		N/A			

Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dapat dilihat dari sebanyak 5 (lima) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik” yaitu dari target 90 tercapai sesuai target yaitu 90 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 68,33 mengalami peningkatan sebesar 21,67. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 100 tahun maka capaian kerjanya 90%.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Nilai AKIP” dari target A tercapai sesuai target yaitu A dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu BB. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu A maka capaian kerjanya 100%. Angka capaian ini lebih baik dibandingkan capaian Kota/ Kabupaten di Provinsi Jawa Barat.

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Opini BPK” dari target WTP tercapai sesuai/ tidak sesuai target yaitu dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan/sama/penurunan dibandingkan tahun

2021 yaitu WTP. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,35 maka capaian kerjanya%.

Capaian kinerja indikator ke-4 (empat) “Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)” dari target 3,30 tercapai melebihi target yaitu 3.61 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 109,39%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu 3,19. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,35 maka capaian kerjanya 107,76%.

Capaian kinerja indikator ke-5 (lima) “Nilai EPPD” dari target 3,4033 tercapai/melebihi/kurang target yaitu dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar Realisasi tersebut mengalami peningkatan/penurunan/sama dibandingkan tahun 2021 yaitu Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,4044 maka capaian kerjanya

1. Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, SKM dilakukan melalui 9 Unsur Pelayanan yang terdiri dari:

NO	UNSUR PELAYANAN	KODE UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan	U1
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	U2
3	Waktu Penyelesaian	U3
4	Biaya/ Tarif	U4
5	Produk Spesifik Jenis Pelayanan	U5
6	Kompetensi Pelaksana	U6
7	Perilaku Pelaksana	U7
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	U8
9	Sarana dan Prasarana	U9

Pemerintah Kota Bandung telah melakukan langkah-langkah konkrit berupa:

1. Fasilitasi Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk melakukan SKM setiap semester, sesuai dengan ketentuan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, bahwa survei dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan), atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1 (tahun) sekali.
2. Melakukan upaya penyeragaman metode survey melalui 9 Unsur Pelayanan berdasarkan Permenpan RB No.14 Tahun 2017;
3. Pengumpulan data SKM melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id).

Berdasarkan hasil SKM Semester I Tahun 2022 yang dilakukan melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id) dengan jumlah responden sebanyak 13661 orang, telah menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bandung sebesar 87.101, nilai Mutu Pelayanan “B” dengan Kinerja “BAIK” (data terlampir), sehingga menurut tabel Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017, berada pada Nilai Persepsi ke 3 berada di kisaran Nilai Interval Konversi (NIK) 76,61 – 88,30.

Berdasarkan hasil SKM semester 2 Tahun 2021 yang dilakukan melalui aplikasi e-SKM (skm.bandung.go.id) dengan jumlah responden 17396 Orang, telah menghasilkan nilai

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Bandung sebesar 87.592, nilai mutu pelayanan “B” dengan kinerja “BAIK” (data terlampir), sehingga menurut table nilai persepsi, nilai interval, nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sesuai Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 berada pada nilai persepsi ke 3 di kisaran nilai Interval Konversi (NIK) 76.61-88.30

Tabel 2.29

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tabel 2.30

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Semester 1 Tahun 2022 dan Semester II Tahun 2022

No	PD/INSTANSI/ UNIT KERJA	SKM SEMESTER I TAHUN 2022			SKM SEMESTER II TAHUN 2022			Nilai Rata-Rata Per-tahun
		IKM Unit Pelaya-nan	Mutu Pe-layanan	Kinerja Unit Pe-layanan	IKM Unit Pelaya-nan	Mutu Pe-layanan	Kinerja Unit Pe-layanan	
1	Sekretariat Daerah	548	90.208	A	864	91.302	A	90.755
2	Sekretariat DPRD Kota Bandung	115	86.908	B	53	92.453	A	89.681
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	113	88.225	B	119	85.528	B	86.877
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	256	85.796	B	129	85.939	B	85.868
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	115	85.531	B	385	85.548	B	85.540
6	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	265	85.094	B	268	85.251	B	85.173
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	189	89.844	A	414	92.130	A	90.987
8	Satuan Polisi Pamong Praja	76	86.550	B	150	85.981	B	86.266
9	Dinas Pemuda dan Olah Raga	146	83.752	B	165	84.108	B	83.930
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	44	86.237	B	101	89.219	A	87.728
11	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	193	87.867	B	211	88.652	A	88.260

12	Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	89	85.144	B	242	85.227	B	85.186
13	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	152	86.568	B	218	85.754	B	86.161
14	Dinas Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang	526	87.400	B	360	88.395	A	87.898
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150	90.963	A	418	91.022	A	90.993
16	Dinas Perhubungan	1632	84.057	B	3068	84.404	B	84.231
17	Dinas Tenaga Kerja	128	88.043	B	49	88.889	A	88.466
18	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	150	86.630	B	350	87.024	B	86.827
19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	48	86.632	B	66	87.963	B	87.298
20	Dinas Kesehatan	30	86.204	B	165	86.566	B	86.385
21	Dinas Pendidikan	494	85.099	B	334	85.254	B	85.177
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	755	86.490	B	1763	90.052	A	88.271
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat	267	87.183	B	271	88.018	B	87.601
24	Dinas Lingkungan Hidup	96	93.200	A	214	85.423	B	89.312
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	336	96.999	A	129	97.567	A	97.283
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	138	86.715	B	123	88.189	B	87.452
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1095	88.879	A	1091	90.134	A	89.507
28	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	167	85.546	B	104	85.604	B	85.575
29	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	196	93.240	A	578	93.570	A	93.405



30	Kecamatan Cidadap	60	85.000	B	60	86.019	B	85.510
31	Kecamatan Gedebage	158	83.456	B	411	91.214	A	87.335
32	Kecamatan Cinambo	300	85.407	B	300	86.000	B	85.704
33	Kecamatan Bandung Kidul	96	87.153	B	150	90.778	A	88.966
34	Kecamatan Buah Batu	150	84.537	B	173	84.698	B	84.618
35	Kecamatan Rancasari	37	86.261	B	12	88.426	A	87.344
36	Kecamatan Panyileukan	300	87.176	B	300	86.565	B	86.871
37	Kecamatan Cibiru	338	85.125	B	338	85.429	B	85.277
38	Kecamatan Ujung Berung	150	86.167	B	150	86.222	B	86.195
39	Kecamatan Arcamanik	56	84.177	B	150	84.111	B	84.144
40	Kecamatan Mandalajati	120	85.116	B	120	85.417	B	85.267
41	Kecamatan Antapani	79	86.006	B	79	86.287	B	86.147
42	Kecamatan Bandung Kulon	150	88.648	A	150	88.722	A	88.685
43	Kecamatan Babakan Ciparay	129	94.337	A	194	94.917	A	94.627
44	Kecamatan Sukasari	275	92.131	A	260	91.293	A	91.712
45	Kecamatan Sukajadi	319	84.204	B	228	84.832	B	84.518
46	Kecamatan Cicendo	152	85.928	B	159	85.936	B	85.932
47	Kecamatan Andir	301	88.123	B	165	88.552	A	88.338
48	Kecamatan Coblong	459	92.030	A	74	93.206	A	92.618
49	Kecamatan Bandung Wetan	100	85.722	B	195	86.382	B	86.052
50	Kecamatan Sumur Bandung	100	85.167	B	100	85.583	B	85.375
51	Kecamatan Cibeunying Kaler	223	86.597	B	124	87.724	B	87.161
52	Kecamatan Cibeunying Kidul	76	85.088	B	60	84.861	B	84.975
53	Kecamatan Kiaracondong	164	85.078	B	170	85.180	B	85.129
54	Kecamatan Batununggal	21	85.317	B	31	86.111	B	85.714
55	Kecamatan Lengkong	70	85.357	B	90	85.833	B	85.595
56	Kecamatan Regol	166	84.772	B	138	85.829	B	85.301

57	Kecamatan Astanaanyar	53	85.063	B	51	87.473	B	86.268
58	Kecamatan Bojongloa Kaler	300	85.657	B	300	86.509	B	86.083
59	Kecamatan Bojongloa Kidul	150	85.315	B	150	85.481	B	85.398
60	Inspektorat Kota Bandung	100	94.944	A	112	84.747	B	89.846
Kota Bandung		13661	87.101	B	17396	87.592	B	87.347

Sumber: Data Bagian Organisasi Setda Kota Bandung

Pengukuran IKM sesuai RPJMD untuk tahun 2022 yaitu persentase Perangkat Daerah/Instansi dengan Nilai Indeks Kepuasan “Baik” ditargetkan sebanyak 90% dengan indeks peayanan public perangkat daerah kategori baik (minimal 85) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah/Instansi. Sedangkan berdasarkan data IKM Semester I tahun 2022 baru mencapai 88.33% Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 yaitu 53 dari 60 Perangkat Daerah sehingga tidak mencapai target yaitu sebesar 98%.

Pengukuran IKM sesuai RPJMD untuk tahun 2022 yaitu persentase Perangkat Daerah/Instansi dengan Nilai Indeks Kepuasan “Baik” ditargetkan sebanyak 90% dengan indeks peayanan public perangkat daerah kategori baik (minimal 85) dari jumlah keseluruhan Perangkat Daerah/Instansi. Sedangkan berdasarkan data IKM Semester II tahun 2022 sudah mencapai 90% Perangkat Daerah/Instansi dengan nilai di atas 85 yaitu 54 dari 60 Perangkat Daerah sehingga sudah mencapai target yaitu sebesar 100%. Secara riil jumlah Perangkat Daerah/Instansi yang memperoleh nilai IKM ≥ 85 pada semester II tahun ini meningkat sebanyak 1 Perangkat Daerah, dibanding Semester I tahun 2022 yang 53 menjadi 54 Perangkat Daerah pada Semester II tahun 2022

No	Tahun	Jumlah Perangkat Daerah	Target	Capaian (%)	Capaian Jumlah Perangkat Daerah
1	Semester I Tahun 2022	60	90%	88.33%	53
2	Semester II Tahun 2022	60	90%	90%	54
Peningkatan Jumlah Perangkat Daerah IKM ≥ 85 (Per Semester II Tahun 2022)					1

Dari 60 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan data IKM Semester II tahun 2022, sebanyak 54 Perangkat Daerah sudah mencapai target IKM sesuai RPJMD minimal 85.

Analisa dalam peningklatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai yang paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Nilai dalam kelompok rendah yang harus ditingkatkan yaitu :

1. Unsur pelayanan U3 (waktu penyelesaian), yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan yang melewati batas waktu berdasarkan ketentuan.
2. Unsur pelayanan U8 (sarana dan prasarana), yaitu sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan serta prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses yang belum optimal.

Upaya untuk meningkatkan unsur waktu penyelesaian pelayanan agar lebih tepat waktu dalam penyelesaian layanan serta meningkatkan sarana dan prasarana pada unit

pelayanan masing-masing dengan melakukan monitoring evaluasi serta perbaikan Standar Operasional Procedure.

Nilai dalam kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu :

1. Unsur pelayanan U4 (biaya tarif), yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
2. Unsur pelayanan U9 (Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan), yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang direspon sangat baik dan cepat.

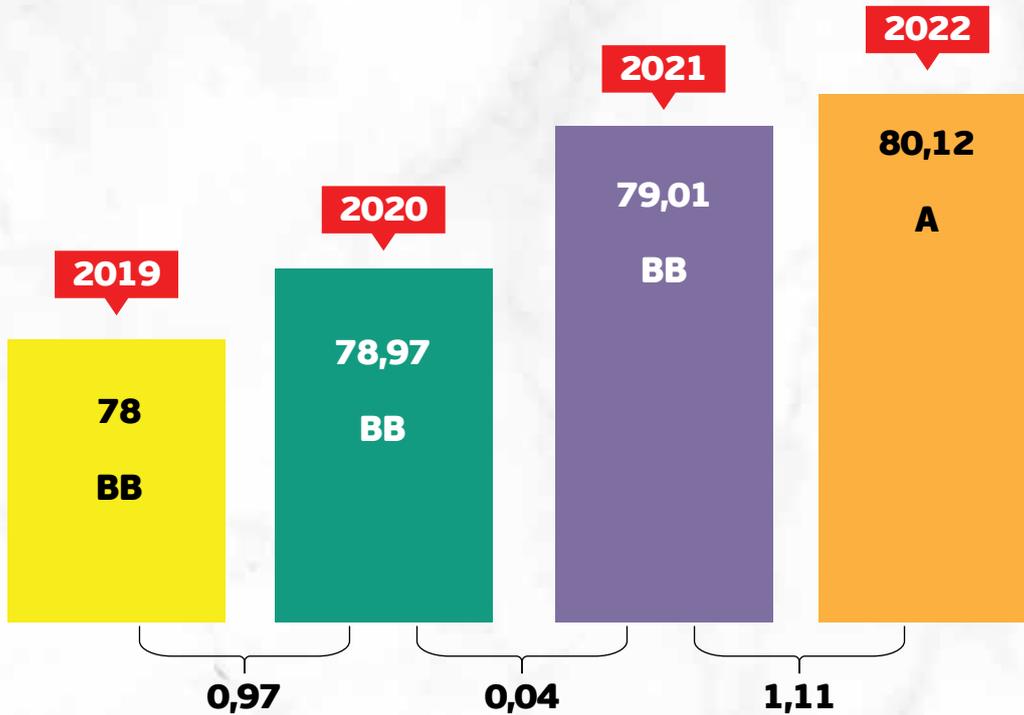
2. Nilai AKIP

Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Nilai Evaluasi AKIP Kota diukur sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

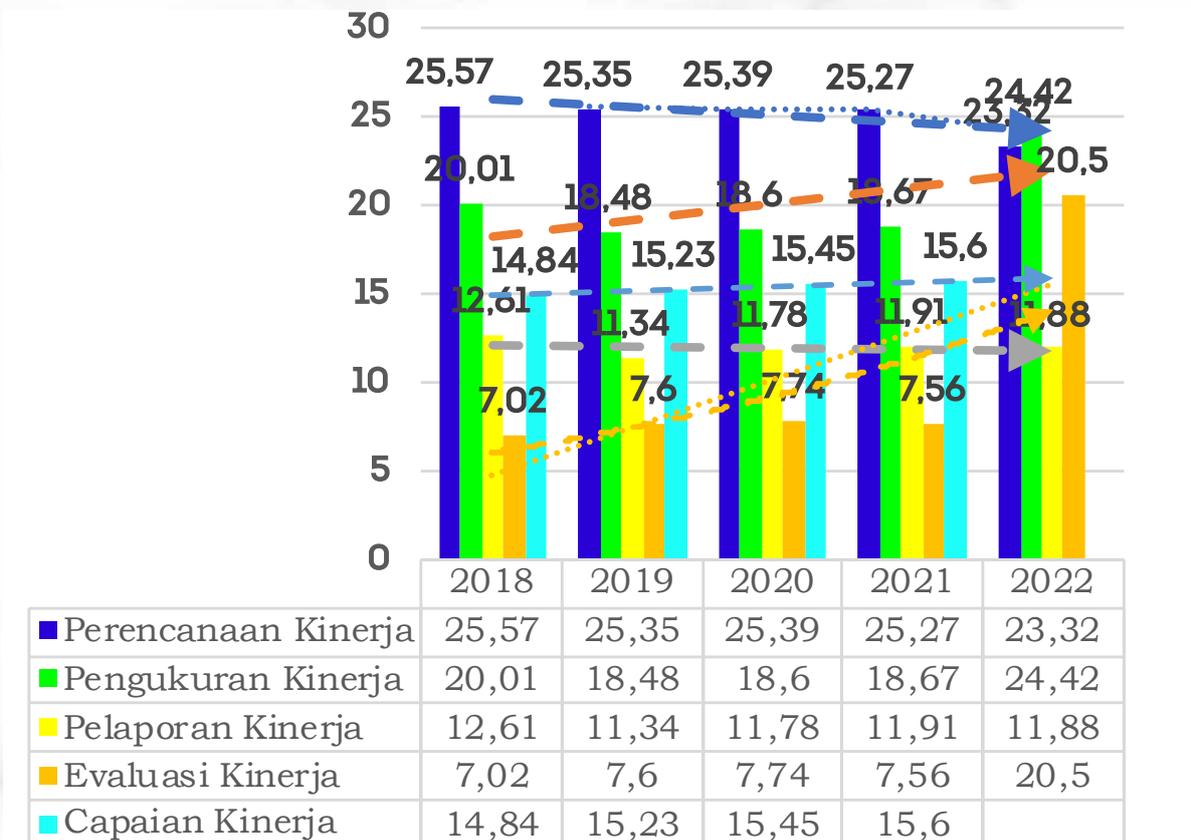


Dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Bandung tahun 2022 adalah 80,11 atau kategori A sesuai target A yang dicanangkan pada RPJMD, awal target RPJMD. Atas capaian tersebut maka kinerja akuntabilitas Kota Bandung tahun 2022 diukur dengan cara Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2022 80,11 dibagi dengan Nilai Terendah Point A (80,01) adalah sesuai target atau 100,12%.

Grafik 2.13
**Capaian Nilai AKIP Pemerintah Kota Bandung
 Tahun 2019-2022**



Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan memperoleh nilai 78,00 atau predikat SAKIP BB, akan tetapi secara agregat nilai mengalami kenaikan pada tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan mendapatkan Kembali SAKIP kategori A.





Pemerintah Kota Bandung saat ini sedang membangun kembali Budaya Kinerja pada seluruh jenjang baik Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah sampai dengan Individu.

Terdapat beberapa catatan penting yang harus diperbaiki dan di implementasikan, yaitu:

1. Secara umum Pemerintah Kota Bandung berhasil mempertahankan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun demikian belum terlihat kemajuan yang signifikan dibandingkan dengan tahun lalu;
2. Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Pemkot Bandung adalah:
 - a) Perencanaan
 - Penetapan target kinerja pada Perjanjian Kinerja belum disesuaikan dengan realisasi capaian tahun sebelumnya.
 - Meskipun secara umum PD telah menggunakan indikator yang SMART, namun masih terdapat rumusan tujuan/sasaran strategis PD yang belum sepenuhnya berorientasi hasil ataupun menjawab isu strategis dari PD tersebut.
 - b) Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja telah dilakukan melalui aplikasi yang mengintegrasikan capaian kinerja organisasi dengan kinerja masing-masing individu. Namun demikian, pada tingkat PD hasilnya belum digunakan sebagai dasar pemberian reward dan punishment.
 - c) Pelaporan Kinerja
 - Laporan Kinerja pada sebagian kecil PD belum cukup menyampaikan informasi yang memadai khususnya tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
 - Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target kinerja lebih rendah dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja level Kota.
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya digunakan sebagai pemberian reward dan punishment;
- Evaluasi akuntabilitas kinerja belum terimplementasi secara maksimal di level PD.

Berdasarkan data di atas, hasil evaluasi SAKIP Kota Bandung tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan. Adapun dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja Kota Bandung melaksanakan beberapa rekomendasi sesuai Surat Kementerian PAN-RB Nomor : B/990/AA.05/2022 Hal : Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022, Tanggal 06 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

1. Memastikan perencanaan yang sesuai dengan kinerja organisasi dan tertuang dalam RP-JMD berikutnya dan bisa menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kota Bandung;
2. Terus melakukan penyempurnaan atas indikator-indikator khususnya di level PD yang masih belum sepenuhnya berorientasi hasil, sehingga penjabatan kinerja sampai ke individu semakin selaras;
3. Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja khususnya untuk target-target yang telah tercapai melebihi dari target di tahun berikutnya yang tertuang dalam realisasi kinerja Laporan Kinerja tahun sebelumnya;
4. Mendorong PD untuk dapat secara aktif melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara internal dan mendorong upaya monev secara berkala untuk dapat dijadikan dasar pemberian reward dan punishment di internal PD;
5. Memastikan seluruh pihak yang terkait dengan monitoring dan evaluasi baik katas capaian kinerja, program dan kegiatan serta akuntabilitas kinerja dapat berkolaborasi dengan baik dan keseluruhan komponen monev tersebut dapat dijadikan dasar sebagai pemberian reward dan punishment bagi PD oleh pimpinan;
6. Meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja terutama di level PD dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2024, dan memanfaatkan Laporan Kinerja tersebut untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
7. Menjaga kesinambungan atas budaya kinerja yang telah dibangun dalam upaya mencapai target-target kinerja organisasi dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan Kota Bandung.

Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022

- a. Wali Kota Bandung mencoba membangun kembali Budaya Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dengan aktif melakukan monev secara berkala atas capaian kinerja;
- b. Menyempurnakan cascading kinerja dengan menyusun pohon kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi.
- c. Secara simultan melakukan penyempurnaan perubahan indikator maupun rencana strategis PD berdasarkan pohon kinerja yang telah disempurnakan;
- d. Menyesuaikan Indikator Kinerja Individu dengan sasaran kinerja pegawai yang dijadikan sebagai ukuran keberhasilan masing-masing individu;
- e. Memperbaiki kualitas hasil evaluasi program yang dilakukan oleh Bappelitbang dan dijadikan sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja.

Adapun hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 terdapat perubahan komponen penilaian menjadi 4 komponen, sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Nilai					Keterangan
		Bobot	2019	2020	2021	2022	
1	Perencanaan Kinerja	30	25,35	25,39	25,27	23,32	
2	Pengukuran Kinerja	25	18,48	18,60	18,67	24,42	
3	Pelaporan Kinerja	15	11,34	11,78	11,91	11,88	
4	Evaluasi Internal	10	7,6	7,74	7,56	20,50	
5	Capaian Kinerja	20	15,23	15,45	15,6		
Nilai Hasil Evaluasi		100	78	78,97	79,01	80,12	
Kategori Akuntabilitas Kinerja			BB	BB	BB	A	

Berdasarkan Hasil Penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Evaluator Kementerian PAN-RB yang disampaikan tanggal 6 Desember 2022 pada kegiatan Acara Penganugerahan Bersama Pelayanan Publik dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Hotel Bidakara Jakarta, maka dalam rangka melembagakan Budaya Kinerja dan peningkatan kualitas pemanfaatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kota Bandung, Sekretaris Daerah Kota Bandung menerbitkan Surat Edaran nomor 143-Bagor/2022 terkait Komitmen untuk meningkatkan serta mempertahankan wujud apresiasi dengan capaian nilai SAKIP “A” pada tahun 2023 mengenai hal-hal sebagai berikut :

Berdasarkan hasil rekomendasi atas evaluasi SAKIP Kota Bandung Tahun 2021 tersebut, maka Pemerintah Kota Bandung melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya perbaikan yang sudah dan akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Rekomendasi :

Memastikan bahwa peta proses bisnis menggambarkan proses pencapaian kinerja pada setiap PD. Peta proses bisnis ini selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam perumusan cascading kinerja utama pada setiap PD sampai level individu, untuk memastikan bahwa setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas dalam pencapaian kinerja di masing-masing PD

Tindak Lanjut :

- a. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah dengan mengeluarkan Instruksi Khusus Pimpinan (IKP) Nomor : B/PN.04.04/2694-Bappelitbang/XI/2022 Hal : Instruksi Khusus Pimpinan (IKP) Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah, sebagai bentuk komitmen Bapak Wali Kota Bandung kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah apabila tidak sesuai target yang ditetapkan dalam penyusunan dokumen Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja Makro, Pohon Kinerja Mikro dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah) berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 yang berdampak pada reward and punishment (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) Perangkat Daerah.
- b. Hasil penyusunan Pohon Kinerja Indikator Makro harus dilakukan Assessment dan di Uji Kesesuaiannya (terverifikasi/ tervalidasi oleh Bappelitbang sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah).
- c. Hasil penyusunan Pohon Kinerja Indikator Makro harus dilakukan Assessment dan di Uji Kesesuaiannya (terverifikasi/ tervalidasi oleh Bappelitbang sebagai bahan acuan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah).
- d. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Penyusunan Peta Prose Bisnis Tingkat Kota (Makro) dengan berpedoman pada PermenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 dan PermenPAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 serta RPJMMDP Kota Bandung Tahun 2018-2023.

- e. Rapot Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung akan di Implementasikan pada Tahun 2023 dan akan disampaikan secara umum (Tim Penilai Rapot Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.3067-Bagor/2022).

2. Rekomendasi :

Cascading kinerja agar dibangun berdasarkan pada proses bisnis dalam rangka mencapai berbagai kinerja yang telah dituangkan dalam RPJMD. Dengan demikian, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan mengacu pada cascading kinerja tersebut.

Tindak Lanjut :

- Pemerintah Kota Bandung telah melakukan Verifikasi terhadap IKU Pemerintah Kota Bandung yang tertuang dalam RPJMMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- Hasil penyusunan Cascading Kinerja Perangkat Daerah harus dilakukan Assessment dan di Uji Kesesuaiannya (terverifikasi/ tervalidasi oleh Bappelitbang dan Perangkat Daerah).
- Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan reviu terhadap IKU atau Sasaran Strategis RPJMMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.
- Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Keputusan Wali Kota Bandung Nomor : 061/Kep.2313-Bagor/2022 Tentang Tim Strategis Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022, dengan memetakan IKU sesuai dengan levelnya.

3. Rekomendasi :

Melakukan reviu dan refocusing terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis.

Tindak Lanjut :

Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah dengan mengeluarkan Instruksi Khusus Pimpinan (IKP) Nomor : B/PN.04.04/2694-Bappelitbang/XI/2022 Hal: Instruksi Khusus Pimpinan (IKP) Penjenjangan Kinerja Perangkat Daerah, sebagai bentuk komitmen Bapak Wali Kota Bandung kepada



seluruh Kepala Perangkat Daerah apabila tidak sesuai target yang ditetapkan dalam penyusunan dokumen Penjenjangan Kinerja (Pohon Kinerja Makro, Pohon Kinerja Mikro dan Cascading Kinerja Perangkat Daerah) berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 yang berdampak pada reward and punishment (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) Perangkat Daerah.

4. Rekomendasi :

Mereviu Indikator Kinerja Individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP

Tindak Lanjut :

- a. Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 18 Agustus 2022 melaksanakan Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 terhadap seluruh Sekretaris, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau Kepala Sub Bagian Program dalam rangka meningkatkan komitmen seluruh individu untuk memperjelas peran, hasil dan tanggungjawab ASN dalam pencapaian Indikator Kinerja Individu (IKI) dan sasaran kinerja organisasi.
- b. Pemerintah Kota Bandung pada tanggal 19 Agustus 2022 melaksanakan Workshop PermenPAN-RB Nomor 6 Tahun 2022 terhadap seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan komitmen pimpinan untuk memperjelas peran, hasil dan tanggungjawab ASN dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dan Indikator Kinerja Sasaran Organisasi.

5. Rekomendasi :

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja PD sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama antar PD dan mampu memberikan feedback untuk perbaikan kinerja PD ke depan, serta mendorong seluruh pimpinan PD menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal.

Tindak Lanjut :

- a. Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka meningkatkan kapabilitas evaluator dan Pelaksanaan Evaluasi AKIP TA 2022 sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menghadirkan narasumber dari BPKP Perwakilan Jawa Barat.
- b. Pemerintah Kota Bandung telah menyusun Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- c. Melaporkan hasil verifikasi monitoring dan evaluasi rutin atas Perjanjian Kinerja secara berjenjang dan berkala setiap Triwulan dan Tahunan, dengan tahapan sebagai berikut :
 - Kepala Perangkat Daerah melakukan monev atas capaian Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai yang diperjanjikan pejabat struktural eselon 3,
 - Pejabat Struktural Eselon 3 melakukan monev atas capaian Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai yang diperjanjikan pejabat struktural eselon 4/subkoordinator,
 - Pejabat eselon 4/subkoordinator melakukan monev atas capaian Indikator Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai yang diperjanjikan oleh pejabat pelaksana.

Langkah-langkah sebagaimana diatas, merupakan sebagai upaya meningkatkan

kualitas pembangunan Budaya Kinerja Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Bandung dalam melaksanakan optimalisasi manajemen kinerja dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).



3. Opini BPK

Berdasarkan UU no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan

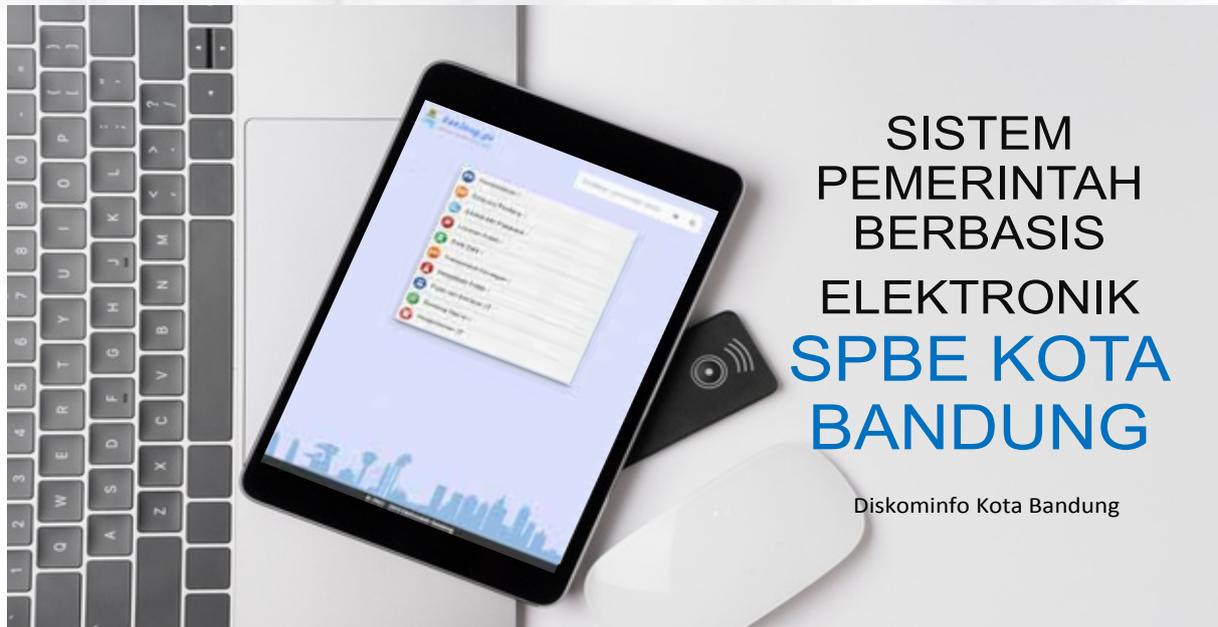
Berdasarkan LHP BPK RI No. 22A/LHP/XVIII.BDG/05/2022 tanggal 18 Mei 2022, Laporan keuangan Kota Bandung TA 2022 menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bandung Tanggal 31 Desember 2021 dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan.

4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hal ini telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat

SPBE, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

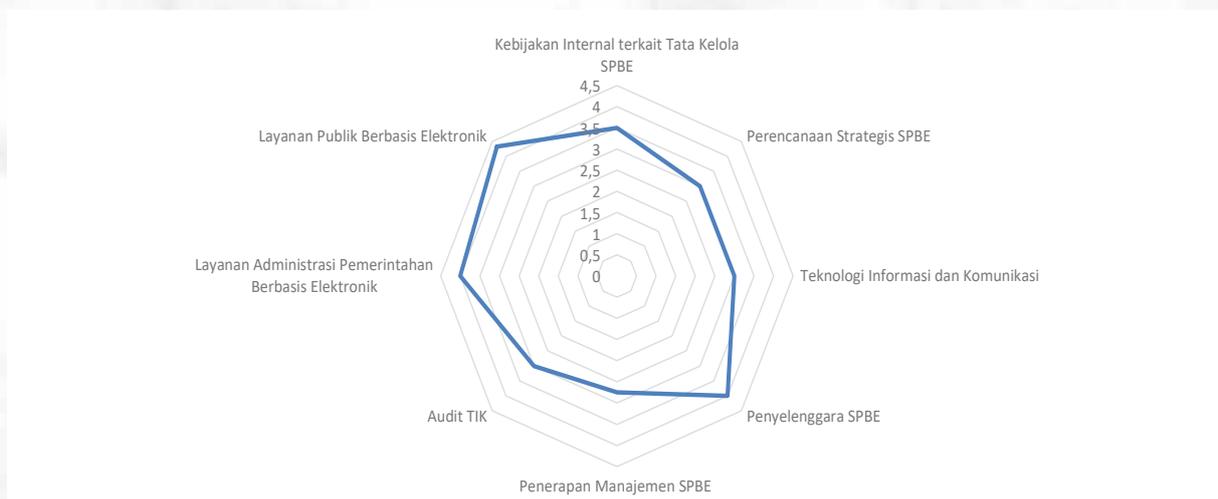


Agar pelaksanaan SPBE dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di setiap Instansi yang ada di Pemerintah Kota Bandung.

Evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kota Bandung.

Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB ini menjadi indikator sejauhmana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, dari hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah.

Grafik 2.14
Hasil Evaluasi SPBE 2022



Nama Form	:	Evaluasi SPBE 2022
Tahun	:	2022
Deskripsi	:	Evaluasi SPBE 2022
Pemerintah Kota Bandung		
K/L/D	:	Pemerintah Kota
Indeks SPBE	:	3,6
Predikat SPBE	:	Sangat Baik

Nilai Indeks

Domain Kebijakan SPBE	:	3,5
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	:	3,5
Domain Tata Kelola SPBE	:	3,2
Perencanaan Strategis SPBE	:	3
Teknologi Informasi dan Komunikasi	:	3
Penyelenggara SPBE	:	4
Domain Manajemen SPBE	:	2,82
Penerapan Manajemen SPBE	:	2,75
Audit TIK	:	3
Domain Layanan SPBE	:	4,13
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	:	4
Layanan Publik Berbasis Elektronik	:	4,33

Rekap Tingkat Kematangan

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	4
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	4
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	3
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	3
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	3
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	3
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5

Berdasarkan target dan realisasi Tahun 2020, 2021 dan 2022, Sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis e-government dengan indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Grafik 2.15
Target dan Realisasi SPBE



Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terealisasi melebihi target yang telah ditentukan yaitu pada Tahun 2020 dari target 3,01 Nilai terealisasi 3,78 Nilai atau 125,59 %, Tahun 2021 dari target 3,25 Nilai terealisasi sebesar 3,19 atau 98,16% sedangkan Tahun 2022 dari target 3,30 Nilai terealisasi 3,60 Nilai atau 109,09%.



Berdasarkan hasil pencapaian dari Tahun 2020, 2021 dan 2022, pada Tahun 2021 mengalami penurunan realisasi hal ini dikarenakan adanya perubahan indikator dalam penilaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian kinerja pada Tahun 2022 ini diantaranya:

1. Adanya konsep smart city sebagai kebijakan pemerintah pusat
2. Adanya komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam peningkatan level kematangan SPBE.
3. Adanya dukungan dari perangkat daerah dalam menggunakan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang menghambat pencapaian kinerja pada Tahun 2022 ini diantaranya:

1. Belum optimalnya integrasi data dan aplikasi

2. Belum optimalnya fungsi dewan smart city
3. Belum optimalnya tingkat kepatuhan pengguna SPBE terhadap regulasi yang berlaku
4. Belum memadainya anggaran SPBE
5. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar perangkat daerah
6. Belum optimalnya kapasitas SDM TIK.
7. Belum maksimalnya tingkat domain kebijakan dan domain manajemen SPBE

Dari analisis faktor pendukung dan penghambat, kami memberikan solusi/rekomendasi, dan tindak lanjut atas faktor penghambat yang mungkin muncul kemudian hari. Solusi/rekomendasi/ tindak lanjut tersebut adalah:

1. Komitmen Perangkat Daerah untuk membantu dalam penyediaan akses ke database agar data dapat di integrasikan dengan aplikasi lainnya
2. Komitmen Perangkat Daerah untuk menyediakan source code sehingga akan mempercepat tim dalam mengintegrasikan aplikasi sebagai salah satu upaya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
3. Komitmen intern perangkat daerah untuk meningkatkan beberapa domain penilaian SPBE terutama domain kebijakan dan domain manajemen SPBE.

5. Nilai EPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan gambaran kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan Kepala Daerah yang berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam kerangka evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah guna menunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



Nilai EPPD diukur dari skor evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan tentang. Nilai EPPD tahun 2020, 2021 dan 2022 terhadap LPPD tahun 2019, 2020 dan 2021 hingga saat ini belum dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Di sisi lain, nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. EKPPD 2019 terhadap LPPD Tahun 2018 yang dituangkan dalam Piagam Penghargaan tanggal 25 April 2020 adalah sebesar 3.4013 dengan Kategori Sangat Tinggi. Capaian ini sesuai dengan target tahun 2020 atau capaian kinerja sebesar 100,00%, dan berada pada kategori Sangat Tinggi bila dibandingkan capaian Tahun 2019 dengan nilai 3.3019.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain pembinaan kinerja perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi berkala dalam memantau kinerja perangkat daerah. Hal ini dimaksudkan agar Perangkat daerah lebih optimal dalam mencapai indikator Standar Pelayanan Minimal, Indikator Kinerja Kunci, dan dokumentasi kinerja kota lainnya serta dalam menyajikan data pendukung kerjanya.

Sasaran 5 : Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota

Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota. Sasaran-Sasarannya berupa Indeks Daya Saing Pariwisata, Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,39	3,41	100,59	3,55	3,29	92,68	3,29	3,29	100
2	Angka Kemiskinan	3,86	3,38		3,66	3,99	90,98	3,49	4,37	74,79
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,39	8,18		8,34	11,19	65,83	11,08	11,46	96,57
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		104,95			83,16			90,45		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,30	3,41	103,33	3,31
2	Angka Kemiskinan	3,32	4,25	71,99	3,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	10,86	9,55		8,22
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		95,79			

Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota dapat dilihat dari sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Indeks Daya Saing Pariwisata” yaitu dari target 3,30 melebihi target yaitu 3,32 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 103,33%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,33 mengalami peningkatan sebesar 3,12. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 3,31 maka capaian kerjanya 100,30%.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Angka Kemiskinan” dari target 3,32 tidak tercapai dari target yang ditetapkan dengan realisasi yaitu 4,25 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 71,99%. Persentase capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 74,79. Bila dibandingkan realisasi tahun 2021 dan 2022 Angka Kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0,12. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 3,14 maka capaian kerjanya 64.65%

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Tingkat Pengangguran Terbuka” dari target tahun 2022 10,86 tercapai melebihi target yaitu 9,55 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 112,06%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu 96,57%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 8,22 maka capaian kerjanya 83,82%

1. Indeks Daya Saing Pariwisata

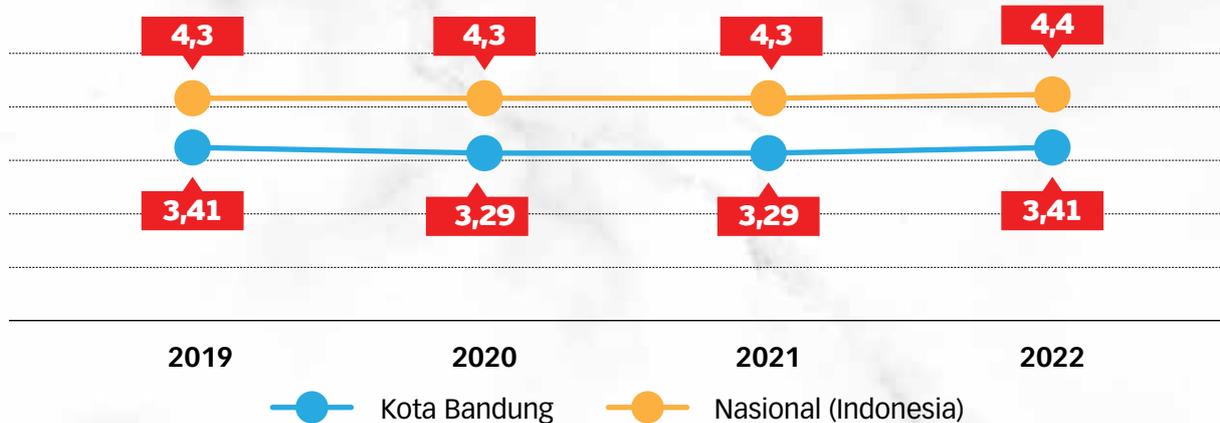
Indeks daya saing pariwisata, Indeks ini telah dikembangkan dalam konteks Program Industri Forum Ekonomi Dunia untuk penerbangan, perjalanan dan pariwisata, sebagai bagian dari Platform untuk Membentuk Masa Depan Mobilitas. Ini dilakukan dalam kolaborasi erat dengan mitra data kami Bloom Consulting, STR Global, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA), Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN), Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), dan World Travel & Tourism Council (WTTC).

Grafik 2.16
Kerangka Kerja Daya Saing Pariwisata



Indeks daya saing pariwisata diukur melalui pengukuran dimensi kerangka kerja yang membentuknya. Indeks didapatkan setelah dilakukan normalisasi dan standarisasi data melalui teknik analisis statistik inferensial.

Grafik 2.17
Capaian Indeks Daya Saing Pariwisata
Tahun 2019-2022



Sumber: Data Disbudpar Kota Bandung Tahun 2022

Indeks Daya Saing Pariwisata merupakan salah satu parameter yang diukur Kementerian Pariwisata untuk menetapkan Indeks Pariwisata Indonesia (IPI). Penyusunan indeks diperoleh melalui survei dan mengacu pada Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF) yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan rentang skala indeks 0-5. Ada 4 (empat) aspek yang diukur untuk menentukan tingkat daya saing pariwisata, yaitu: aspek lingkungan pendukung bisnis, tata kelola, potensi wisata, dan infrastruktur.

Capaian kinerja indeks daya saing pariwisata pada tahun 2022 sebesar 103,33% atau melebihi target yang ditetapkan. Capaian kinerja nyata indeks daya saing pariwisata tahun 2022 adalah 3,41 dari target 3,30. Capaian kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,12 jika dibandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2021 sebesar 3,29. Capaian ini juga belum mampu mencapai kinerja pada tahun 2019 yang bernilai 3,41. Jika dibandingkan target periode akhir RPJMD 2018-2023, capaian pada tahun 2022 adalah 103,02 %.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan program yang mendukung capaian Indeks Daya Saing Kota Bandung. Pada tahun 2022, urusan pariwisata menyelenggarakan 4 program, yaitu :

- 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Program pemasaran pariwisata;
- 3) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual; dan
- 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Implementasi kebijakan strategis pendukung sasaran pertama capaian Misi 3 diupayakan melalui:

1. Peningkatan kualitas destinasi wisata dengan indikator presentase obyek daya tarik wisata yang berkelanjutan yang terealisasi 81,41% dari target 65,79% (capaian kinerja 123,18%) yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:



- a. Peningkatan Kualitas Objek Daya Tarik Wisata dengan realisasi Persentase objek daya tarik wisata yang berkelanjutan sebesar 81,41% melebihi target 65,79% (capaian kinerja 123,74%).
 - b. Peningkatan Pemasaran Pariwisata, dengan realisasi Tingkat Citra Pariwisata Kota Bandung/Brand Awareness Kota Bandung dengan indeks sebesar 3,89 poin lebih target yang ditetapkan 3,61 poin atau mencapai 107,75%). Kualitas destinasi pariwisata Kota Bandung mampu memberikan kepuasan pengalaman berwisata yang memperkuat citra destinasi pariwisata Kota Bandung dan memberikan awareness eksistensi destinasi Kota Bandung. Kondisi ini mendorong loyalitas destinasi pariwisata yang berarti wisatawan Kota Bandung memiliki kecenderungan yang tinggi untuk menjadikan Kota Bandung sebagai prioritas dalam kunjungannya.
2. Meningkatkan ekosistem ekonomi kreatif yang berdaya saing dengan indikator Ruang Kreatif Aktif yang terealisasi sebesar 90,32 dari target 80,65 (capaian kinerja 111,99%) yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan realisasi sebesar 90,32% Ruang Kreatif Aktif dari target sebesar 80,65% atau mencapai 111,99%. Minat masyarakat terutama pelaku ekonomi kreatif pemula tinggi terhadap program aktivasi ruang kreatif (co-working space). Selain itu, modul pengembangan pelaku ekraf pemula yang disusun sebelum pelatihan dan pendampingan membantu pelaksanaan aktivasi di lapangan.
 - b. Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan realisasi persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tersertifikasi profesi sebesar 22,12% dari target sebesar 14,01% atau mencapai 157,88,83%. Pasca pandemi Covid 19 banyak SDM Parekraf mengejar penguatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi maupun melalui sertifikasi HKI.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja tahun 2022, terdapat beberapa faktor yang mendorong capaian yaitu:



1. Pencapaian vaksinasi di Kota Bandung membantu memulihkan kepercayaan wisatawan untuk berwisata di Kota Bandung.
2. Lingkungan bisnis pariwisata membantu mendorong capaian kinerja dengan banyaknya lingkungan kerja yang mulai mengadopsi program berkelanjutan dan CHSE.
3. Ketersediaan SDM yang terhadap kebutuhan pasar mencukupi dan upaya peningkatan kompetensi SDM pariwisata sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Ketersediaan bandara internasional mendukung Kota Bandung yang lebih mudah diakses.
5. Infrastruktur amenities yang lengkap dan menarik wisatawan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yang justru menjadi faktor penghambat peningkatan daya saing pariwisata di Kota Bandung, yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat keamanan menurun dengan banyaknya kasus kriminal di tempat wisata.
2. Ketersediaan objek wisata buatan dan alam minim.

Berdasarkan identifikasi faktor-faktor tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemkot Bandung untuk mengatasi faktor tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan berkolaborasi dengan pihak berwenang untuk melakukan kampanye dan pengamanan di lokasi wisata yang rawan terhadap tindak pelanggaran kriminal. Sementara Disbudpar dan Satpol PP dapat berkolaborasi dengan program pengamanan lokasi wisata dengan memperbanyak sosialisasi dan patroli secara berkala.
2. Mengkampanyekan Bandung Soméah untuk membangun keterbukaan terhadap turis asing. Sementara terkait akses akan sangat bergantung situasi pandemi.
3. Mengembangkan destinasi wisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif yang berbasis pariwisata berkelanjutan untuk memberikan diferensiasi dan diversifikasi produk wisata. Selain itu, Pemkot perlu berbenah pada sektor destinasi wisata perkotaan dengan memperbaiki tata kota, mengatasi kemacetan, permasalahan lingkungan, serta menggeser pola pembangunan destinasi yang memegang prinsip berkelanjutan
4. Memperketat penerapan protokol kesehatan di sektor usaha pariwisata serta terus mengkampanyekan pariwisata aman di seluruh kanal media.

Dalam rangka pencapaian target kinerja, Pemerintah Kota Bandung menyelenggarakan program yang mendukung capaian indeks daya saing Kota Bandung. Pada tahun 2022, urusan pariwisata menyelenggarakan 4 program, yaitu :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; 2.
2. Program pemasaran pariwisata; 3.
3. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Angka Kemiskinan

Berdasarkan Permensos Nomor 146 Tahun 2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu bahwa terdapat beberapa kriteria seseorang dinyatakan sebagai penduduk miskin atau tidak mampu, yaitu:

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam setahun untuk setiap anggota rumah tangga;
5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
6. Mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester;
7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran
10. Luas lantai rumah kecil (kurang dari 8 m²/orang); dan
11. Mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

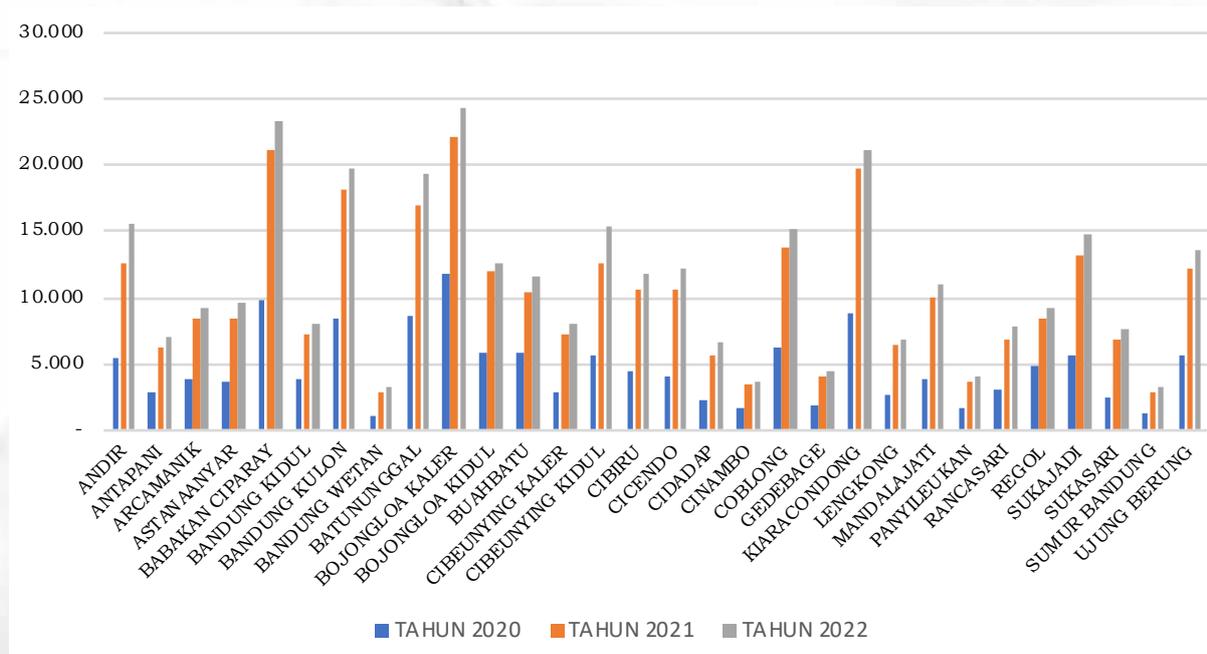
Apabila mengacu pada kriteria fakir miskin di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan fakir miskin bersifat multisektor yang perlu melibatkan berbagai dinas dan lembaga terkait pada bidang ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Tabel 2.1
Pengembangan Ekonomi Keluarga Miskin



Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Grafik 2.18
Rekapitulasi DTKS (KK) Per Kecamatan
Tahun 2020-2022



Instrumen Atau Cara Pengukuran Angka Kemiskinan

I. Penduduk Miskin

Konsep :

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

II. Garis Kemiskinan (GK)

Kriteria warga yang berada di bawah garis kemiskinan pada Tahun 2021 di Kota Bandung ialah warga dengan pendapatan maks. Rp. 515.396,00 per kapita per bulan. (BPS, 2021)

Konsep:

1. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
3. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM

- Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference populaion) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
- Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dsan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

III. Persentase Penduduk Miskin

Konsep :

Head Count Index (HCI-P0), adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Implementasi kebijakan strategis pendukung sasaran kedua capaian Misi 3 diupayakan melalui:

1. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat Miskin, yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:

a. Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin. Salah satu upaya untuk mendekatkan akses pangan terhadap masyarakat kurang mampu yakni dengan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan (beras). Penerima manfaat adalah diprioritaskan warga miskin yang tercatat di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga miskin, DKPP telah meluncurkan inovasi ATM (Anjungan Terima Mandiri) Beras untuk membantu akses pangan bagi warga yang kurang mampu.

Pada tahun 2022, realisasi kinerja indikator Cakupan Masyarakat Miskin yang Pangannya Tercukupi sebesar 140,49% yaitu dari target 1,63% terealisasi 2,29% atau dari target 2.250 KK terealisasi sebanyak 3.149 KK dari jumlah penduduk miskin data DTKS Kota Bandung tahun 2019 sebanyak 137.600 KK.

Jumlah ATM Beras dari tahun 2018 sampai dengan 2022 sebanyak 36 unit, dengan cakupan penerima beras 3.149 KK yang tersebar di 30 Kecamatan

b. Meningkatnya Rumah Masyarakat Miskin Layak Huni, dengan capaian kinerja indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 tercapai sebesar 3,96% dari target 3,72%. Jumlah rumah masyarakat miskin layak huni dihitung dari jumlah rumah masyarakat miskin yang layak huni tahun 2021 ditambah realisasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2022. Capaian realisasi perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.114 unit yang terdiri dari 934 unit APBD Kota Bandung, 120 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat dan 60 unit bantuan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Dengan data eksisting jumlah rumah masyarakat miskin layak huni pada tahun 2021 sebanyak 1.679 unit, sehingga total sampai dengan tahun 2022 sebanyak 2.793 unit. Berdasarkan data yang kami peroleh, jumlah rumah masyarakat miskin di Kota Bandung (data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung) adalah sebanyak 70.552 unit sehingga cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin dapat dihitung sebesar 3,96%.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja perbaikan rumah tidak layak huni adalah sinergitas pembiayaan dalam penyediaan rumah layak huni dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah adanya rumah tidak layak huni yang telah berpindah tangan, sehingga tidak dapat memenuhi kelengkapan administrasi kepemilikan.

Tabel 2.32

Rekapitulasi Penerima Bantuan Perbaikan Rutilahu Kota Bandung Tahun 2022

No	Program Usulan/ Sumber Dana	Jumlah Penerima	Jumlah Penerima Masyarakat Miskin (DTKS 2022)
1	Rutilahu/APBD	1.147	869
2	Bencana/APBD	92	65
3	DAK/APBN	-	-
4	BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)/ APBN	72	60
5	Banprov/APBD Provinsi	150	120
TOTAL		1.461	1.114

Sumber: DPKP Kota Bandung

- c. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat, dengan realisasi Cakupan Masyarakat Miskin terlayani kesehatannya yang Memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, dimana masyarakat tersebut mendapatkan Jaminan apabila memerlukan Pelayanan Kesehatan baik Pelayanan Kesehatan Dasar maupun Pelayanan Kesehatan Rujukan. Terdapat beberapa faktor yang mendorong pencapaian kinerja antara lain adanya komitmen/dukungan Anggaran pemerintah daerah, adanya kerjasama/koordinasi lintas sektor atau lintas program serta adanya jejaring komunikasi cepat dan efektif terkait Informasi Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Selain itu juga terdapat dukungan dengan adanya kebijakan dan regulasi mengenai pelaksanaan pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung No 1457 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Untuk Penduduk Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 038 Tahun 2019.
- d. Terwujudnya Pelayanan Pendidikan bagi Masyarakat Miskin, dengan realisasi cakupan masyarakat miskin yang terlayani pendidikannya sebesar 100% yang didukung dengan pemberian bantuan beasiswa kepada 8.076 siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SD dengan realisasi sebesar Rp17.444.160.000 dan 11.662 siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP) SMP dengan realisasi sebesar Rp49.739.625.000.
- e. Terwujudnya Bantuan Sosial, dengan indikator cakupan masyarakat miskin yang memperoleh bantuan sosial terealisasi sebesar 96,81% dari target sebesar 76,82% yang diperoleh dari realisasi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam rangka pengendalian inflasi yang bersumber dari APBN dan APBD Kota Bandung TA. 2022 sebanyak 120.120 KPM dibagi target penerima bantuan sebanyak 124.076 KPM dikali 100%.
- Berkenaan dengan program perlindungan sosial bagi masyarakat di Kota Bandung tahun 2022 telah direalisasikan bantuan berupa uang tunai dan sembako.

Tabel 2.33
Jenis Bantuan Sosial di Kota Bandung
Bagi Masyarakat yang Terdampak Covid 19 Tahun 2022

No	Jenis Bantuan Sosial	Besaran Bantuan (Per KK)	Sumber	Jumlah KPM		Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kriteria	Frekuensi Bantuan
				Target	Realisasi				
1	Bantuan Langsung Tunai dalam rangka pengendalian inflasi	Rp 600.000,-	APBN	108.796	107.268	98,60	64.360.800.000	DTKS	1 kali
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Rp 200.000,-	APBN	64,852	64,852	100	12,970,400,000	DTKS	Setiap Bulan
3	Program Keluarga Harapan	Variatif	APBN	45,280	44,953	99,28	30,938,225,000	DTKS	Setiap Bulan
4	Bantuan Langsung Tunai dalam rangka pengendalian inflasi	Rp450.000,-	APBD	15.280	12.852	84,10	5.783.400.000	DTKS	1 kali

Sumber: Dinsos Kota Bandung

Adapun Bantuan Sosial Reguler yang setiap tahun diterima oleh warga miskin yang terdaftar dalam DTKS yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan bagi 45.280 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Sosial Pangan yang ditargetkan bagi 96.467 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terealisasi sebanyak 81.156 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan sebesar Rp 200.000,00/KPM. Belum meredanya dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 berdampak pada bertambahnya warga miskin pada tahun 2022.

Tabel 2.34
Rekapitulasi Data Warga Yang Tercantum dalam DTKS
Per Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2022

NO	KECAMATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022	
		JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%	JUMLAH KK	%
1	ANDIR	5.458	3,91	12.597	4,14	15.537	4,56
2	ANTAPANI	2.747	1,97	6.318	2,08	7.088	2,08
3	ARCAMANIK	3.830	2,74	8.320	2,73	9.219	2,71
4	ASTANAANYAR	3.614	2,59	8.442	2,77	9.572	2,81
5	BABAKAN CIPARAY	9.760	6,99	21.258	6,98	23.312	6,85
6	BANDUNG KIDUL	3.778	2,70	7.274	2,39	7.944	2,33
7	BANDUNG KULON	8.499	6,08	18.222	5,98	19.769	5,81
8	BANDUNG WETAN	1.014	0,73	2.854	0,94	3.276	0,96
9	BATUNUNGGAL	8.683	6,21	17.059	5,60	19.306	5,67
10	BOJONGLOA KALER	11.758	8,42	22.210	7,29	24.324	7,15
11	BOJONGLOA KIDUL	5.900	4,22	11.903	3,91	12.637	3,71
12	BUAHBATU	5.785	4,14	10.432	3,43	11.649	3,42
13	CIBEUNYING KALER	2.881	2,06	7.130	2,34	8.044	2,36
14	CIBEUNYING KIDUL	5.727	4,10	12.633	4,15	15.444	4,54
15	CIBIRU	4.433	3,17	10.607	3,48	11.709	3,44
16	CICENDO	4.007	2,87	10.706	3,52	12.184	3,58
17	CIDADAP	2.307	1,65	5.614	1,84	6.613	1,94
18	CINAMBO	1.551	1,11	3.404	1,12	3.617	1,06
19	COBLONG	6.306	4,51	13.701	4,50	15.221	4,47

20	GEDEBAGE	1.819	1,30	3.947	1,30	4.431	1,30
21	KIARACONDONG	8.851	6,33	19.720	6,48	21.253	6,24
22	LENGKONG	2.697	1,93	6.359	2,09	6.919	2,03
23	MANDALAJATI	3.931	2,81	9.911	3,26	11.032	3,24
24	PANYILEUKAN	1.631	1,17	3.657	1,20	4.120	1,21
25	RANCASARI	3.124	2,24	6.801	2,23	7.721	2,27
26	REGOL	4.764	3,41	8.348	2,74	9.303	2,73
27	SUKAJADI	5.543	3,97	13.162	4,32	14.783	4,34
28	SUKASARI	2.533	1,81	6.885	2,26	7.543	2,22
29	SUMUR BANDUNG	1.209	0,87	2.853	0,94	3.193	0,94
30	UJUNG BERUNG	5.581	3,99	12.141	3,99	13.651	4,01
JUMLAH		139.721	100	304.468	100	340.414	100

Sumber: DTKS Tahun 2020 – 2022

Faktor Pendukung

Walaupun target penurunan angka kemiskinan Tahun 2022 di Kota Bandung tidak dapat tercapai, namun demikian jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kota Bandung mengalami penurunan sebesar 0,12 poin dikarenakan adanya pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Bandung yang terselenggara dengan baik. Hal ini dikarenakan komitmen dan dukungan pimpinan daerah serta lembaga legislatif dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat miskin di Kota Bandung. Selain itu, kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu kunci suksesnya program penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah.

Faktor Penghambat

Salah satu faktor yang dapat menghambat ketercapaian target angka kemiskinan ialah pengeluaran per kapita yang masih rendah. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan realisasi program bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI. seperti BPNT dan PKH.

Solusi

Dalam upaya mengurangi beban penduduk miskin di Kota Bandung, maka pemerintah baik pusat maupun daerah melaksanakan program Bantuan Sosial non-reguler bagi warga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penduduk yang terdampak yang belum terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Berikut kami sajikan data bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah:

Tabel 2.35
Rekapitulasi Bantuan Sosial pada Tahun 2022

No	Jenis Bantuan Sosial	Besaran Bantuan (Per KK)	Sumber	Jumlah KPM		Capaian (%)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kriteria	Frekuensi Bantuan
				Target	Realisasi				
1	Bantuan Langsung Tunai Inflasi BBM	Rp150,000	APBD Kota	15.280	13.002	85,09	5.851.800.000	DTKS	3 kali
2	Bantuan Pangan Non Tunai	Rp200,000	APBN	95.940	89.349	93,13	1.786.980.000	DTKS	Setiap Bulan
3	Program Keluarga Harapan	Variatif	APBN	49.756	49.084	98,65	34.145.050.000	Penerima PKH	Setiap Bulan

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2022

Adapun Bantuan Sosial Reguler yang setiap tahun diterima oleh warga miskin yang terdaftar dalam DTKS yaitu Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dialokasikan bagi 49.756 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Bantuan Sosial Pangan yang ditargetkan bagi 95.940 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan terealisasi sebanyak 89.349 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan besaran bantuan sebesar Rp. 200.000,- /KPM. Selain Bantuan Sosial Reguler, Pemerintah Kota Bandung memberikan Bantuan Langsung Tunai dalam rangka Pengendalian Inflasi BBM yang dialokasikan bagi 15.280 KPM dengan realisasi 13.002 KPM dengan besaran bantuan Rp 150.000,- / KPM sebanyak 3 (tiga) kali selama Tahun 2022.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Jawa Barat. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 2.067,9 ribu orang, naik sebanyak 17,5 ribu orang jika dibandingkan Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 1.435,6 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 632,3 ribu orang.

Komposisi angkatan kerja pada Agustus 2022 terdiri dari 1.298,5 ribu orang penduduk yang bekerja dan 137,1 ribu orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 96,5 ribu orang. Penduduk bekerja naik sebanyak 112,9 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 16,4 ribu orang.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 9,55 persen. Hal ini berartidari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,91 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 (11,46 persen).

Karakteristik Pengangguran	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Perubahan Ags 2020-Ags 2021	Perubahan Ags 2021-Ags 2022
	Persen	Persen	Persen	Persen Poin	Persen Poin
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	11,19	11,46	9,55	0,27	-1,91
TPT Menurut Jenis Kelamin					
Laki-Laki	11,33	11,75	11,16	0,42	-0,59
Perempuan	10,95	11,00	6,95	0,05	-4,05

Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 11,16 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,95 persen. TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,59 persen poin dan 4,05 persen poin jika dibandingkan Agustus 2021.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibandingkan Agustus 2021. TPAK pada Agustus 2022 sebesar 66,15 persen, naik 1,20 persen poin dibandingkan Agustus 2021. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kondisi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung pada

tahun 2022 sebesar 9,55 %, dari target 10,86 % capaian kinerja 112,06 %. Artinya Tingkat pengaguran terbuka mengalami penurunan sebesar 1,91 poin atau 0,16 % dari Tahun 2021. Mampunya menekan jumlah pengaguran atau menurunnya Tingkat Pengaguran Terbuka (TPT) Tahun 2022.

Keadaan Ketenagakerjaan di Kota Bandung dapat dilihat , sebagai berikut :

- a. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.435,6 ribu orang, naik 17,5 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 4,11 persen poin dari 65,31 persen menjadi 69,42 persen.
- b. Penduduk yang bekerja sebanyak 1.298,5 ribu orang, naik sebanyak 112,9 ribu orang dari Agustus 2021. Sektor lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor lapangan usaha jasa-jasa (61,16 ribu orang) diikuti sektor lapangan usaha industri (54,61 ribu orang). Sedangkan sektor lapangan usaha pertanian mengalami penurunan, dengan penurunan sebesar 2,85 ribu orang.
- c. Sebanyak 766.754 orang (59,05 persen) bekerja pada kegiatan formal, naik sebanyak 81.711 orang jika dibandingkan Agustus 2021.
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 9,55 persen, turun sebesar 1,91 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 11,56 persen.
- e. Masih terdapat 99.634 orang (4,82 persen) penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19. Terdiri dari pengangguran karena Covid-19 (7.723 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19 (10.049 orang), sementara tidak bekerja karena Covid-19 (4.910 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 (76.952 orang).

Formulasi Pengukuran

TPT = (Jumlah Pengangguran / Jumlah Angkatan Kerja) * 100%.

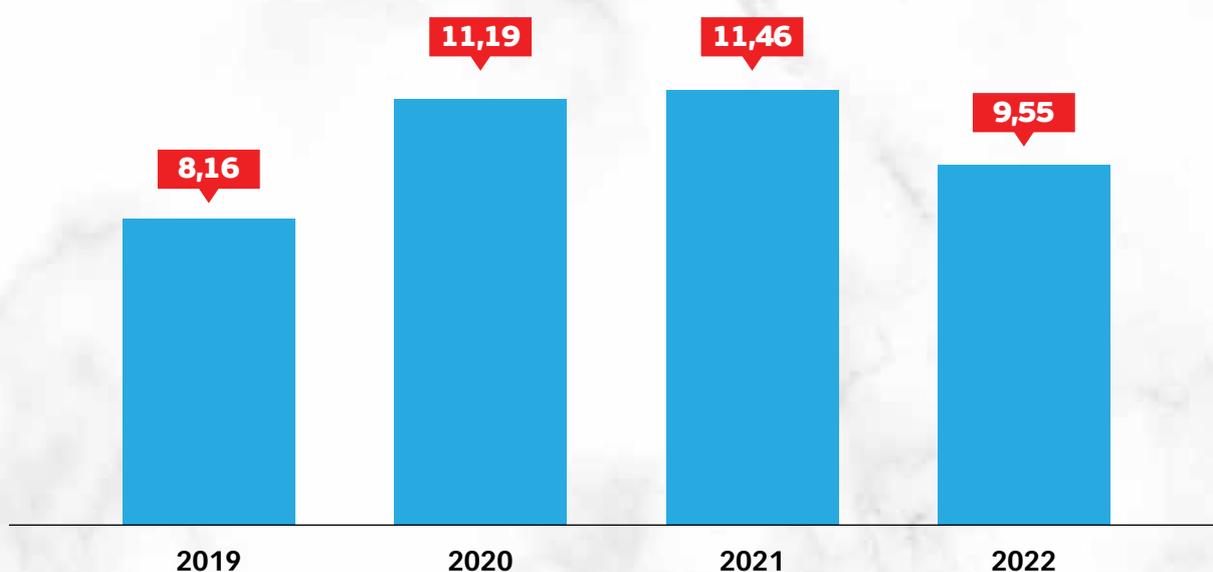
Tabel 2.2
Kegiatan Job Fair



Sejalan dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai terkendali berdampak pada mulai aktifnya aktivitas industry perusahaan-perusahaan mulai membuka kembali lowongan pekerjaannya, begitu juga dengan sektor pariwisata di kota bandung telah membaik aktivitasnya, juga adanya konsentrasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia oleh pemerintah pusat melalui penguatan vokasi, sejalan dengan program pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketenagakerjaan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan meningkatkan calon wirausaha baru.

Grafik 2.19

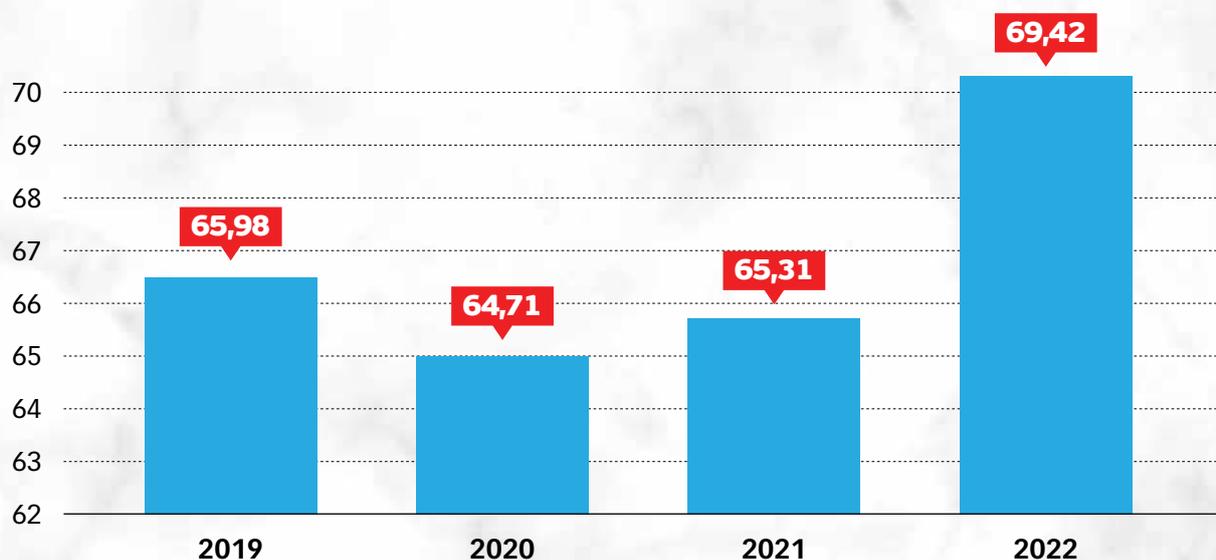
Perbandingan Capaian Kinerja TPT Tahun 2019-2022 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2022

Grafik 2.20

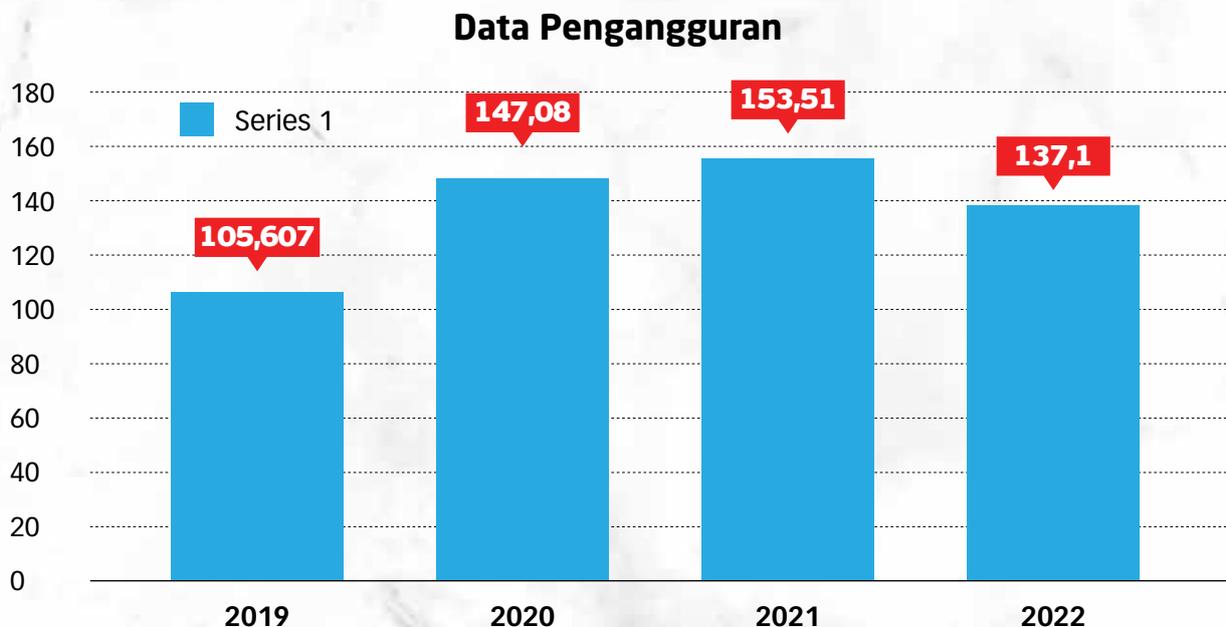
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)



Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2022

TPT Kota Bandung tahun 2020 terjadi peningkatan sebesar 11,19%, sebagai akibat Adanya pandemi Covid-19, jumlah lowongan pekerjaan mengalami penurunan, peningkatan jumlah pengangguran dikarenakan banyak masyarakat yang terdampak COVID-19. Mulai dari yang dirumahkan, pengurangan jam kerja, hingga benar-benar tidak lagi bekerja, pada tahun 2021 terjadi peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka/ TPT sebesar 11,46% lebih tinggi dari target tahun 2021 sebesar 11,08% atau capaian kinerja sebesar 96,57%. karena sektor-sektor usaha belum membuka kembali usahanya secara normal. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 1.91 point atau capaian kinerja 112,06 % . Jumlah angkatan kerja yang berstatus pengangguran adalah 137.10 orang. Jika dibanding dengan tahun 2021 (153.53 orang) maka jumlah pengangguran di Kota Bandung tahun 2022 berkurang 16.43 orang. Sedangkan menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih Tinggi dibandingkan perempuan. TPT laki-laki Kota Bandung tahun 2022 sebesar 11,16%, turun 0,59 point dari 11.75 % di tahun 2021, jumlah pengangguran Kota Bandung dapat terlihat pada grafik di bawah ini;

Grafik 2.21
Perbandingan Capaian Kinerja Pengaguran Tahun 2019-2022

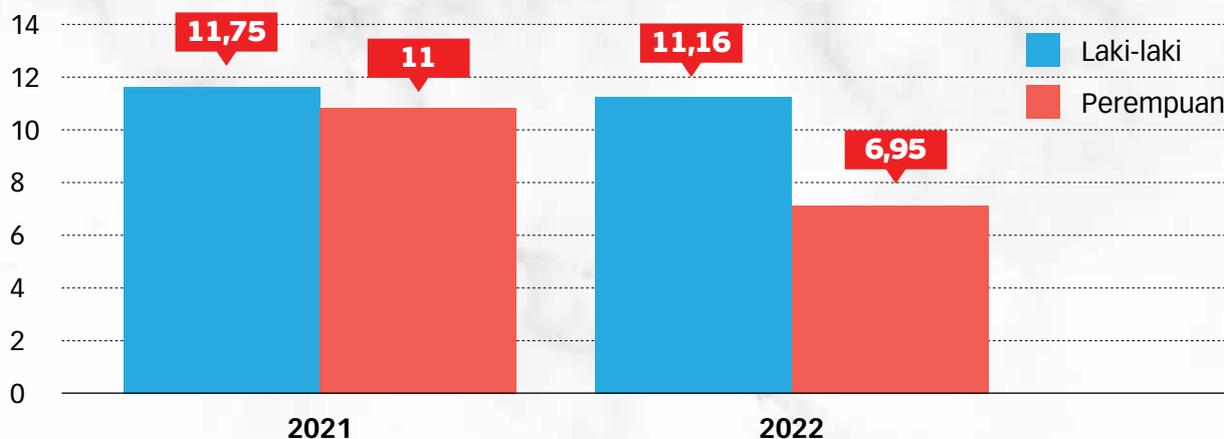


Sumber: Data BPS dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2022

Sedangkan untuk karakteristik pengangguran pada tahun 2022 dan perbandingan dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.22

Perbandingan TPT Tahun 2021-2022 Berdasarkan Jenis Kelamin
TPT Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Data BPS Kota Bandung Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan sinergitas sasaran Angka Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka, dilaksanakan melalui upaya strategi pemberdayaan masyarakat miskin sebagai implementasi amanat Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki tujuan:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. memperkuat peran Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan dapat memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- e. terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu secara bertahap agar dapat menjalani kehidupan yang bermartabat;
- f. tercapainya penurunan jumlah Penduduk Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- g. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Implementasi strategi pemberdayaan masyarakat miskin tersebut didukung melalui kebijakan strategis: 1) peningkatan kualitas ketenagakerjaan; 2) peningkatan kualitas usaha mikro; dan 3) peningkatan keberdayaan masyarakat pangan yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan didukung arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja, dengan realisasi persentase tenaga kerja dan wirausaha yang kompeten sebesar 96,53% (dari jumlah pendaftar pelatihan sebanyak 4.929 orang yang dilatih sebanyak 4.748 orang) melebihi target yang ditetapkan sebesar 60%, yang terdiri dari pelatihan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dari jumlah pendaftar pelatihan 3.409 orang yang dilatih 3.238 orang. Pelatihan ditekankan pada peningkatan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar

- yang dipersyaratkan/ditetapkan di tempat kerja, selesai pelatihan mendapatkan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP.
- b. Meningkatnya Kesempatan Kerja, dengan realisasi jumlah persentase tenaga kerja yang ditempatkan sebesar 59,72% dari target 45,90% dengan demikian capaian kerjanya sebesar 130,10%. Salah satu upaya untuk mendukung kebijakan ini adalah dengan mendorong peningkatan jumlah lowongan kerja baru, dari target sebanyak 10.300 orang terealisasi sebanyak 13.013 orang atau mencapai 126,33%, hal ini terkendala oleh kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang membatasi kegiatan masyarakat khususnya Job Fair sehingga hanya bisa dilaksanakan satu kali.
 - c. Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial, dengan realisasi jumlah kasus yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) sebanyak 33 kasus dibanding dengan kasus yang masuk sebanyak 56 kasus masuk dikali 100% sehingga diperoleh realisasi capaian kinerja 58,92%.
- 2) Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro didukung arah kebijakan operasional sebagai berikut:
- a. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Mikro, dengan realisasi Persentase Usaha Non Formal yang meningkat kemampuan usahanya sebesar 3,76% sesuai target yang ditetapkan dan realisasi Persentase Usaha Mikro yang meningkatkan keberdayaan usahanya sebesar 10,12% sesuai dengan target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mengusulkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebanyak 301.063 pelaku usaha kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, adapun realisasi sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 283.877 pelaku usaha dimana masing-masing mendapatkan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00; sehingga jumlah keseluruhan bantuan yang diterima Kota Bandung sebesar Rp 340.652.400.000,00.
 - b. Meningkatnya Pengembangan Usaha Mikro, dengan realisasi Persentase Usaha Mikro yang omzetnya meningkat sebesar 4,39% sesuai dengan target yang ditetapkan.
- 3) Implementasi kebijakan strategis Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Pangan dengan indikator persentase pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan aktif terealisasi sebesar 90,86% dari target sebesar 75,00% atau mencapai 121,15%. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan (pertanian, peternakan, dan perikanan), yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.

Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan aktif merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha yang sudah memperoleh pemberdayaan (pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses/penguatan kelembagaan) dan masih aktif melakukan usahanya pada saat pendataan. Pada tahun 2022 pelaku usaha binaan di Kota Bandung berjumlah 3.560 orang dan yang aktif sebanyak 3.250 orang, atau persentase pelaku usaha binaan yang aktif mencapai 90,86 %.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha aktif adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan untuk menarik minat menjadi pelaku usaha pertanian dan atau perikanan.
2. Pemberian pelatihan, pembinaan dan pendampingan serta fasilitasi kepada pelaku usaha pertanian dan perikanan dalam hal penerapan teknologi, pemasaran dan rekomendasi ijin usaha untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Adapun dukungan implementasi arah kebijakan operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Pelaku Usaha Pangan, yang didukung dua program dengan indikator:
 - a) Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Perikanan sebesar 7,81% dari target sebesar 7,00%. Dari 960 peserta pelatihan olahan hasil perikanan, 75 orang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil perikanan.
 - b) Persentase Binaan yang menjadi Pelaku Usaha Pangan Olahan Hasil Peternakan sebesar 7,50% dari target sebesar 7,00%. Dari 600 peserta pelatihan Usaha Olahan Hasil Peternakan, 45 orang menjadi pelaku usaha pangan olahan hasil peternakan.
- 2) Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pangan, didukung oleh lima program dengan indikator:
 - a) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perikanan sebesar 49,85% dari target sebesar 45,26% atau mencapai 110,14%. Hasil ini diperoleh dari jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan sebanyak 172 orang dibagi jumlah pembudidaya ikan sebanyak 345 orang dikali 100%. Pemberdayaan masyarakat perikanan meliputi pendidikan dan pelatihan/penyuluhan/pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi serta penguatan kelembagaan bidang perikanan. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan memelihara, membesarkan, membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
 - b) Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian dan Peternakan sebesar 90,70% dari target sebesar 75,00% atau mencapai 120,93%. Hasil ini diperoleh dari jumlah petani dan peternak yang diberikan pelatihan dan/atau difasilitasi sarana pertanian/peternakan sebanyak 2.583 orang dibagi jumlah petani dan peternak sebanyak 2.848 orang dikali 100%. Pemberdayaan petani dan peternak adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dan peternak untuk melaksanakan usaha tani dan ternak yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian dan peternakan, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian dan peternakan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani dan peternak.
Tujuan pemberdayaan masyarakat pertanian dan peternakan :
 - Meningkatnya produksi di sektor pertanian dan peternakan
 - Berkembangnya usaha dibidang pertanian dan peternakan
 - Meningkatnya kesejahteraan petani dan peternak
 - c) Persentase Petani yang Mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sebesar 12,29% dari target 10,00% atau sebesar 122,90%. Hasil ini diperoleh dari jumlah petani yang mengikuti AUTP sebanyak 186 orang dibagi jumlah petani padi sebanyak 1.514 orang dikali 100%. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program proteksi bagi petani ketika mengalami gagal panen akibat perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, serangan hama penyakit/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menjadi penyebab kerugian usaha petani. Peningkatan petani yang mengikuti AUTP dikarenakan sosialisasi yang intensif sehingga tingkat kesadaran semakin tinggi serta perubahan iklim yang tidak pasti menyebabkan petani tidak mau beresiko mengalami kerugian.
 - d) Persentase Kejadian Bencana Pertanian ditindaklanjuti sebesar 100% dari target 100% atau mencapai 100,00%. Realisasi Tahun 2022, persentase kejadian bencana pertanian ditindaklanjuti sebesar 100%, selama tahun 2022 telah terjadi kasus Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) sebanyak 9 kasus dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) atau kekeringan 2 kasus, dan semua kasus tersebut ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi petani.



- e) Persentase Kelompok Tani Minimal Kategori Kelas Lanjut sebesar 13,40% dari target 13,40% atau sebesar 100,00%. Hasil ini diperoleh dari jumlah kelompok tani kategori minimal kelas lanjut sebanyak 26 kelompok (24 kelompok kategori lanjut, 1 kelompok kategori madya, dan 1 kelompok kategori utama) dibagi jumlah kelompok tani sebanyak 194 kelompok dikali 100%.

Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani, mencakup Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional.

Kategori kelas kelompok tani dibagi menjadi 4, yaitu pertama, lanjut, madya, dan utama.

Adapun implementasi kebijakan strategis meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan perekonomian kota lainnya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan investasi, dengan realisasi sebesar Rp.7,788 Triliun dari target sebesar Rp.6,65 Triliun. Nilai investasi ini dihitung berdasarkan data dari LKPM yang diterbitkan Provinsi Jawa Barat dari rekapitulasi (Total) PMDN dan PMA. Adapun dukungan implementasi arah kebijakan operasionalnya sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan Iklim Penanaman Modal, dengan realisasi Rumusan Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal berupa Laporan Koordinasi Pemberian Insentif dan Kemudahan sebanyak 2 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan.
 - b. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal, dari target sebesar Rp.1,65 Triliun dengan realisasi Investasi Baru Promosi Penanaman Modal sebesar Rp.185,58 Triliun (Jumlah Penanaman Modal dari Nomor Induk Berusaha (NIB) Baru yang terbit tahun 2022).
 - c. Meningkatkan Pengendalian Penanaman Modal, dengan realisasi persentase peningkatan ketaatan perusahaan dalam menyampaikan LKPM (Advokasi) sebesar 45% sesuai dengan target yang ditetapkan.

2. Meningkatkan Daya Saing Perdagangan dan Perindustrian, yang didukung implementasi arah kebijakan operasional sebagai berikut:
 - a. Pertumbuhan nilai ekspor dari target sebesar 0,30% terealisasi sebesar 0,35% yang diperoleh dari jumlah ekspor tahun 2022 sebesar US\$323,49 juta dikurangi jumlah ekspor tahun 2021 sebesar US\$322,36 juta kemudian dibagi jumlah ekspor tahun 2021 dan dikali seratus persen. Pada tahun 2022, produk pakaian jadi merupakan komoditi ekspor utama di Kota Bandung dengan nilai US\$160,06 juta. Berdasarkan volume, ekspor produk obat-obatan adalah yang terbesar mencapai 105.755.954,67 kgm dengan nilai US\$12,21 juta.
 - b. Persentase pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing dengan realisasi sebesar 79,56% sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah pelaku usaha yang berdaya saing sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 10.551, termasuk didalamnya sebanyak 500 pelaku usaha yang dibina pada Tahun 2022, sedangkan jumlah pelaku usaha perdagangan adalah sebanyak 13.261 sehingga didapat persentase pelaku usaha perdagangan yang berdaya saing adalah sebesar 75,79%. Persentase pelaku usaha Perdagangan yang berdaya saing adalah pelaku usaha yang memenuhi minimal 3 dari 4 kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki legalitas usaha
 - Omset meningkat
 - Bermitra secara online (marketplace) maupun offline (waralaba, toko swalayan dan mall)
 - Mempunyai standardisasi
 - c. Persentase pelaku industri kecil menengah (IKM) berdaya saing sebesar 51,61% sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah pelaku industri kecil menengah yang berdaya saing sampai dengan Tahun 2022 adalah sebanyak 2.208, sedangkan jumlah pelaku industri kecil menengah adalah sebanyak 4.278 sehingga didapat persentase pelaku industri kecil menengah yang berdaya saing adalah sebesar 51,61%. Persentase pelaku industri kecil menengah yang berdaya saing adalah pelaku IKM yang memenuhi minimal 3 dari 4 kriteria sebagai berikut:
 - Memiliki legalitas usaha
 - Omset meningkat
 - Bermitra secara online (marketplace) maupun offline (waralaba, toko swalayan dan mall)
 - Mempunyai standardisasi
 - d. Tingkat stabilitas harga barang kebutuhan pokok, realisasi persentase tingkat lonjakan harga barang kebutuhan pokok sebesar 3,9% dari target sebesar 15%. Pada Tahun 2022 ini terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi dan cukup lama pada beberapa komoditi yaitu Cabai merah, Minyak Goreng dan Telur ayam. Sehingga di Tahun 2022 ini melahirkan beberapa Kebijakan oleh Kementerian Perdagangan terkait Harga minyak Goreng Curah dan Minyak Goreng Kemasan. Serta Kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pangan Nasional terkait harga acuan Telur ayam dan Ayam Ras. Secara Umum harga barang kebutuhan Pokok pada Tahun 2022 cukup terkendali.
3. Meningkatkan Kualitas Koperasi, dengan indikator persentase koperasi berkualitas yang terealisasi sebesar 9,46% sesuai dengan target yang ditetapkan. Nilai ini diperoleh dari jumlah koperasi berkualitas sesuai kriteria sebanyak 40 koperasi dibagi jumlah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebanyak 423 koperasi dikali 100% sehingga hasilnya sebesar 9,46%. Kriteria koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT, meningkat asset dan omset koperasi (Permendagri 18 Tahun 2020 tentang laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah). Adapun dukungan implementasi arah kebijakan operasionalnya sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Pemberdayaan Usaha Koperasi, dengan realisasi Persentase Koperasi yang meningkat omset sebesar 15,36% melebihi target sebesar 13,47 yang ditetapkan. Hasil ini diperoleh dari jumlah koperasi yang meningkat omsetnya sebanyak 52 koperasi dibagi jumlah koperasi yang melaksanakan RAT sebanyak 423 koperasi dikali 100%.
- b. Meningkatnya Kepatuhan Koperasi, dengan realisasi persentase Koperasi yang mentaati peraturan perundang-undangan sebesar 15,41% melebihi target yang ditetapkan sebesar 15,00%. Hasil ini diperoleh dari jumlah koperasi dengan tingkat kepatuhan termasuk kategori sehat dan cukup sehat sebanyak 105 koperasi dibagi jumlah koperasi aktif sebanyak 735 koperasi dikali 100%, dan realisasi Jumlah KSP/USP yang dilakukan penilaian kesehatan sebesar 100%, dari target 110 Koperasi terealisasi 110 Koperasi.
- c. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi, dengan realisasi Persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat sebesar 65% sesuai dengan target yang ditetapkan.

SDM koperasi yang berkualitas adalah SDM koperasi yang mengikuti diklat meningkat pada aspek knowledge, skill dan attitude dengan alat ukur sebagai berikut:

- Level 1 = evaluasi akhir, untuk mengevaluasi peran narasumber, sarpras, materi, diklat yang dibutuhkan
- Level 2 = pre test dan post test, untuk mengetahui pemahaman materi peserta
- Level 3 = evaluasi pasca diklat, untuk skor penilaian serta masukan mengenai kondisi peserta

Dari target peserta diklat tahun 2021 sebanyak 369 orang (APBD dan DAK,) SDM Koperasi yang meningkat knowledge, skill dan attitude nya sebanyak 221 orang sehingga diperoleh persentase SDM koperasi yang kualitasnya meningkat adalah sebesar 60% .

Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Sasaran-Sasarannya berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Luasan RTH dan Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 3 (tiga) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.36

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	35,35	45,22	127,92	35,47	48,54	136,85	51,63	53,84	104,28
2	Persentase Luasan RTH	12,4	12,22	98,55	12,60	12,25	97,22	12,75	12,40	97,18
3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	98,00	97,99	99,99	98,30	98,32	100,02	98,50	98,50	100
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		108,82			111,36			100,49		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	51,71	55,70	107,72	51,70
2	Persentase Luasan RTH	13,26	12,44	93,82	13,77
3	Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah	98,70	98,70	100	99,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		100,51			

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dapat dilihat dari sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dari target tahun 2022 yaitu 51,71 dengan realisasi melebihi target yaitu 55,70 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 107,72%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 53,84 mengalami peningkatan sebesar 1,86. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 51,70 maka capaian kerjanya 99,98%.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Persentase Luasan RTH” dari target tahun 2022 yaitu 13,26 dengan realisasi 12,44 atau tidak mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 93,82%. Persentase capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yaitu 97,18. Bila dibandingkan realisasi tahun 2021 dan 2022 Persentase Luasan RTH di Kota Bandung mengalami kenaikan sebesar 0,04. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 13,77 maka capaian kerjanya 90,34%

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah” dari target tahun 2022 yaitu 98,70 tercapai sesuai dengan target yaitu 98,70 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu 98,50%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 99,00 maka capaian kerjanya 99,70%

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan menjadi salah satu indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung karena indikator IKLH ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan tahun tertentu.

**Tabel 2.3
Taman Sister City Tahap 1**



Tujuan digunakannya indikator ini adalah sebagai informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagai bentuk pertanggung-jawaban kepada publik terkait pencapaian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

Tabel 2.4
Taman RW 06 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong



Penggunaan IKLH sebagai indikator sasaran RPJMD telah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tanggal 4 April 2021 mengenai Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan, yang merupakan pedoman muatan RPJMD yang berwawasan lingkungan. Sedangkan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan pedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 mengenai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.



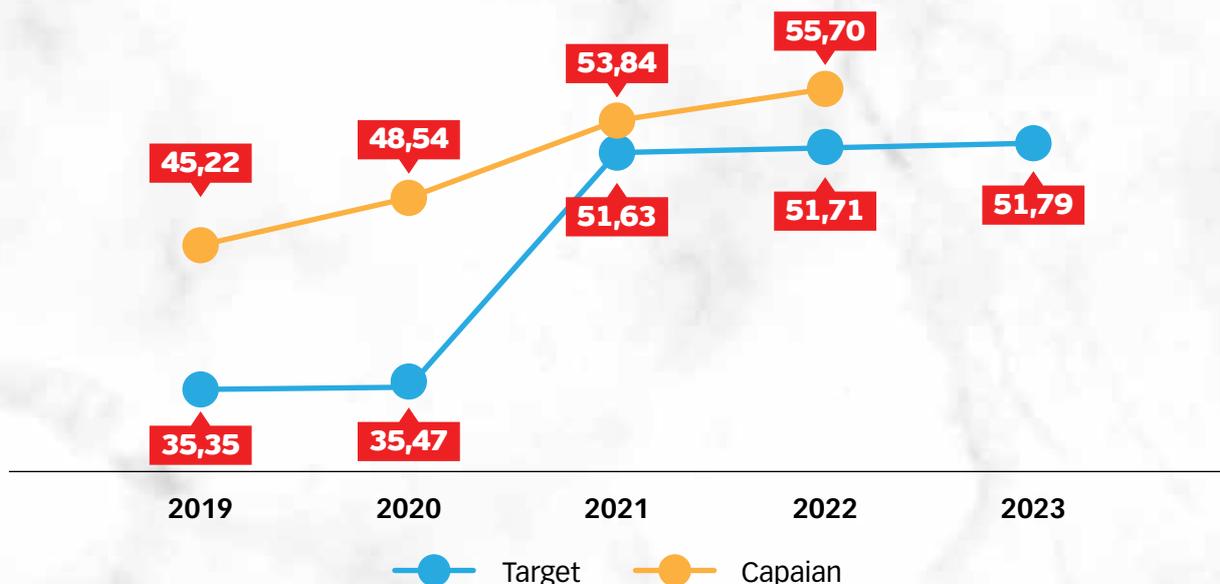
Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2022 adalah sebesar 55,70 poin dari target sebesar 51,71 poin yang direncanakan sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 107,72%, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Tahun 2022 adalah tahun ke 4 RPJMD dan tahun kedua Perubahan RPJMD, capaian kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun ini adalah sebesar 107,72%. Kemudian, apabila nilai capaian pada tahun 2022 ini dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 107,55%.

Capaian kinerja indikator “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” tahun 2022 ini meningkat sebesar 1,86 poin dari tahun 2021. Peningkatan nilai IKLH ini sebanding dengan Kabupaten/Kota/Propinsi lain di Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Refleksi Akhir Tahun 2022 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berlangsung secara luring dan daring, di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022 seperti yang diberitakan di halaman website KLHK pada Senin, 2 Januari 2023 – 08.59 WIB dengan judul “Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia Meningkatkan dalam Lima Tahun Terakhir”. Berdasarkan berita tersebut, peningkatan nilai IKLH secara nasional adalah sebesar 0,97 poin dari tahun sebelumnya, dikarenakan peningkatan nilai Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Perhitungan nilai IKLH Indonesia Tahun 2022 diperoleh dari 7.331 lokasi pemantauan kualitas air, 3.076 lokasi pemantauan kualitas udara, dan 970 lokasi pemantauan kualitas air laut di seluruh Indonesia. Sementara itu, 514 data pemantauan kualitas tutupan lahan diperoleh dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Dalam kerangka DPSIR (Driving force (faktor pendorong), Pressure (tekanan), state (keadaan), impact (dampaknya) dan response), variabel state sudah diukur melalui IKLH. Variabel lainnya yang tak kalah penting adalah respon yang menggambarkan kapasitas daerah untuk memitigasi faktor pendorong, tekanan, dan dampaknya.

Grafik 2.23

Grafik Capaian IKLH Kota Bandung Tahun 2019-2022



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari awal masa RPJMD, dapat dilihat pada grafik di samping ini. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian IKLH naik dari tahun ke tahun yaitu naik sebanyak 3,32 poin pada tahun 2020 dan kemudian naik kembali sebesar 5,30 poin di tahun 2021 dan naik 1,86 poin di tahun 2022.

Tabel 2.5

Pembangunan Sarana Air Bersih di SDN 158 Kel Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong



Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu indikator (1) Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter derajat asam (pH), Oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO₃-N), total fosfat (T-Phosphat) dan fecal coliform; (2) Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO₂ dan NO₂; dan (3) Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan.

Formulasi perhitungan IKLH adalah sebagai berikut :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

Sedangkan untuk menghitung IKA, IKU dan IKL digunakan formulasi sebagai berikut:

$$IKA = \sum_{PIj=0}^{PIj>10} \text{Koefisien} \times \text{Proporsi } PIj$$

$$PIj = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)_M^2 + (Ci/Lij)_R^2}{2}}$$

Keterangan:

- $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}
- Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut:
 - Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 \leq PI_j \leq 1,0$
 - Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j \leq 5,0$
 - Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j \leq 10,0$
 - Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$

$$KU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

$$I_{euNO2} = \frac{NO2_{rata-rata}}{40}$$

$$I_{euSO2} = \frac{SO2_{rata-rata}}{20}$$

$$I_{eu} = \frac{I_{euNO2} + I_{euSO2}}{2}$$

$$IKTL = 100 - \left(\frac{(84,3 - TH) \times (100 - 50)}{(84,3 - 30)} \right)$$

$$TH = \frac{LTH}{LW} \times 100\%$$

Keterangan:

TH : Persentase Tutupan Hutan

LTH : Luas Tutupan ber-Hutan (Untuk RTH, Taman Kehati, Taman Kota, dikali 0,6)

LW : Luas Wilayah

Indeks IKLH ini telah digunakan sebagai indikator di dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan target pencapaian nasional sebesar 69,7 poin pada tahun 2024 dan indikator tersebut menjadi indikator kinerja yang disarankan untuk digunakan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017.

Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari 3 indikator, yaitu kualitas air, kualitas udara dan kualitas lahan, karenanya tercapainya target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak lepas dari pengendalian dan aksi-aksi terhadap air, udara dan lahan yang ada di Kota Bandung.

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	45,22	48,54	53,84	55,70	
Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	41,97	45,78	45,94	48,33	
Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	69,79	61,55	78,75	80,56	
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Poin	29,24	29,24	23,20	22,38	Dilakukan verifikasi data RTH yang dapat masuk ke dalam perhitungan IKL oleh KLHK sehingga terjadi penurunan

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa tercapainya nilai IKLH pada tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya nilai IKA dan IKU. Nilai IKA tertinggi di capai pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa kualitas air terus meningkat, sedangkan nilai IKU mengalami fluktuasi dengan nilai terendah berada pada tahun 2020 yaitu sebesar 61,55 poin. Peningkatan pada nilai IKA dan IKU pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan pada kualitas air sungai dan udara ambien di Kota Bandung.

Perbaikan kualitas air dan udara pada tahun 2022 ini diperkirakan diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah :

- Gaya hidup masyarakat berubah menjadi lebih ramah lingkungan di dalam kehidupan ekonomi dan sosialnya, misalnya pertemuan secara daring, penjualan online, pembelajaran jarak jauh maupun Work From Home. Kegiatan yang dilakukan secara daring ini dapat mengurangi mobilitas penduduk sehingga mengurangi penggunaan kendaraan dan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Karenanya, tingkat pencemaran pun berkurang dan Indeks Kualitas Udara pun meningkat.
- Dilakukannya berbagai upaya perbaikan pada pengelolaan sampah dan perbaikan

sanitasi dasar masyarakat untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan, menyebabkan terjadinya perbaikan pada kualitas air. Pembangunan Septic Tank komunal dalam rangka mencapai target ODF (Open Defecation Free) secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Bandung.

Apabila dianalisis lebih dalam, maka perbaikan ini terjadi dari seluruh komponen lingkungan yaitu sebagai berikut :

I. Kualitas Udara Ambien

Kondisi udara ambien Kota Bandung saat ini berada dalam kondisi baik, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

NO	KATEGORI	LOKASI	NO ₂ , µg/Nm ²	SO ₂ , µg/Nm ²
1	INDUSTRI	Jl. Cimuncang No. 70	8.13	11.2
			7.73	19
2	INDUSTRI	Jl. A. H Nasution No. Km. 7	22.11	17.29
			17.43	12.66
3	PEMUKIMAN	Jl. Pratista Raya Barat X	3.11	9.46
			4.66	10
4	PEMUKIMAN	Jl. Sadang Tengah No. 4-6	11.15	6.32
			10.93	3.37
5	PERKANTORAN	Jl. Sukabumi No. 30	8.61	9
			7.2	13
6	PERKANTORAN	Jl. Wastu Kencana No. 2	20.4	8.27
			16.82	7.4
7	TRANSPORTASI	Jl. Dago Elos II	6.31	12.9
			1.88	12
8	TRANSPORTASI	Jl. Supratman No.73, Cihapit	22.1	12.51
9	TRANSPORTASI	Jl. Leuwi Panjang	34.75	12.04
			40.88	12.32
Rata – rata			14.36	11.10
Baku Mutu			40	20
Indeks dibagi baku mutu			0.36	0.56
Indeks Gabungan			0.4571	
Indeks Kualitas Udara (IKU)			80.16	

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil pengukuran udara ambien masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan, tetapi kadar SO₂ yang paling tinggi ternyata berada di wilayah industri dan paling rendah di pemukiman. Di sisi lain, kadar NO₂ paling tinggi berada di wilayah yang mewakili transportasi dan yang paling rendah berada di pemukiman. Apabila dilihat dari data tersebut terlihat bahwa industri merupakan sumber pencemar udara parameter SO₂ yang paling dominan dan transportasi merupakan penyumbang parameter NO₂ paling tinggi.

Terkait keterwakilan titik pantau, pada tahun 2020 telah dilakukan kajian mengenai kesesuaian penetapan titik pantau ini, sehingga hasil dari pemantauan di atas dianggap dapat mewakili kondisi Kota Bandung secara keseluruhan. Namun, masih diperlukan kajian lanjutan yaitu untuk melihat kualitas udara per kategori lokasi yang lebih detail.

Apabila dianalisis lebih jauh lagi, terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi kualitas udara ambien Kota Bandung, yaitu :

- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak;
- Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak, dan
- Pembakaran Sampah.

a. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Tidak Bergerak

Udara emisi sumber tidak bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sumber-sumber polutan udara yang berada dalam bentuk statis seperti cerobong asap pada instalasi industri atau generator set (genset) yang terpasang secara tetap, yang merupakan hasil pembakaran dari bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang lazim digunakan di Industri diantaranya adalah batubara, solar dan gas.

Kualitas udara hasil pembakaran yang dikeluarkan dari cerobong sangatlah dipengaruhi oleh kinerja instalasi pembakaran dan kualitas bahan bakarnya. Agar udara yang dihasilkan dari cerobong ini tidak mencemari lingkungan, maka kualitasnya harus memenuhi baku mutu yang telah dipersyaratkan. Karenanya, upaya pengawasan terhadap kualitas udara keluaran dari cerobong ini menjadi hal yang sangat penting dilakukan.

Pengawasan, seperti halnya pengawasan kualitas air, dilakukan secara administratif dan secara langsung di lapangan. Pengawasan secara administratif dilakukan melalui Laporan Penerapan Dokumen Lingkungan setiap 6 bulan sekali yang disampaikan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (Laporan Semesteran) ke DLH Kota Bandung. Tidak ada instrumen ijin di dalam pengendalian kualitas udara emisi dari sumber tidak bergerak, tetapi rencana pembuatan instalasi pembakaran serta pembuatan cerobong harus disampaikan sejak penyusunan Dokumen Lingkungan. Sehingga, pemantauan kualitas udara cerobong menjadi salah satu kewajiban pemantauan yang perlu dilaporkan ke DLH Kota Bandung setiap 6 bulan sekali. Kewajiban pemantauan ini tidak hanya meliputi pemantauan kualitas udara emisi cerobong, tetapi juga kualitas udara ambien di sekitar lokasi usaha/kegiatan.

Selain hasil pelaporan, DLH pun melaksanakan uji emisi cerobong sebagai bahan perbandingan atau untuk memverifikasi hasil laporan yang diberikan oleh pelaku usaha. Pada Tahun 2022, telah dilaksanakan pengujian kualitas udara emisi cerobong di 20 lokasi pelaku usaha dan seluruhnya menunjukkan emisi yang masih di bawah baku mutu yang dipersyaratkan.

b. Kualitas Udara Emisi dari Sumber Bergerak

Udara emisi sumber bergerak adalah udara yang dihasilkan dari sistem transportasi yaitu kendaraan bermotor. Meskipun jumlah emisi dari 1 unit kendaraan bermotor tidak besar, tetapi karena jumlah kendaraannya sangat banyak maka emisi dari kendaraan bermotor ini sangat mempengaruhi kualitas udara Kota Bandung.

Untuk mengurangi atau mengendalikan pencemaran udara oleh kendaraan bermotor ini, dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu :

- 1) Memastikan emisi yang dikeluarkan dari kendaraan memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan

Di Kota Bandung, uji emisi digunakan sebagai salah satu syarat di dalam pelaksanaan uji KIR yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Sehingga, emisi dari kendaraan umum dapat dikendalikan. Untuk mengendalikan emisi dari kendaraan pribadi, dilaksanakan uji emisi kendaraan bermotor secara teratur di beberapa lokasi. Pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan layanan bengkel sehingga kendaraan yang gas buangnya melebihi baku mutu, dapat segera

diperbaiki kinerjanya sehingga kualitas gas buangnya menjadi baik kembali. Namun, untuk kendaraan pribadi, uji emisi ini masih bersifat volunteer atau sukarela sehingga masih belum bisa dikatakan efektif di dalam mengendalikan kualitas udara emisi dari sumber bergerak.

Pada Tahun 2022, telah dilaksanakan Uji Emisi Kendaraan Bermotor dan penetapan Kawasan Emisi Bersih, yaitu :

No.	Lokasi	Keterangan
1.	Biofarma	
2.	Gedung Sate	Ditetapkan sebagai Kawasan Emisi Bersih
3.	PT. Dirgantara Indonesia	
4.	Balai Kota Bandung	Ditetapkan sebagai Kawasan Emisi Bersih
5.	Sesko AD	
6.	DPRD Kota Bandung	
7.	PT. Pindad	Ditetapkan sebagai Kawasan Emisi Bersih

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

2) Mengurangi jumlah kendaraan

Untuk mengurangi jumlah kendaraan maka disiapkan sistem transportasi massal yang per unitnya dapat mengangkut jumlah penumpang yang banyak atau dengan menyediakan sarana transportasi tanpa emisi seperti penyediaan fasilitas penyewaan sepeda di sekitaran Kota Bandung. Namun, tantangan utama dari pengurangan jumlah kendaraan ini adalah mengubah kebiasaan masyarakat agar bersedia beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

c. Pembakaran sampah

Meskipun jumlah asap yang dihasilkan dari pembakaran sampah oleh masyarakat jumlahnya sedikit, namun apabila dilakukan berkali-kali di banyak tempat maka akan dapat mencemari kualitas udara ambien Kota Bandung. Hal ini diperparah oleh kondisi Kota Bandung yang berada pada wilayah cekungan yang membuat udara cenderung berkumpul dan terakumulasi sehingga tingkat bahayanya semakin bertambah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Pencemaran udara yang terjadi secara luas, telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim bukan hanya secara lokal, tapi juga pada skala global. Terjadinya kekeringan dan banjir, peningkatan permukaan air laut, bermunculannya berbagai jenis penyakit baik generatif maupun degenaratif dan menurunnya produksi pertanian yang menyebabkan terancamnya ketersediaan pangan, merupakan beberapa akibat yang dirasakan karena adanya perubahan iklim. Pola-pola adaptasi perlu dilakukan untuk bertahan dari akibat-akibat yang ditimbulkan sekaligus melakukan upaya mitigasi untuk bertahan dari bencana yang mungkin terjadi dari adanya perubahan iklim.

Penerapan *ecooffice* dan kampung iklim adalah salah satu cara untuk beradaptasi terhadap dampak dari adanya perubahan iklim. Perkantoran yang menerapkan *ecooffice* dan RW yang telah menjalankan program kampung iklim diyakini dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim, sehingga akibatnya dirasakan tidak terlalu berpengaruh bagi warganya. Karena itu, diharapkan seluruh wilayah di Kota Bandung dapat menerapkan Program Kampung Iklim sehingga lebih siap dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Pada Tahun 2022, terdapat 6 RW yang telah terdaftar sebagai Kampung Iklim, yaitu :

No.	Lokasi Kampung Iklim
1.	RW 12 Maleer, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal
2.	RW 10 Cihaurgeulis, Kelurahan Cihaurgeulis, Kecamatan Cibeunying Kaler
3.	RW 02 Sukamiskin, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Antapani
4.	RW 02 Cipamokolan, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari
5.	RW 02 Jatihandap, Kelurahan Jatihandap, Kecamatan Mandalajati
6.	RW 05 Dago, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong

II. Kualitas Air

Berdasarkan data hasil pengujian pada seluruh titik pantau kualitas air pada tahun 2022 pada periode 1 dan periode 2, didapat data hasil pemantauan sebagai berikut :



Tabel 2.37
Pengujian Titik Pantau Kualitas Air Pemerintah Kota Bandung Tahun 2022

Nama Sungai	Titik Pantau	Degrees, Minutes, Seconds		Alamat Sungai	Semester 1			Semester 2				
		Latitude	Longitude		Nilai IP	Status Mutu Air	(Nilai IP)	Status Mutu Air	(Nilai IP)	Status Mutu Air		
Cikapundung	Hulu	6° 51' 45,021" S	107° 37' 24,491" E	Jl. Dago Bengkok	4.16	Ringan	2.97	Cemar Ringan	3.39	Ringan	2.85	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 55,559" S	107° 36' 26,094" E	Jl. Viaduct	1.34	Ringan			2.48	Ringan		
	Hilir	6° 56' 57,689" S	107° 37' 18,531" E	Jl. Soerkarno Hatta (Dealer TATA MOTOR)	3.4	Ringan	3.92	Cemar Ringan	2.68	Ringan	4.34	Cemar Ringan
Cinambo	Hulu	6° 54' 33,326" S	107° 42' 25,846" E	Jl. Sukailillah	4.38	Ringan			5.34	Sedang		
	Tengah	6° 55' 27,054" S	107° 41' 46,08" E	POM Bensin Perempatan Jl. Rumah Sakit	4.09	Ringan			3.17	Ringan		
	Hilir	6° 57' 51,31" S	107° 42' 16,924" E	Jl. Ranca pancing	3.3	Ringan			4.51	Ringan		
Citepus	Hulu	6° 54' 38,252" S	107° 35' 30,796" E	Jl. Padjadjaran (Toko Citra Percetakan)	3.13	Ringan	2.84	Cemar Ringan	4.45	Ringan	3.19	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 59,459" S	107° 35' 45,096" E	Jl. Kebonjati	2.48	Ringan			1.93	Ringan		
	Hilir	6° 56' 39,57" S	107° 36' 9,115" E	Jl. Pagarsih (Toko Bintang Jaya)	2.92	Ringan			3.2	Ringan		
Cipamokolan	Hulu	6° 53' 35,185" S	107° 39' 38,007" E	Jl. Sasak Batu (Warung Pak Adang)	3.49	Ringan	2.99	Cemar Ringan	3.26	Ringan	2.86	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 51,146" S	107° 39' 40,251" E	Mitra Dago (Jl. Ters. Jakarta)	3.85	Ringan			2.67	Ringan		
	Hilir	6° 57' 17,996" S	107° 40' 42,582" E	Jl. Terusan Derwati (Perum DEMARRAKESH)	1.62	Ringan			2.65	Ringan		
Cibeunying	Hulu	6° 54' 28,827" S	107° 38' 7,195" E	Jl. Citamian	2.87	Ringan	2.89	Cemar Ringan	4.32	Ringan	3.41	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 5,632" S	107° 38' 14,393" E	Jl. Anyer Dalam	3.1	Ringan			3.29	Ringan		
	Hilir	6° 55' 18,22" S	107° 38' 56,72" E	Jl. Babakan Surabaya	2.71	Ringan			2.62	Ringan		
Cibiru	Hulu	6° 54' 37,194" S	107° 43' 25,453" E	Jl. Galumpit (Cilengkrang 1)	3.06	Ringan	3.33	Cemar Ringan	0.92	Memenuhi	1.36	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 27,542" S	107° 42' 37,549" E	Jl. Ters Ujung Berung (PT. Genta Trikanya)	3.18	Ringan			2.48	Ringan		
	Hilir	6° 56' 10,156" S	107° 42' 8,983" E	Jl. Soekarno Hatta (PT. Professindo jaya Inti)	3.76	Ringan			0.67	Memenuhi		
Cibuntu	Hulu	6° 54' 37,111" S	107° 34' 8,611" E	Jl. Nasional III (Bengkel Nippon Motor)	3.29	Ringan	3.34	Cemar Ringan	2.24	Ringan	4.03	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 32,26" S	107° 33' 49,798" E	Jl. Melong Raya (Cijerah)	2.59	Ringan			3.76	Ringan		
	Hilir	6° 56' 22,436" S	107° 33' 29,338" E	Jl. Gempol Sari (PT. Kahatex garment)	4.16	Ringan			6.08	Sedang		
Cicadas	Hulu	6° 54' 18,874" S	107° 38' 22,109" E	Gg. Lemah Neundeut I (Cicadas)	1.97	Ringan	2.89	Cemar Ringan	3.17	Ringan	2.8	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 20,066" S	107° 38' 57,25" E	Jl. Babakan Sari	2.45	Ringan			2.66	Ringan		
	Hilir	6° 56' 30,362" S	107° 39' 9,721" E	Jl. Soekarno Hatta (Cidurian Selatan)	4.25	Ringan			2.57	Ringan		
Cidurian	Hulu	6° 53' 35,82" S	107° 38' 30,595" E	Jl. Cikutra (GUSPUSPAL I)	3.65	Ringan	3.38	Cemar Ringan	2.68	Ringan	2.65	Cemar Ringan
	Tengah	6° 55' 57,417" S	107° 40' 0,304" E	Jl. Ters. Jakarta (Bengkel Motor Honda)	3.23	Ringan			2.61	Ringan		
	Hilir	6° 57' 19,179" S	107° 40' 20,276" E	Jl. Ciwastra	3.27	Ringan			2.52	Ringan		

Nama Sungai	Titik Pantau	Degrees, Minutes, Seconds		Alamat Sungai	Semester 1			Semester 2				
		Latitude	Longitude		Nilai IP	Status Mutu Air	(Nilai IP) Pij	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air	(Nilai IP) Pij	
Ciharalang	Hulu	6° 53' 41,038" S	107° 38' 46,422" E	Jl. Babakan Baru Sukapada (Belakang Kampus Widyatama)	2.86	Ringan	3.57	Cemar Ringan	2.25	Ringan	2.24	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 23,5" S	107° 38' 50,5" E	Jl. PHH Mustofa	4.48	Ringan			3.46	Ringan		
	Hilir	6° 54' 9,299" S	107° 38' 51,621" E	Gg. Bbk H. Tamin	3.36	Ringan			1.01	Ringan		
Cikendal	Hulu	6° 55' 5,44" S	107° 34' 13,89" E	Jl. Raya Cijerah	5.97	Sedang	5.52	Cemar Sedang	1.89	Ringan	3.82	Cemar Ringan
	Tengah	6° 56' 25,691" S	107° 34' 11,771" E	Permukiman Blok Tengah (Gempol sari)	5.22	Sedang			3.09	Ringan		
	Hilir	6° 57' 10,13" S	107° 34' 1,059" E	Belakang SMPN 55	5.36	Sedang			6.49	Sedang		
Cikiley	Hulu	6° 54' 9,221" S	107° 40' 5,704" E	Belakang PT. GRANDTEX	2.47	Ringan	2.64	Cemar Ringan	2.46	Ringan	2.28	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 15,06" S	107° 40' 1,10" E	Jl. A.H. Nasution	2.52	Ringan			2.2	Ringan		
	Hilir	6° 54' 54,266" S	107° 40' 4,584" E	Jl. Cikajang Raya (RM. Talago Biru)	2.92	Ringan			2.17	Ringan		
Ciparumpung	Hulu	6° 53' 38,697" S	107° 39' 20,644" E	Jl. Ciparumpung (MTS-MA Mutazam)	1.91	Ringan	2.84	Cemar Ringan	2.28	Ringan	3.13	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 17,905" S	107° 39' 1,819" E	Jl. Ahmad Yani (Showroom MAORI MOTOR)	2.5	Ringan			2.67	Ringan		
	Hilir	6° 54' 51,734" S	107° 39' 8,355" E	Jl. Purwakarta (Dealer WIJAYA TOYOTA)	4.12	Ringan			4.44	Ringan		
Cikapundung Kolot	Hulu	6° 55' 36,256" S	107° 38' 24,102" E	Jl. Maleer Indah	3.15	Ringan	3.46	Cemar Ringan	2.18	Ringan	2.32	Cemar Ringan
	Tengah	6° 56' 27,817" S	107° 38' 24,422" E	Jl. Binong Jati (Gatot Subroto)	3.25	Ringan			2.31	Ringan		
	Hilir	6° 57' 13,743" S	107° 38' 20,218" E	Curug Ece (Pasar Kordon)	3.97	Ringan			2.47	Ringan		
Cipanjal	Hulu	6° 54' 32,676" S	107° 42' 12,497" E	Jl. Territorial (Gigending)	4.55	Ringan	3.39	Cemar Ringan	2.18	Ringan	2.59	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 44,601" S	107° 41' 29,009" E	Jl. A.H. Nasution (Showroom Sumber Mobil)	2.81	Ringan			2.78	Ringan		
	Hilir	6° 55' 38,136" S	107° 41' 13,872" E	Jl. GedeBage (PT. Tomskin)	2.81	Ringan			2.82	Ringan		
Cisaranten	Hulu	6° 53' 53,774" S	107° 40' 42,287" E	Jl. A.H. Nasution (Toko Bangunan PD. Asgar Jaya)	3.89	Ringan	4.25	Cemar Ringan	2.06	Ringan	1.7	Cemar Ringan
	Tengah	6° 54' 59,834" S	107° 40' 40,933" E	Jl. Cingised Raya (Komplek Pemda)	4.52	Ringan			1.12	Ringan		
	Hilir	6° 55' 44,792" S	107° 40' 35,507" E	Jl. Kali Lio Timur	4.33	Ringan			1.91	Ringan		
Ciateul*	Hulu	6° 55' 7,536" S	107° 36' 2,453" E	Kantor POS Jl. Padjadjaran	4.03	Ringan	4.62	Cemar Ringan	2.18	Ringan	2.33	Cemar Ringan
	Hilir	6° 55' 25,222" S	107° 36' 9,393" E	Jl. Kalipah Apo (Toko Suniaraja Optical)	5.21	Sedang			2.47	Ringan		
Cigondewah*	Hulu	6° 56' 30,178" S	107° 34' 0,367" E	ALFAMART (Jl. Taman Holis Indah)	4.25	Ringan	4.41	Cemar Ringan	2.8	Ringan	3.07	Cemar Ringan
	Hilir	6° 56' 56,63" S	107° 33' 59,19" E	Jl. Cibolerang	4.57	Ringan			3.34	Ringan		

Nama Sungai	Titik Pantau	Degrees, Minutes, Seconds		Alamat Sungai	Semester 1				Semester 2			
		Latitude	Longitude		Nilai IP	Status Mutu Air	(Nilai IP) Pij	Status Mutu Air	Nilai IP	Status Mutu Air	(Nilai IP) Pij	Status Mutu Air
Cijalupang*	Hulu	6° 54' 32,033" S	107° 41' 19,433" E	Depan SMA 24	3.63	Ringan	4.04	Cemar Ringan	2.7	Ringan	2.98	Cemar Ringan
	Hilir	6° 55' 58,026" S	107° 40' 53,528" E	Jl. Soekarno Hatta (Pinus Regensi)	4.46	Ringan			3.25	Ringan		
Curug Dog-dog*	Hulu	6° 58' 18,501" S	107° 35' 2,526" E	Jl. Sukamenak Kopo	6.00	Sedang	5.99	Cemar Sedang	3.71	Ringan	3.47	Cemar Ringan
	Hilir	6° 58' 0,33" S	107° 35' 0,89" E	Dekat Griya Kopo Permai II	5.98	Sedang			3.22	Ringan		
Ciwastra *	Hulu	6° 57' 37,451" S	107° 39' 48,547" E	Jl. Ciwastra (Perum Jingga Residence)	4.54	Ringan	5.12	Cemar Sedang	3.58	Ringan	3.59	Cemar Ringan
	Hilir	6° 57' 31,71" S	107° 39' 50,53" E	Depan Komplek Graha Pelangi Elok	5.70	Sedang			3.6	Ringan		
Cipedes *	Hulu	6° 53' 32,13" S	107° 35' 02,73" E	Jl. DR. Djunjuran (Hotel NYLAND)	2.76	Ringan	2.7	Cemar Ringan	2.86	Ringan	3.13	Cemar Ringan
	Hilir	6° 54' 1,2" S	107° 35' 11,48" E	Depan Istana Regensi 2	2.64	Ringan			3.39	Ringan		
Cimuncang*	Hulu	6° 54' 1,404" S	107° 39' 3,192" E	Jl. Cimuncang	4.14	Ringan	3.91	Cemar Ringan	2.45	Ringan	2.51	Cemar Ringan
	Hilir	6° 54' 27,01" S	107° 39' 06,0" E	Jl. Terusan Sulaksana Baru I	3.00	Ringan			2.56	Ringan		
Cihapit*	Hulu	6° 53' 52,693" S	107° 37' 47,088" E	Jl. Terusan Cisokan	1.84	Ringan	2.41	Cemar Ringan	2.65	Ringan	3.49	Cemar Ringan
	Hilir	6° 54' 36,10" S	107° 38' 11,13" E	Jl. Citamiang	2.44	Ringan			4.33	Ringan		

sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Upaya lainnya yang secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas air tersebut berasal dari upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih menyeluruh. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah meliputi (a) perencanaan; (b) pemanfaatan; (c) pengendalian; (d) pemeliharaan; (e) pengawasan; dan (f) penegakan hukum. Perencanaan dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen ini memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta dokumen Perencanaan Pembangunan seperti RPJPD dan RPJMD.

Penyusunan Muatan teknis Dokumen RPPLH telah dilaksanakan pada tahun 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah untuk menetapkannya akan disusun di tahun 2023. Selain itu, disusun juga Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kualitas Air Sungai sangat dipengaruhi oleh sumber-sumber pencemar yang air buangnya masuk ke sungai. Berdasarkan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa terdapat beberapa sumber pencemar yang masuk ke sungai, yaitu :

1. Air limbah rumah tangga yang dibuang langsung ke sungai
2. Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL atau over flow Septic Tank komunal
3. Air limbah dari sisa produksi UMKM
4. Air limbah dari buangan hasil pengolahan IPAL industri
5. Air drainase yang tercampur limbah domestik
6. Air drainase yang tercampur sisa produksi UMKM

a. Pengendalian Kualitas Air Limbah Domestik

Dilihat dari perhitungan beban pencemaran pada hasil Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Pencemar di ruas sungai Cipamokolan dan Sungai Citepus pada Tahun 2019, diketahui bahwa pencemaran terbesar berasal dari parameter BOD5 dan COD yang berasal dari limbah domestik. Beban pencemaran dari limbah domestik ini mencapai 98% dari total beban pencemaran yang masuk ke sungai sehingga dapat disimpulkan bahwa penyebab pencemaran terbesar dari sungai yang ada di Kota Bandung adalah disebabkan oleh limbah domestik.

Masing-masing sumber pencemar ini memerlukan penanganan yang berbeda agar bisa diselesaikan dengan efektif. Namun, aksi yang sangat penting dilakukan sekarang adalah pengendalian pencemaran akibat limbah domestik ini.

Untuk menangani sumber pencemar air limbah domestik ini maka dapat dilihat dari pengelolaan air limbah domestik Kota Bandung yang saat ini dilakukan, yaitu :

1. Layanan Pengelolaan Air Kotor oleh PDAM;
2. Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh DPKP sebagai OPD pengampu urusan pemukiman dan yang dibangun secara swakelola oleh masyarakat dengan sumber dana berasal dari hibah Program Kotaku;
3. Pengolahan di IPAL Komunal yang dibangun oleh pengembang perumahan;
4. Pengolahan secara mandiri di masing-masing rumah, dan
5. Dibuang secara langsung ke sungai atau saluran yang terhubung ke sungai.

Layanan pengelolaan air kotor/air limbah domestik oleh PDAM Tirtawening dilakukan dengan cara pengumpulan melalui saluran pipa dan diolah di sarana IPAL di Daerah Bojongsoang Kabupaten Bandung. Hasil pengolahan kemudian dibuang ke Sungai Citarum setelah dipastikan telah memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Karenanya, pencemaran kualitas air akibat layanan air kotor PDAM seharusnya tidak terjadi, kecuali apabila terdapat kebocoran pipa sepanjang perjalanan ke sarana IPAL.



Pencemaran kualitas air dapat pula terjadi apabila hasil buangan dari IPAL Komunal, tidak memenuhi Baku Mutu Air Permukaan. Berdasarkan hasil koordinasi dengan DPKP, diketahui bahwa sebagian besar IPAL Komunal yang telah dibangun tidak berfungsi dengan baik dan yang masih berfungsi pun, kualitas air hasil pengolahannya masih belum memenuhi Baku Mutu. Karenanya, meskipun air limbah domestik masuk ke fasilitas IPAL Komunal, air hasil pengolahannya tetap mencemari kualitas air sungai. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan upaya untuk memfungsikan kembali IPAL yang tidak berfungsi dan memperbaiki kinerja IPAL yang masih berfungsi.

Pengolahan air limbah domestik secara onsite di Kota Bandung pun masih mencemari kualitas air, karena teknologi yang digunakannya bukan Septic Tank tersekat sehingga air limbah masih diresapkan ke tanah dan berpotensi mencemari air tanah di Kota Bandung. Karena itu, upaya sosialisasi untuk mengganti teknologi septic tank pun harus dilakukan secara terus menerus agar perumahan dan pemukiman baru yang akan dibangun, akan menggunakan teknologi yang tidak mencemari lingkungan.

Keseluruhan upaya pengendalian ini masih merupakan upaya yang sama dengan upaya pada tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena upaya pengendalian air limbah domestik ini memerlukan kesamaan visi dan kesamaan sudut pandang untuk menetapkan upaya perbaikan pengelolaannya sebagai kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder yang terlibat di dalam pengelolaan air limbah domestik, yaitu DLH sebagai pengawas kualitas lingkungan, DPKP sebagai pengelola pemukiman dan perumahan termasuk di dalamnya fasilitas pengolahan limbah domestik, PDAM sebagai pengelola air kotor Kota Bandung dan pemerintah kewilayahan sebagai pengelola urusan masyarakat di tingkat yang paling bawah dan di garda paling depan.

b. Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri

Pengendalian Kualitas Air Limbah Industri dilakukan melalui instrumen ijin yang terdiri dari Ijin Lingkungan, Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Ijin Penyimpan Sementara Limbah B3. Ijin dikeluarkan oleh DPMPSTP sesuai rekomendasi

oleh atau komitmen dengan DLHK Kota Bandung. Ijin Lingkungan dikeluarkan berdasarkan Dokumen Lingkungan (AMDAL/DELH/DPLH dan UKL/UPL) yang disusun oleh Pemrakarsa atau pemilik usaha/kegiatan. Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Air Limbah dan hasil verifikasi lapangan. Sedangkan Ijin TPS Limbah B3 dikeluarkan berdasarkan Rekomendasi atas Kajian Pengelolaan Limbah B3 dan hasil verifikasi lapangan.

Kajian Pengelolaan Air Limbah harus meliputi : (1) perhitungan neraca air, yaitu kesetimbangan antara air yang diambil atau digunakan untuk produksi dengan air limbah yang dihasilkan; (2) kapasitas produksi; (3) kualitas air limbah yang masuk ke dalam sarana IPAL, hasil pengolahan dari sarana IPAL, kualitas upstream badan air sebelum titik pembuangan air limbah dan downstream badan air setelah titik pembuangan air limbah pelaku usaha/kegiatan; dan (4) Spesifikasi teknis IPAL. Dipersyaratkannya kajian ini untuk memastikan bahwa air limbah yang dibuang tidak akan mencemari sungai Kota Bandung.

Kajian Pengelolaan Limbah B3 harus meliputi : (1) perhitungan timbulan limbah B3; (2) Jenis dan karakteristik limbah B3 yang dihasilkan; (3) Pengemasan dan Penyimpanan masing-masing Limbah B3 yang dihasilkan disesuaikan dengan karakteristik dan jumlahnya; (4) Kerjasama dengan perusahaan pengumpul Limbah B3 yang akan mengangkut limbah tersebut dan perusahaan pengolah Limbah B3 yang akan mengolah limbahnya lebih lanjut; dan (5) Layout penyimpanan Limbah B3 beserta kelengkapannya.

Pada Tahun 2022, Kota Bandung telah menerbitkan Persetujuan Lingkungan, Rekomendasi Teknis Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan dan Rekomendasi Teknis TPS Limbah B3, total kepada 78 pelaku usaha. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.39
Rekapitulasi Persetujuan Lingkungan Hidup yang Dikeluarkan Tahun 2022

No	Jenis Ijin	Jenis Rekomendasi	Jumlah
1	Persetujuan Lingkungan	Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) - AMDAL	3
2	Persetujuan Lingkungan	Rekomendasi Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)	17
3	Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Rekomendasi Teknis	20
4	Rekomendasi teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi Teknis	37
Jumlah			78

Pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa ijin yang dikeluarkan, yang berisi Rencana Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, telah dipenuhi dengan sebaik-baiknya sesuai komitmen yang telah dibuat. Pengawasan dilakukan secara administratif melalui laporan teratur setiap 6 bulan (semester) untuk laporan menyeluruh dan setiap 1 (satu) bulan untuk laporan pemantauan kualitas air limbah. Pengawasan pun dilakukan di lapangan untuk melihat bukti upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara langsung, misalnya saja kesesuaian hasil laporan kualitas air limbah bulanan dengan kondisi IPAL di lapangan. Atau jalan tidaknya proses pengolahan di lapangan.

Apabila dari hasil pengawasan didapat hasil bahwa pelaku usaha tidak melakukan pengelolaan lingkungan dengan benar, maka diberikan sanksi administrasi secara bertahap, dimulai dari surat teguran hingga upaya pemaksaan melalui proses penegakan hukum. Pemberian sanksi dilakukan bertahap sebagai bentuk pembinaan dan untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha. Apabila tahap pertama sanksi telah ditindaklanjuti

dengan perbaikan yang signifikan maka tahap sanksi berikutnya tidak akan ditempuh dan pelaku usaha telah dianggap taat terhadap aturan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2022, DLH Kota Bandung bersama DLH Propinsi telah memberikan sanksi administrasi kepada 12 Pelaku Usaha.

Pengaduan mengenai terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu upaya di dalam mencapai Sasaran Meningkatnya Kualitas Air. Pengaduan yang diterima bisa melalui media sosial seperti Instagram atau Twitter atau melalui aplikasi LAPOR yang dikelola oleh Diskominfo.

Pada Tahun 2022, terdapat 28 pengaduan yang masuk yang keseluruhannya ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Hasil dari pengujian ini kemudian dijadikan dasar untuk menentukan penyebab pencemaran utama dan menindak pelaku pencemaran.

III. Kualitas Lahan

Untuk memperbaiki kualitas tutupan lahan, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menghilangkan perkerasan dan menanami setiap lahan yang kosong dengan tanaman pelindung maupun tanaman produktif. Lahan yang dipenuhi dengan tanaman akan mengundang berbagai jenis serangga dan hewan sehingga terbentuk ekosistem yang lengkap. Hal ini akan menyebabkan fungsi ekologis lahan akan terbangun dan tanaman yang tumbuh akan meningkatkan fungsi hidrologis lahan.

Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan membuat biopori, sumur resapan atau sumur imbuhan. Sumur-sumur ini berfungsi untuk meningkatkan aspek hidrologis lahan karena berguna untuk memasukkan air langsung ke dalam tanah sehingga dapat mempercepat recovery air tanah yang telah banyak dieksploitasi. Sedangkan biopori, berfungsi untuk memperbaiki porositas tanah sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik di tanah tersebut karena akar tanaman mudah bergerak mencari sumber air dan bahan makanan.

Terdapat 7 Program, 9 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Bandung, yaitu :

I. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan untuk merencanakan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh, sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perencanaan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Perencanaan pun dilakukan di tingkat pengendalian, yaitu melalui penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dokumen KLHS ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan pembangunan tidak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan hidup.

Dokumen perencanaan lingkungan hidup merupakan salah satu jenis dari dokumen kebijakan lingkungan. Dokumen Kebijakan lingkungan terdiri dari berbagai jenis, baik dokumen perencanaan pengelolaan dan perlindungan lingkungan maupun draft rancangan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Rancangan peraturan baik berupa draft raperda, raperwal maupun rakerpal dibuat sesuai kebutuhan dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.

Indikator dari program ini adalah Jumlah dokumen kebijakan lingkungan. Banyaknya jumlah dokumen kebijakan lingkungan yang dibuat menunjukkan



banyaknya upaya untuk mengelola lingkungan hidup karena dibuatnya aturan merupakan salah satu cara di dalam mengelola lingkungan hidup. Pada tahun 2022 terdapat 2 dokumen kebijakan lingkungan yaitu Dokumen KLHS untuk Perubahan RDTR dan Muatan Teknis Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target program yang dimaksud adalah :

1. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Rancangan Kebijakan Lingkungan Hidup yang dibuat.

a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Indikator dari sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang merupakan bahan penyusunan kebijakan lingkungan hidup, serta Jumlah Dokumen Standar, Norma, Kebijakan dan Strategi Lingkungan Hidup yang dibuat sebagai tindak lanjut dari kajian perencanaan yang telah disusun.

2. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan salah satu rangkaian upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yaitu melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Indikator dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS yang disusun, disesuaikan dengan dokumen kebijakan pembangunan yang disusun di Kota Bandung.

a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

Indikator dari sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen KLHS untuk K/R/P yang disusun. Pada Tahun 2021, dokumen KLHS yang disusun adalah KLHS untuk dokumen Perubahan RPJMD Kota Bandung dan KLHS untuk dokumen Perubahan RTRW Kota Bandung.

II. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sesuai Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu sebagai bagian dari upaya untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga kelestarian fungsi lingkungan hidup selalu terjaga dan dapat meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indikator program ini terdiri dari dua indikator, yaitu :

- 1) Persentase Sungai dengan status indeks pencemaran “cemar ringan”
- 2) Indeks SO₂

Status mutu air sungai ditunjukkan salah satunya melalui Indeks Pencemaran yang membagi kualitas air sungai ke dalam 4 kategori yaitu cemar berat, cemar sedang, cemar ringan, memenuhi baku mutu. Pada Tahun 2022, sebanyak 90,15 persen sungai atau sebanyak 116 titik dari 128 titik pantau air sungai Kota Bandung berada pada status Indeks Pencemaran “Cemar Ringan” dan sebanyak 7,81% masih dalam status “cemar sedang” dan diupayakan untuk turun menjadi cemar ringan.

Sedangkan untuk kualitas udara ambien pada tahun 2022, Indeks SO₂ dari hasil pengukuran secara passive sampler adalah sebesar 0,55 poin, yang memiliki arti bahwa terjadi penurunan kadar polutan SO₂ di udara dan kualitas udara semakin membaik. Diharapkan dengan adanya intervensi program ini, kualitas air sungai serta udara ambien Kota Bandung akan mengalami perbaikan dan akan berubah menjadi lebih baik.



1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi

III. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, yaitu asas keanekaragaman hayati.

Berdasarkan penjelasan mengenai UU No. 32 Tahun 2009 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan program ini adalah Cakupan kawasan konservasi terpelihara. Pada Tahun 2022, terdapat 1 kawasan yang memungkinkan untuk dibangun sebagai Taman Keanekaragaman hayati, yaitu di Jl. Cigagak Kelurahan Palasari Kec. Cibiru. Peruntukkan lahan ini telah disetujui melalui Keputusan Walikota nomor 670/Kep.828-DLHK/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Penetapan Lokasi Taman Keanekaragaman Hayati. Pembangunan sarana Taman Kehati telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan akses, sarana parkir, toilet dan musholla, serta pemeliharaan pun terus dilakukan meliputi perbaikan kualitas tanah melalui pemupukan dan pemberian regulator pH tanah.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga kondisi lingkungan hidup Kota Bandung saat ini agar tidak rusak atau menjadi lebih buruk. Upaya yang dilakukan adalah dengan menangani setiap kasus pencemaran yang terjadi dan menegakkan aturan pengelolaan lingkungan hidup dengan benar.

Indikator ketercapaian program ini adalah Persentase Pelaku Usaha yang Taat. Indikator ini menunjukkan jumlah pelaku usaha yang telah mentaati aturan pengelolaan lingkungan hidup level 2. Pada tahun 2022, jumlah pelaku usaha yang telah memenuhi ketaatan level 2 adalah sebanyak 195 pelaku usaha yang telah memiliki ijin lengkap dan telah memenuhi persyaratan teknis terkait pengelolaan limbah B3 dan air limbah dari 542 pelaku usaha yang memiliki Ijin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang

Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
- 2) Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH

V. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Pemberian penghargaan lingkungan hidup diharapkan dapat memicu tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Penghargaan ini bisa diberikan kepada perseorangan atau lembaga atau organisasi yang berhasil menurunkan tingkat pencemaran atau aspek lingkungan lainnya. Kriteria dan persyaratan khusus untuk penilaian pemberian penghargaan ini ditetapkan dan diformalkan melalui perwal.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penghargaan sesuai kriteria. Indikator ini menunjukkan persentase penghargaan yang diberikan dibandingkan dengan jumlah orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria penerima penghargaan. Apabila setiap orang atau lembaga atau organisasi yang memenuhi kriteria mendapatkan penghargaan, diharapkan masyarakat lainnya akan berupaya untuk memenuhi kriteria tersebut. Pada Tahun 2022, terdapat 4 jenis penghargaan yang diserahkan kepada masyarakat, yaitu terdiri dari penghargaan Program Peningkatan Pelaku Usaha (PROPER), Sekolah Adiwiyata, Eco-Office dan Kampung Iklim.

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

VI. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Program ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diharapkan dapat mempermudah proses komunikasi terkait kebijakan lingkungan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga bisa mempercepat upaya perbaikan lingkungan yang dilakukan.

Indikator dari program ini adalah Cakupan Penyuluhan Lingkungan Hidup. Indikator ini menunjukkan persentase masyarakat/lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan. Pada Tahun 2022, sebanyak 90 pelaku usaha dari 200 target telah mendapat penyuluhan dan bimbingan teknis terkait pengelolaan lingkungan sehingga capaian kinerja sebesar 102,27% di dapat dari 90 pelaku usaha yang telah menerima penyuluhan dibagi 200 pelaku usaha target.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup.

VII. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari layanan kepada masyarakat, yaitu dengan menangani pengaduan pencemaran lingkungan. Indikator dari program ini adalah Cakupan pengaduan yang ditindaklanjuti. Indikator ini menunjukkan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti maksimal 48 jam setelah pengaduan diterima.

Pencemaran lingkungan hidup seringkali dirasakan melalui pengamatan mata atau penciuman sehingga untuk memverifikasi pencemaran yang terjadi diperlukan pengukuran laboratorium untuk mendapatkan status pencemaran yang lebih akurat. Diperlukan waktu koordinasi untuk menindaklanjuti laporan karena melibatkan pihak laboratorium. Hal ini yang menyebabkan batasan 48 jam diterapkan. Pada Tahun 2022, terdapat 26 pengaduan mengenai pencemaran lingkungan yang seluruhnya segera ditindaklanjuti dengan verifikasi lapangan dan pengambilan contoh uji oleh laboratorium, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

2. Presentasi Luas RTH

Karakteristik fisik kota Bandung dilihat dari letak geografis berada di lembah/cekungan dengan potensi pencemaran udara cukup tinggi sebagai akibat sirkulasi udara yang terpusat dan terakumulasi akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Perkembangan Kota Bandung yang pesat dalam berbagai sektor telah menyebabkan adanya perubahan tata ruang kota dengan berkurangnya Ruang Terbuka Hijau Kota baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan hidup. Dalam menjaga keseimbangan ekosistem kota, perlu adanya keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka hijau secara proporsional. Karakteristik Kota Bandung yang berada di cekungan dengan luas lahan 16.729 Ha dan jumlah penduduk ± 2,8 juta jiwa tergolong kota padat penduduk, yang tentunya sebagai konsekuensi logis akan membawa berbagai dampak pembangunan, antara lain apabila tidak ada keseimbangan dalam pemanfaatan ruang terbangun dengan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akan terjadi degradasi lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup ditentukan dari kelayakan lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Salah satu kriteria ruang kota yang nyaman adalah memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% dari luas kota. Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari ruang terbuka suatu kawasan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman atau area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan kota. Selain berfungsi sebagai sumber oksigen dan penyerap polusi udara yang ditimbulkan oleh pabrik-pabrik dan kendaraan, RTH juga berfungsi memperindah penampilan kota. RTH memiliki beragam fungsi meliputi fungsi ekologis, sosial budaya, estetika dan ekonomi. RTH ditujukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan keseimbangan antara lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Keberadaan RTH tidak hanya menjadikan kota sebagai tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman dan asri.

Dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, maka pembangunan infrastruktur dan sarana kota merupakan faktor yang penting dalam pembangunan skala prioritas Kota Bandung, termasuk penataan dan pengelolaan RTH sebagai sarana publik. RTH selain mempunyai fungsi sebagai penyeimbang ekosistem kota yaitu fungsi ekologis, juga mempunyai fungsi sosial dan estetika kota sehingga dalam penataan maupun pengelolannya harus dapat mencerminkan fungsi-fungsi tersebut, agar terbentuk kota yang representatif dan mempunyai ciri khas yang dapat dibanggakan sehingga dapat meningkatkan "nilai jual" Kota Bandung.

Kota Bandung dengan luas 16.729,65 Ha sampai tahun 2022 luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersedia seluas 2.080,89 Ha atau sekitar 12,44 % dari luas Kota Bandung. RTH tersebut tersebar di beberapa wilayah Kota Bandung. Pada Tabel dapat kita lihat bahwa meskipun pencapaian persentase RTH tidak mencapai target RPJMD, namun dari tahun ke tahun persentase RTH mengalami kenaikan.

Pada tahun 2019 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,22% dari target 12,40%. Pada tahun 2020 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,25% dari target 12,60%. Pada tahun 2021 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,40% dari target 12,75%. Pada tahun 2022 tercapai persentase luasan RTH sebesar 12,44% dari target 13,26%.

Persentase luasan RTH dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase luasan RTH} = \frac{\text{Luas RTH di Kota Bandung}}{\text{Luas wilayah Kota Bandung}} \times 100 \%$$

Rincian luasan RTH pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.40
Rekapitulasi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung
Sampai Tahun 2022

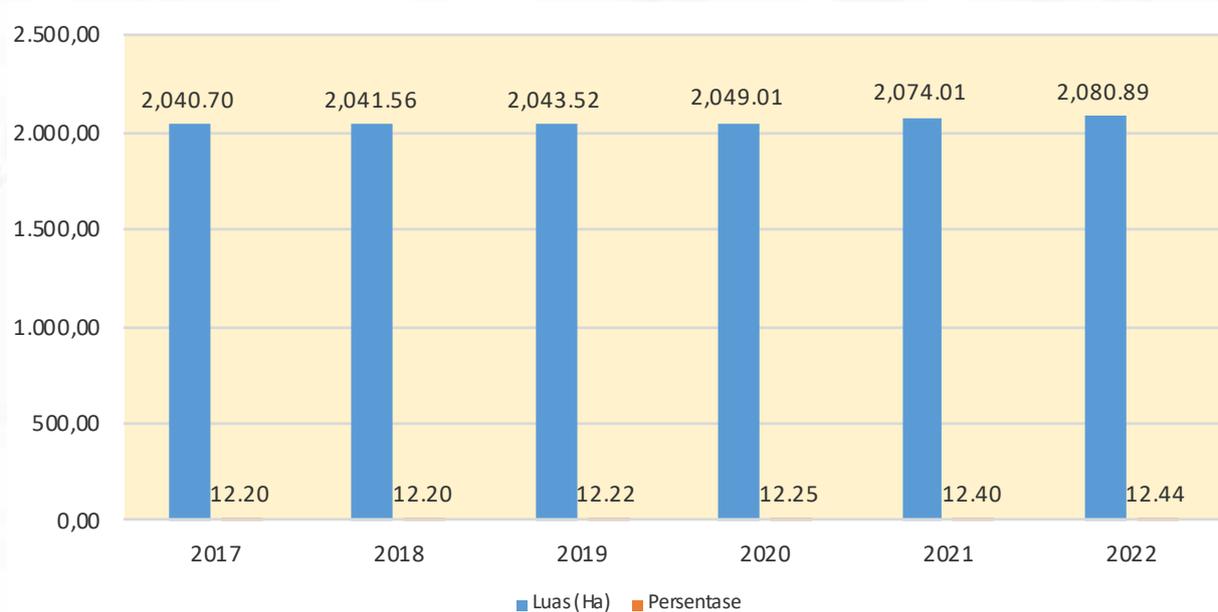
No	RTH	Proporsi terhadap Luas Wilayah Kota Bandung (16.729 Ha)		Keterangan
		Ha	%	
1	Taman Kota	234,28	1,40%	Penambahan tahun 2022 dari pembangunan Taman RW seluas 1.462,15 M2 (0,15) Ha. Penambahan tahun 2022 dari serah terima PSU untuk RTH seluas 63.152,37 M2 (6,31 Ha).
2	Kebun Bibit	1,69	0,01%	
3	RTH Pemakaman	149,98	0,90%	
4	Tegangan Tinggi	10,17	0,06%	
5	Sempadan Sungai	23,26	0,14%	
6	Jalur Hijau Jalan	176,91	1,06%	
7	Sempadan KA	6,42	0,04%	
8	Hutan Konservasi	4,12	0,02%	
9	Penanganan Lahan kritis	416,92	2,49%	
10	RTH dari Bag. Aset	98,67	0,59%	Penambahan tahun 2022 dari pengadaan lahan untuk taman bermain dan RTH seluas 4.197 M2 (0,42 Ha).
Jumlah I		1.122,42	6,709%	
11	Potensi RTH Lainnya			
	- RTH Kawasan Pemukiman	122,12	0,73%	Luas pada Tahun 2011 = 55,6 ha
	- RTH Pendidikan	56,18	0,34%	Penambahan pada tahun 2012

- RTH Kawasan Militer	114,01	0,68%
- RTH Kawasan Perdagangan dan Industri	225,00	1,34%
- RTH Perkantoran dan Gedung Komersial	441,16	2,64%
Jumlah II	958,47	5,729%
Jumlah I + II ..	2.080,89	12,44%

Pada tahun 2022 terdapat penambahan luas RTH sebesar 6,88 Ha dari serah terima PSU Perumahan oleh Pengembang Perumahan dan warga ke Pemerintah Kota Bandung sebanyak 24 Perumahan seluas 63.152,37 M2 (6,31 Ha), pembangunan taman RW sebanyak 20 lokasi seluas 1.462,15 M2 (0,15) Ha serta pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain sebanyak 5 lokasi seluas 4.197 M2 (0,42 Ha).

Grafik 2.24

Perkembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung



Implementasi kebijakan strategis untuk memenuhi target Persentase Luasan RTH pada tahun 2022 dimaksudkan untuk meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kuantitas RTH publik dengan menambah ketersediaan lahan, melalui serah terima PSU perumahan berpotensi RTH dan pembangunan taman RW yang menjadi RTH Publik menghasilkan luasan RTH seluas 1.462,15 Ha.
- b. Meningkatkan kuantitas RTH Privat dengan meningkatkan kepatuhan penyediaan RTH Privat dan meningkatkan verifikasi dan validasi RTH Privat dengan pendataan lapangan untuk 1 (satu) Sub Wilayah Kota (SWK) yaitu SWK Cibeunying yaitu melalui program Penataan Bangunan dan Lingkungannya yang terverifikasi sebesar 137,27 Ha.
- c. Meningkatkan Kualitas RTH Publik dengan meningkatkan penataan pemakaman dan meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui :
 - Peringkatan Sarana dan Prasarana pada Lahan Taman Pemakaman Umum (TPU), serta upaya penambahan luas lahan melalui kewajiban penyerahan PSU dari pihak pengembang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05



Tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum Perumahan;

- Melakukan kegiatan rumputisasi terhadap areal pemakaman yang masih memungkinkan dilaksanakan rumputisasi.
- Pemeliharaan dan penataan makam melalui kegiatan pembersihan makam, pembabatan rumput, penyiangan, penanaman pohon, oleh Petugas Harian Lepas (PHL) di areal Pemakaman melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator Persentase areal pemakaman yang tertata dengan capaian 33,00% dari target 33,00%.
- Meningkatkan pemeliharaan taman, Median, Jalur Hijau Jalan dan Hutan Kota melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) dengan indikator luasan RTH publik taman, median, jalur hijau jalan dan hutan kota terpelihara dengan target kinerja sebesar 25,54% dapat terealisasi sebesar 25,54 %.

Walaupun luasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung selama periode 2017-2022 cenderung mengalami peningkatan, tetapi masih jauh dari target Nasional sebesar 30% dari luas kota secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya wajib mengalokasikan minimal 30% dari ruang atau wilayahnya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), dimana 20% diperuntukkan bagi RTH publik yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum seperti taman kota, taman pemakaman umum dan jalur hijau jalan.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja, yaitu :

- a. Mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada, serta tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain.
- b. Melaksanakan intensifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
- c. Pengembangan pola kemitraan mengenai pengelolaan RTH dengan berbagai stakeholder.

- d. Melaksanakan peralihan PSU Perumahan dari Pengembang menjadi Aset Pemerintah Kota Bandung

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah :

- a. Keterbatasan lahan untuk RTH yang tersedia di Kota Bandung dan banyak Pengembang Perumahan yang tidak diketahui keberadaannya. Selain itu harga tanah/lahan di Kota Bandung yang cenderung meningkat sehingga menjadi kendala dalam pengadaan lahan untuk menambah luasan RTH.
- b. Kesulitan dalam pendataan RTH privat:
- Kesulitan mendapatkan informasi tentang IMB saat survey.
 - Kesulitan mendapatkan data sekunder terkait dengan lahan.
 - Responden yang ditemui dilapangan terkadang bukan pemilik bangunan dan tidak memiliki info lengkap tentang bangunan.
 - Waktu yang terbatas untuk mendata indikator-indikator pendataan.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan tentang Penyerahan PSU Perumahan yang disesuaikan dengan kondisi eksisting agar dapat memberikan kontribusi luasan RTH Publik berupa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 tahun 2019 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Perumahan dan Permukiman yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 berupa Draft Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan PSU Umum Perumahan, Permukiman, Perdagangan dan Industri yang saat ini dalam proses penetapan.
- b. Sejak tahun 2019, DPKP telah melakukan pendataan Perumahan yang belum melakukan penyerahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung dan saat ini masih dilakukan pemanggilan kepada para Pengembang yang membangun Perumahan di Kota Bandung agar segera menyerahkan lahan PSU ke Pemerintah Kota Bandung. Pada tahun 2021 telah terlaksana penyerahan PSU berupa RTH Publik sebanyak 31 Perumahan dengan total luas 5,5071 Ha;
- c. Pengadaan lahan dan penambahan RTH Publik dari perumahan yang diserahkan oleh pengembang minimal 0,20 Ha setiap tahun;
- d. Melakukan Inventarisasi pengembalian fungsi RTH Publik yang telah beralih fungsi;
- e. Melakukan Inventarisasi lahan luas sempadan sungai, sempadan SUTET, sempadan rel kereta api yang berpotensi sebagai bagian dari RTH Publik;
- f. Mencari data sekunder dari instansi terkait seperti data IMB dan PBB untuk menambah luasan RTH Privat
- g. Mencari informasi dari petugas kewilayahan seperti RT, RW, kelurahan untuk mendataluasan RTH Privat.
- h. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan RTH.
- i. Melibatkan peran serta aktif dari unsur kewilayahan dalam pengelolaan dan pengendalian RTH terutama yang berada di lingkungan sekitarnya.
- j. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan komunikasi tentang pentingnya peranan RTH yang memiliki fungsi ekologi, sosial dan estetika.
- k. Melakukan inventarisasi lokasi pengadaan lahan dan pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Bandung yang akan berdampak positif dalam penambahan luasan RTH.

3. Cakupan Layanan Pengelolaan Sampah

Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dijadikan indikator sasaran RPJMD Kota Bandung karena indikator ini menunjukkan apakah seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Bandung telah ditangani dengan baik sehingga tidak ada lagi sampah yang ditimbun di pinggir jalan atau dibuang ke sungai. Semakin tinggi cakupan pengelolaan sampah kota harus ditunjukkan dengan kondisi bersih tanpa pencemaran sampah di seluruh wilayah Kota Bandung.



Target cakupan layanan sampah pada akhir periode RPJMD adalah sebesar 99,00%. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota mengenai kebijakan dan strategi daerah dalam penanganan sampah atau yang dikenal dengan Jakstrada Pengelolaan Sampah.

Sedangkan Capaian kinerja Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah sebesar 98,70% dari target sebesar 98,70% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,00%, capaian ini **mencapai target** yang diperjanjikan. Capaian kinerja indikator “Cakupan Pengelolaan Sampah Kota” tahun ini meningkat 0.20 persen dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 98,50%. Capaian kinerja indikator “Cakupan Pengelolaan Sampah Kota” tahun ini adalah sebesar 100,00%, bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 99,70%.

Berdasarkan data pada aplikasi SIPSAN (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional) diketahui bahwa capaian pengurangan sampah nasional adalah sebesar 26,67% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 50,64% atau cakupan pengelolaan sampah sebesar 77,31%. Sedangkan di Kota Bandung, capaian pengurangan sampah adalah sebesar 18,94% dan capaian penanganan sampah adalah sebesar 79,76%.



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dari awal masa RPJMD, dapat dilihat pada grafik di samping ini. Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik.



Cakupan Pengelolaan Sampah Kota adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dibuang ke TPA dan dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu. Cakupan pengelolaan sampah kota merupakan penjumlahan dari capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung dengan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tingkat Kota Bandung (ton/tahun).

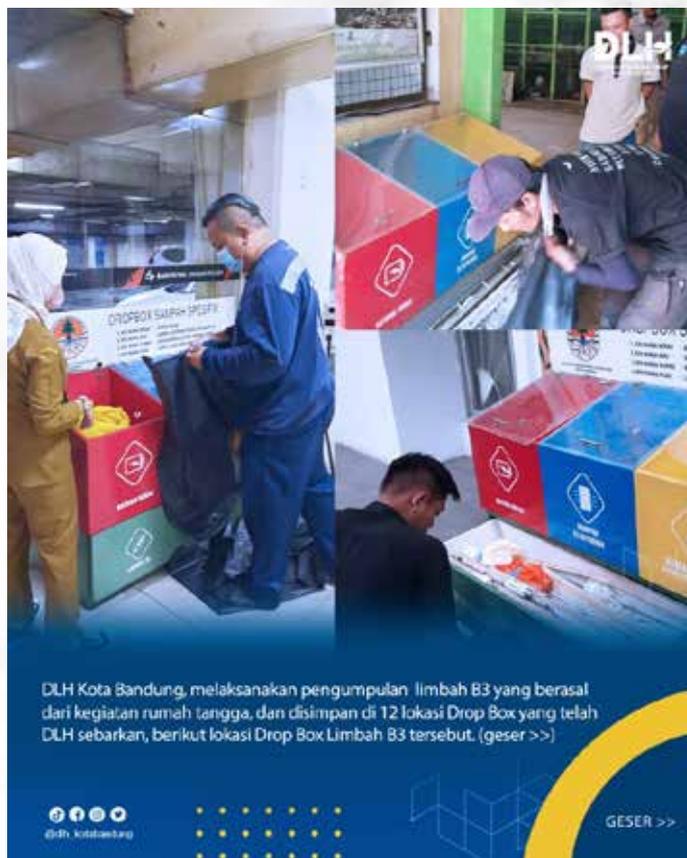
Grafik 2.25
Grafik Perkembangan Capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2020-2022



Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Perkembangan capaian kinerja indikator sasaran Cakupan Pengelolaan Sampah Kota dari awal masa RPJMD, dapat dilihat pada grafik di samping ini.

Berdasarkan grafik tersebut terlihat bahwa capaian Cakupan Pengelolaan Sampah Kota terus meningkat dari tahun ke tahun dan hal tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat baik.



Formulasi perhitungan cakupan layanan pengelolaan sampah adalah sebagai berikut :

$$\text{Cakupan pengelolaan sampah kota} \\ = \text{capaian pengurangan sampah} + \text{capaian penanganan sampah}$$

Capaian pengurangan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dapat dikurangi sejak dari sumber dengan metode Reuse, Reduce, Recycle (3R) pada suatu kurun waktu tertentu (ton per tahun).

Capaian pengurangan sampah

$$= \frac{((\text{Tonase sampah organik yang diolah di Kawasan Bebas Sampah} \\ + \text{Tonase sampah organik yang diolah di Pasar} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh sektor komersil} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola di Sekolah Adiwiyata} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh Bank Sampah} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola di TPS dan TPS 3R} \\ + \text{Tonase sampah yang dikelola oleh pemulung}) / \text{Total timbulan sampah})}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

Capaian penanganan sampah adalah gambaran banyaknya sampah/tonase sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah yang dibuang ke TPA terdiri dari sampah residu dan sampah yang tercampur, karenanya semakin besar sampah yang dibuang ke TPA, menunjukkan budaya pemilahan sampah yang belum terbangun di masyarakat. Oleh karena itu, indikator capaian penanganan sampah diharapkan semakin hari semakin menurun persentasenya.

$$\text{Capaian penanganan sampah} = \frac{(\text{Tonase sampah yang dibuang ke TPA})}{(\text{Total timbulan sampah})} \times 100\%$$

Capaian penanganan sampah pada tahun 2022 sebesar 79,69% dihitung dari sampah yang dibuang ke TPA, dengan rincian data bulanan sebagai berikut :

Bulan	2022			
	Tonase (Ton)	Ritasi (Rit)	KJP (Rp)	KDN (Rp)
Januari	37.701,580	7.247	1.885.079.000	391.466.850
Februari	34.454,784	6.664	1.722.739.200	358.370.880
Maret	38.461,276	7.403	1.923.063.800	399.504.570
April	37.951,956	7.288	1.897.597.800	393.959.670
Mei	37.186,548	7.054	1.859.327.400	384.709.110
Juni	39.198,124	7.367	1.959.906.200	404.490.930
Juli	40.388,124	7.600	2.019.406.200	416.910.930
Agustus	41.454,840	7.769	2.072.742.000	427.446.300
September	39.473,728	7.422	1.973.686.400	407.382.960
Oktober	35.509,124	6.580	1.775.456.200	365.018.430
November	41.814,220	7.709	2.090.711.000	429.241.650
Desember	40.504,932	7.502	2.025.246.600	416.316.990
Jumlah	464,099.236	87,605	23,204,961,800	4,794,819,270
Rerata Bulanan	38,674.936	7,300.42	1,933,746,816.67	399,568,272.50
Rerata Harian	1,271.505	240	63,575,238	13,136,491

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah sampah terbanyak yang dikirim ke TPA adalah di bulan November, sedangkan yang paling rendah adalah di bulan Februari.

Pengurangan di sektor rumah tinggal berasal dari sampah yang dipilah dan diolah di RW-RW yang menerapkan pola Kawasan Bebas Sampah (KBS) dan dari Kelurahan yang telah menerapkan Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS). Pada Tahun 2022, terdapat 180 RW yang menerapkan KBS di Kota Bandung, yaitu :

Tabel 2.41
Daftar RW di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Kawasan Bebas Sampah (KBS)

No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah	No	Kecamatan	No	Kelurahan	Jumlah
1	Sukasari	1	Kelurahan Isola	1	14	Cibeunying Kaler	41	Kelurahan Neglasari	8
		2	Kelurahan Sukarasa	1			42	Kelurahan Cigadung	1
		3	Kelurahan Gegerkalong	1	15	Cibeunying Kidul	43	Kelurahan Sukapada	1
		4	Kelurahan Sarijadi	2			44	Kelurahan Pasirlayang	1
2	Sukajadi	5	Kelurahan Pasteur	1	16	Regol	45	Kelurahan Cigareleng	1
		6	Kelurahan Sukagalih	1			46	Kelurahan Ancol	1
		7	Kelurahan Sukabungah	1			47	Kelurahan Balonggede	1
3	Cicendo	8	Kelurahan Husein Sastranegara	1			17	Batununggal	48
		9	Kelurahan Sukaraja	1	49	Kelurahan Gumuruh			1
4	Andir	10	Kelurahan Maleber	1	17	Batununggal	50	Kelurahan Maleer	2
		11	Kelurahan Campaka	1			51	Kelurahan Cibangkong	3
5	Bojongloa Kaler	12	Kelurahan Kopo	1	18	Lengkong	52	Kelurahan Cijagra	1
		13	Kelurahan Babakan Asih	1			53	Kelurahan Lingkar Selatan	1
		14	Kelurahan Sukaasih	1			54	Kelurahan Burangrang	1
6	Bojongloa Kidul	15	Kelurahan Cibaduyut	1			55	Kelurahan Paledang	1
		16	Kelurahan Mekar Wangi	1			56	Kelurahan Malabar	1
7	Babakan Ciparay	17	Kelurahan Margahayu Utara	1			19	Kiaracondong	57
		18	Kelurahan Babakan	1	20	Mandalajati	58	Kelurahan Jati Handap	1
8	Bandung Kulon	19	Kelurahan Cijerah	1			20	Mandalajati	59
		20	Kelurahan Cibuntu	1	21	Antapani			60
		21	Kelurahan Caringin	1			61	Kelurahan Antapani Tengah	1

		22	Kelurahan Cigondewah Kaler	1			62	Kelurahan Antapani Kidul	1
		23	Kelurahan Gempol Sari	8	22	Ujung Berung	63	Kelurahan Cigending	1
9	Astana Anyar	24	Kelurahan Cibadak	1			64	Kelurahan Pasir Jati	1
		25	Kelurahan Karang Anyar	1			65	Kelurahan Pasanggrahan	1
		26	Kelurahan Karasak	1	23	Cinambo	66	Kelurahan Cisaranten Wetan	1
10	Cidadap	27	Kelurahan Ciumbuleuit	1			67	Kelurahan Sukamulya	1
		28	Kelurahan Ledeng	1	24	Cibiru	68	Kelurahan Palasari	2
11	Coblong	29	Kelurahan Cipaganti	1	25	Arcamanik	69	Kelurahan Sukamiskin	17
		30	Kelurahan Lebak Gede	2			70	Kelurahan Cisaranten Kulon	1
		31	Kelurahan Sadang Serang	9	26	Panyileukan	71	Kelurahan Cipadung Kidul	1
		32	Kelurahan Dago	1			72	Kelurahan Mekar Mulya	1
		33	Kelurahan Sekeloa	6	27	Gede Bage	73	Kelurahan Cisaranten Kidul	2
		34	Kelurahan Lebak Siliwangi	2			74	Kelurahan Cimincrang	1
		35	Lebak Gede	1	28	Rancasari	75	Kelurahan Cipamokolan	1
12	Sumur Bandung	36	Kelurahan Kebon Pisang	9			76	Kelurahan Derwati	3
13	Bandung Wetan	37	Kelurahan Cihapit	1	29	Buah Batu	77	Kelurahan Margasari	1
		38	Kelurahan Taman Sari	2			78	Kelurahan Jatisari	1
14	Cibeunying Kaler	39	Kelurahan Cihaurgeulis	12	30	Bandung Kidul	79	Kelurahan Mengger	3
		40	Kelurahan Sukaluyu	10			80	Kelurahan Kujangsari	9
Total					180				

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Sedangkan Kelurahan yang telah menerapkan pola RTPS terdiri dari 2 Kelurahan, yaitu :

Tabel 2.42

Daftar Kelurahan di Kota Bandung yang Telah Menerapkan Pola Rencana Teknis Pengelolaan Sampah (RTPS)

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1	ARCAMANIK	SUKAMISKIN
2	BOJONGLOA KALER	CIHAURGEULIS

Sumber: Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Tahun 2022

Pengurangan di sektor non rumah tinggal diserahkan kepada pengelolanya masing-masing, baik Mall, Hotel, Sekolah, Pasar, taman ataupun RPH. DLHK memberikan bimbingan teknis dan pendampingan sampai petugas pengelola memahami proses pengolahan sampah dan dapat melakukan pengolahan secara mandiri.

Meningkatnya capaian pengurangan sampah, tidak lepas dari mulai terbangunnya budaya pengelolaan sampah yang baru di masyarakat yaitu pola Kurangi – Pisahkan – Manfaatkan yang di-masiv-kan melalui Gerakan KangPisMan. Dengan pola ini, daya kreasi dan inovasi masyarakat pun terbentuk, karena setelah melakukan pemilahan, masyarakat terpicu untuk mengurangi dan memanfaatkan sampah semaksimal mungkin. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan pola ini adalah agar :

1. Masyarakat melihat sampah sebagai komoditi yang bermanfaat sehingga tidak ada lagi yang membuang sampah ke sungai atau membakar sampah.
2. Masyarakat memahami manfaat dari masing-masing jenis sampah sehingga mau memilah sampah dan memanfaatkan sampah di lingkungan sekitar mereka, baik melalui bank sampah atau pembuatan kompos, magot BSF dan pemanfaatan lainnya. Hanya sampah residu yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibuang ke TPA.
3. Masyarakat memahami bahwa pengelolaan sampah memerlukan usaha yang cukup besar sehingga mereka bersedia untuk mengurangi produksinya sejak awal dimulai dari perubahan pola konsumsi, misalnya diet kantong plastik serta penggunaan tumbler dan tempat makan.

Upaya ini diperkuat dengan dilaksanakannya Pelatihan dan bimbingan teknis persampahan yang diberikan kepada kader PKK, Lurah, Camat, Pelaku usaha hotel, mall, restoran, pengelola kawasan komersil, asosiasi pelaku usaha, warga perumahan, murid sekolah, pengelola kantor SKPD, ASN, petugas pengumpul sampah, pengelola TPS hingga pegawai PD Kebersihan.

Pada Tahun 2022, sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis yang terselenggara adalah sebanyak 22 kali pelaksanaan, dengan rincian sebagai berikut :

No	Pelatihan	Lokasi	Tanggal
I Sosialisasi & Implementasi Kang Pisman			
1	Edukasi Dan Pelatihan Kang Pisman	Bank Sampah Capetang Rw 11 Kel Sekejati Buah Batu10	Kamis, 10 Maret 2021
2	Sosialisasi & Implementasi Kang Pisman	RW 10 Kelurahan Cipadung Kulon Panyileukan	Jumat ,18 Maret 2022
3	Penguatan Kangpisman	Kecamatan Arcamanik	Senin, 28 Maret 2022
4	Sosialisasi & Implementasi Kawasan Bebas Sampah Kang Pisman	RW 10 Kelurahanpasir Kaliki Kecamatan Cicendo	Kamis, 21 April 2022
5	Pengolahan Sampah Penguatan Kangpisman	Aula Kebun Jeruk	Kamis, 2 Juni 2022
6	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Sukalya	Kamis, 30 Juni 2022
7	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Pakemitan	Kamis, 30 Juni 2022
8	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Cisaranten Wetan	Kamis, 30 Juni 2022
9	Sosialisasi Pemilahan Sampah Dan Pengolahan Sampah Organik	Kelurahan Babakan Penghulu	Kamis, 30 Juni 2022
10	Sosialisasi Kang Pisman	Kelurahan Sukamulya	Rabu, 24 Agustus 2022

II Penyusunan Program Kerja			
1	Pembahasan Lokasi Dan Rencana Kerja KBS 2022	Ruang Rapat TI	24 Januari 2022
2	Koordinasi Program TPS Terpilah	Ruang Rapat Kang Pisman	3 Februari 2022
III Peningkatan Kapasitas SDM/THL			
1	Bimtek THL Pendampingan Tps Terpilah	Paviljoen Hotel, Jalan Riau	22- 23 Februari 2022
2	Bimtek THL	Di Yogyakarta	17-19 November
IV Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan			
1	Pembinaan Rw Dalam Rangka Pembentukan Kbs	Warung Koflok Jl. Kopo No.25 Bandung	Rabu 30 Maret 2022
2	Sosialisasi Pemanfaatan Sampah	Lap. Jombang Buruan Sae	Kamis, Jumat Senin 23,24,27 Juni
3	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kang Pisman	Aula Kantor Kel. Babakan Penghulu	Rabu, 13 Juli 2022
4	Pelatihan Losema	Aula Kelurahan Kebun Waru	Selasa, 19 Juli 2022
5	Pelatihan Peningkatan Kapabilitas Pengolahan Sampah Bagi Pengelola Sampah Se-Kecamatan Ujung Berung	Aula Kelurahan Cigending, Kec Ujung Berung	Kamis, 28 Juli 2022
6	Gerakan Kebersihan Dan Pemanfaatan Sampah	Aula Kelurahan Kebun Waru	Jumat, 29 Juli 2022
7	Menjalankan Hooby Mengelola Lingkungan Untuk Sekolah Lansia	Aula Kecamatan Sukajadi	Selasa, 23 Agustus 2022
8	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Kp. Nyalindung Atas Ciumbeuleit Kec Cidadap Rw 09 Rt05	Minggu, 28 Agustus 2022
9	Pelatihan Pembuatan Ember Komposter	Pojok Kang Pisman Rw01 Kel. Sukamulya Kec Inambo	Jumat, 16 September 2022
10	Penanganan Sampah Di Lingkup Keluarga Dan Lingkungan	Aula Kantor Kecamatan Regol	Rabu, 16 November 2022
11	Bimtek Pengembangan Bank Sampah	Bsi Malang	Rabu-Minggu/30 Nov-3 Des 2022
12	Pengelolaan Sampah Organik Dengan Menggunakan Bata Terawang	Politeknik STIA LAN	Rabu 14 Desember 2022
V Pelatihan Manajemen Pengelolaan Bank Sampah			
1	Sosialisasi Program Ktt (Kumpul Tukar Tebus)	Bank Sampah Induk (Sadang Serang)	Rabu 26 Januari 2022
2	Evaluasi Kinerja/FGD BSI	Paviljoen Hotel	Rabu 30 Maret 2022
3	Aktivasi Bank Sampah Dan Sosialisasi Kang Pisman	Aula Kantor Ujung Berung	Selasa, 1 November 2022
VI Sekolah Kang Pisman			
1	Pelatihan Pengelolaan Sampah Di Pesantren	Aula Pondok Pesantren Mahasiswa Universal	Sabtu, 11 Juni 2022
2	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Sma 18 Bojongloa Kaler	Kamis, 24 November 2022
VII Sekolah Kang Pisman			
1	SD Negeri 174 Pasir Impun (84 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Kamis, 15 September 2022
2	SDN 050 Cibiru (28 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 21 September 2022
3	SDN 038 Kiaracandong (38 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Jumat 23 September 2022
4	SDN Angkasa (30 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Senin 26 September 2022
5	Kecamatan Bojongloa Kidul	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 5 Agustus 2022
6	Yayasan Wangi Bumi Nusantara	Sekolah Kang Pisman	Senin, 15 Agustus 2022
7	Depok	Sekolah Kang Pisman	Senin, 15 Agustus 2022
8	Dosen Itenas	Sekolah Kang Pisman	Selasa, 16 Agustus 2022



9	Mahasiswi Itenas	Sekolah Kang Pisman	Rabu , 24 Agustus 2022
10	Jurnalis Humas Bandung	Sekolah Kang Pisman	Jumat,26 Agustus 2022
11	Prokopim	Sekolah Kang Pisman	-
12	SMP Islam Cendekia Muda	Sekolah Kang Pisman	Kamis,15 September
13	SD Negeri 174 Pasir Impun (84 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 21 September
14	SDN 050 Cibiru (28 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Jumat 23 September
15	SDN 038 Kiaracandong (38 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Senin 26 September
16	SDN Angkasa (30 Orang)	Sekolah Kang Pisman	Rabu 28 September 2022
17	SD Taruna Bakti (6 Guru)	Sekolah Kang Pisman	Rabu 28 September 2022
18	SD Al-Irham Sukamiskin	Sekolah Kang Pisman	Rabu 28 September 2022
19	SDN 020 Lengkong Besar	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 5 Oktober 2022
20	SDN 094 Parakan Waas	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 5 Oktober 2022
21	SDN 209 A	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 5 Oktober 2022
22	SD Al - Irham	Sekolah Kang Pisman	Senin, 10 Oktober 2022
23	SDN 214 Perumnas Cijerah	Sekolah Kang Pisman	Senin, 10 Oktober 2022
24	SD Sequio	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 14 Oktober
25	SDN 168 Cipadung	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 19 Oktober 2022
26	SDN 158 Babakan Sari	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 19 Oktober 2022
27	SDN 017 Sekejati	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
28	Politeknik Pembangunan Pertanian Kota Malang	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
29	Mahasiswa Universitas Bakri	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
30	Mahasiswa Universitas Komunikasi	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
31	Mahasiswa Program Studi Dkv Sekolah Tinggi Teknologi Bandung	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 21 Oktober 2022
32	MTS Insan Madani	Sekolah Kang Pisman	Senin, 24 Oktober 2022
33	SDN 059	Sekolah Kang Pisman	Senin, 14 November 2022
34	Cirangrang	Sekolah Kang Pisman	Senin, 14 November 2022
35	Petugas Kang Pisman Kelurahan Antapani Tengah	Sekolah Kang Pisman	Selasa, 22 Oktober 2022
36	SD Kartika	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
37	Lusi	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
38	SD IT	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
39	Lukmanul Hakim	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
40	SDN 080	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 23 November 2022
41	Bojong Indah Cibuntu	Sekolah Kang Pisman	Rabu,23 November 2022
42	Taud Baitul Mutaqin	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 25 November 2022
43	Mahasiswa Telkom University	Sekolah Kang Pisman	Jumat, 25 November 2022
44	Lilis (Dosen Telkom University)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
45	Universitas Kebangsaan	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
46	Universitas Respati Indonesia (Fakultas Ilmu Kesehatan)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
47	Caili Rohma Halimah (UI Depok)	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 7 Desember 2022
48	SDN Cipamokalan	Sekolah Kang Pisman	Rabu, 21 Desember 2022
49	Bengkel Honda Karasak	Sekolah Kang Pisman	Kamis, 29 Desember 2022



d. Faktor Penghambat

Beberapa faktor penghambat tercapainya sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

1. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat memerlukan waktu yang lama dan berkelanjutan untuk dapat terinternalisasi menjadi perubahan perilaku yang permanen, padahal tenaga edukator dengan kemampuan teknis dan komunikasi yang mumpuni, jumlahnya sangat terbatas.
2. Pelaku usaha saat ini terbebani biaya produksi yang tinggi akibat kenaikan harga beberapa komoditi, karenanya prioritas pembiayaan saat ini adalah untuk memenuhi biaya utama yang harus mereka keluarkan, seperti gaji tenaga kerja dan pembelian bahan baku. Hal ini mengakibatkan biaya pengolahan limbah menjadi item yang tidak diprioritaskan.
3. Adanya pandemi covid yang mempengaruhi tingkat perekonomian masyarakat, menyebabkan kemampuan masyarakat di dalam pemenuhan kebutuhan sarana sanitasi pun menjadi rendah. Hal ini menyebabkan, masyarakat tidak mampu menyiapkan fasilitas pengolahan limbah domestik yang dihasilkannya maupun menyediakan jaringan sambungan dari rumah ke fasilitas IPAL domestik komunal di sekitarnya.
4. Terdapat permasalahan kelembagaan di dalam pengelolaan fasilitas pengolahan limbah secara komunal, yaitu pengelolaan fasilitas masih harus didanai oleh pemerintah, berupa gaji bagi pengelola fasilitas dan biaya pemeliharannya, karena tidak dapat dipenuhi dari swadaya masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak fasilitas IPAL domestik komunal yang mangkrak dan tidak berfungsi akibat keterbatasan anggaran pemerintah dan ketidakjelasan pengelolanya.
5. Sarana TPS krusial di dalam pengelolaan sampah, tetapi saat ini terdapat kecenderungan dimana masyarakat tidak bersedia apabila terdapat TPS di lingkungan sekitarnya dan meminta TPS yang ada untuk ditutup.
6. Adanya keterbatasan lahan untuk pembangunan sarana pengolahan sampah skala

wilayah dan Kota, menyebabkan sampah yang telah dikumpulkan secara terpilah, tidak dapat diolah lebih lanjut, karena sarana pengolahan sampah yang ada telah melebihi kapasitasnya.

e. Faktor Pendukung

Beberapa faktor pendukung tercapainya Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Tren gaya hidup hijau yang lebih memperhatikan pengurangan penggunaan energi dan peningkatan upaya pelestarian lingkungan telah meningkatkan jumlah vegetasi yang memperbaiki kualitas udara.
2. Faktor pendukung tercapainya kualitas air yang baik adalah berkurangnya tingkat pencemaran yang masuk ke badan air sungai. Hal ini dapat terjadi apabila seluruh saluran pembuangan air yang masuk ke sungai, memasukkan air dengan kualitas yang memenuhi baku mutu kualitas air permukaan. Saluran yang masuk ke sungai diantaranya berasal dari saluran drainase, saluran pembuangan limbah domestik dari rumah penduduk atau dari instalasi-instalasi pengolahan air kotor hotel/rumah makan dan dari instalasi pengolahan air limbah pabrik. Sehingga apabila seluruh IPAL domestik maupun industri berfungsi dengan baik dan apabila tidak ada pembuangan langsung dari perumahan/pemukiman ke sungai, maka dapat dipastikan kualitas air sungai Kota Bandung pun akan membaik.
3. Faktor pendukung tercapainya capaian pengurangan dan penanganan sampah adalah keberhasilan dalam membudayakan pemilahan sampah di masyarakat, sehingga program KangPisMan yang dilaksanakan di Kota Bandung menjadi salah satu faktor pendukung dalam mencapai target pengurangan dan penanganan sampah.
4. Banyaknya institusi pendidikan di Kota Bandung memungkinkan tersedianya akses terhadap pengetahuan dan teknologi yang terbaik bagi pengelolaan lingkungan.
5. Banyak tumbuhnya komunitas-komunitas masyarakat, memungkinkan untuk dilakukannya kerjasama sehingga dapat bersinergi di dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan lingkungan

f. Solusi

Untuk mengurangi faktor-faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung yang ada dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, maka solusi yang dapat dilakukan adalah :

1. Menyelenggarakan pelatihan Training of Trainee kepada Lembaga kemasyarakatan seperti PKK dan Karang taruna, agar para anggota PKK atau Karang taruna tersebut menjadi tenaga educator di lingkungan sekitarnya.
2. Memfasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dengan narasumber dari para praktisi yang telah berhasil mengelola limbahnya dengan efisien. Hal ini dilakukan untuk memberikan tips kepada pelaku usaha untuk mensiasati biaya pengolahan limbah yang cukup tinggi.
3. Berkoordinasi dengan DPKP Kota Bandung dan PDAM Tirtawening di dalam menyelesaikan permasalahan penanganan air limbah domestik yang lebih efisien.
4. Berkoordinasi dengan DPKP Kota Bandung dan Pemerintah Kewilayahan untuk bersama-sama mencari solusi terkait pengelolaan sarana pengolahan limbah yang berkelanjutan. Atau bisa juga dengan mencari referensi dari Kabupaten/Kota lain dengan masalah yang sama.
5. Menyediakan layanan pengumpulan sampah dengan sistem rute, yaitu sampah dikumpulkan di titik yang disepakati di waktu yang telah ditentukan, dan langsung diangkut ke TPA.

6. Bekerja sama dengan investor untuk membangun sarana-sarana pengolahan sampah dengan teknologi yang lebih baik dan produknya dapat digunakan ulang dalam jumlah yang banyak, seperti teknologi RDF.

Rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai sasaran pada tahun 2022 adalah :

- 1) Diperlukan kebijakan yang menyeluruh di Kota Bandung, terkait pengurangan mobilitas penduduk untuk menurunkan tingkat pencemaran udara, baik dengan mengubah metode offline menjadi online untuk beberapa kegiatan yang memungkinkan atau dengan menerapkan metode hibrid, yaitu menggabungkan antara metode online dan offline secara bersamaan.
- 2) Diperlukan upaya untuk menggabungkan upaya pengendalian pencemaran air secara bersama-sama antara Dinas DPKP3 sebagai pengampu urusan perumahan pemukiman yang berwenang untuk menyediakan fasilitas pengolahan air limbah domestik di perumahan pemukiman, PDAM sebagai operator pengelola air bersih dan air kotor yang bertugas untuk memberikan layanan pengolahan air limbah kepada masyarakat dan DLHK sebagai pengampu urusan lingkungan hidup yang berkepentingan untuk menjaga kualitas lingkungan. Koordinasi yang penuh antara 3 OPD ini akan secara efektif memperbaiki pengendalian pencemaran air yang terjadi di Kota Bandung.
- 3) Pembangunan Sistem Pengelolaan Persampahan merupakan hal yang mutlak dilakukan agar Rencana Induk Pengelolaan Sampah dapat dijalankan dengan baik dan hal ini tidak dapat terjadi apabila masyarakat tidak terlibat seluruhnya di dalam upaya pengembangannya. Karenanya, upaya pengelolaan sampah harus menjadi arus utama dalam pelaksana seluruh kegiatan.



Sasaran 7 : Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas

Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas. Sasaran-Sasarannya berupa Persentase Penurunan Kemacetan, Persentase Luasan Kawasan Kumuh, Cakupan Pelayanan Air Minum dan Persentase Penurunan Titik Genangan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada 4 (empat) indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.43

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Penurunan Kemacetan	-	-	-	-	-	-	20,87	20,87	100
2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	4,55	4,28		3,96	2,94		2,80	2,79	100
3	Cakupan Pelayanan Air Minum	79,00	80,24		80,00	79,38	99,22	81,00	82,19	101,47
4	Persentase Penurunan Titik Genangan	100	63,3		80	60,76		58,82	14,71	174,99
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		-			-			119,12		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Persentase Penurunan Kemacetan	14,78	14,78	100	7,83
2	Persentase Luasan Kawasan Kumuh	2,76	2,32		2,16
3	Cakupan Pelayanan Air Minum	82,00	90,82		83
4	Persentase Penurunan Titik Genangan	50,00	14,71	170,58	30
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		124,32			

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas dapat dilihat dari sebanyak 4 (empat) indikator yaitu :

Capaian kinerja indikator ke-1 (satu) “Persentase Penurunan Kemacetan” dari target tahun 2022 yaitu 14,78 dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 14,78 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 20,78 mengalami penurunan sebesar 6,09. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 7,83 maka capaian kerjanya 11.24%.

Capaian kinerja indikator ke-2 (dua) “Persentase Luasan Kawasan Kumuh” dari target tahun 2022 yaitu 2,76 dengan realisasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 2,32 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 115,94%. Persentase capaian tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu 2,79. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 2,16 maka capaian kerjanya 92.59%

Capaian kinerja indikator ke-3 (tiga) “Cakupan Pelayanan Air Minum” dari target tahun 2022 yaitu 98,70 tercapai sesuai dengan target yaitu 98,70 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 100%. Realisasi tersebut mengalami peningkatan

dibandingkan tahun 2021 yaitu 98,50%. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 yaitu 99,00 maka capaian kerjanya 99,70%

1. Presentase Penurunan Kemacetan

Sasaran Meningkatnya Infrastruktur kota terpadu dan berkualitas dengan Indikator Persentase penurunan kemacetan pada tahun 2022 mempunyai target sebesar 14,78% dengan realisasi sebesar 14,78% dengan demikian capaian kinerjanya sebesar $14,78\% / 14,78\% \times 100\% = 100\%$



Dari 115 ruas jalan yang ditangani, maka sesuai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 pada tahun 2021 targetnya menurun dari 28 menjadi 24 ruas jalan yang ditangani dan sudah diselesaikan sebanyak 4 ruas jalan. Pada tahun 2022 targetnya menurun juga dari 24 ruas jalan menjadi 17 ruas jalan dan sudah diselesaikan sebanyak 7 ruas jalan.



Capaian kinerja presentase penurunan kemacetan sebesar $17/115 \times 100\% = 14,78\%$ dengan target 14,78%, sehingga dapat dikatakan presentase penurunan kemacetan sudah mencapai target sebesar 100%

Adapun ruas jalan yang diatasi pada tahun 2022 yaitu, berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, berada di Jalan Asia Afrika, Jalan Kopo (Sp. JL. Peta-BTS.Kota/Kab Bandung), Jalan Dalem Kaum, Jalan Kopo (Peta s/d Pasir Koja), Jalan Mochamad Toha, Jalan Pahlawan dan Jalan Pasirkoja. Dari hasil survey di lapangan didapat data-data sebagai berikut :

NO	RUAS JALAN		LANGKAH NYATA PENAGGULANGAN KEMACETAN	
Ruas Jalan yang di Atasi Tahun 2021				
1	JL. LEUWIPANJANG			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem Angkutan Umum	Depan Toko Oleh-oleh (ujung jalan leuwipanjang)	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
			Depan pintu masuk dan keluar pengunjung pasar	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Parkir On Street	Depan pintu keluar pengunjung pasar	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	Disiplin Pengemudi Angkutan Umum	Depan pintu keluar pengunjung pasar	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan/pendidikan	ruko seberang pasar	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	PKL	di sekitar pintu masuk dan keluar terminal	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	Banjir/Genangan	Depan pasar (lim-pasan dari sungai yang ada di median jalan)	Pengalihan arus yang sebelumnya di pantau lewat CCTV kemudian di infokan melalui media social atau di infokan langsung lewat pengeras suara yang ada di persimpangan oleh anggota ATCS
7	Volume lalulintas yang tinggi	Volume : 2598 smp/jam	Kapasitas : 2855 smp/jam	
2	JL. PASIRKALIKI (Sp.Kebonkawung-Sp.Pajajaran) KOTA BANDUNG			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Parkir On Street	Depan SMUN 6	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	APILL Persimpangan	Simpang Padjajaran	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	3	Aksesibilitas Gang/ Jalan	Akses menuju SMP negeri 1 Bandung (jalan kesatriaan)	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan/pendidikan	Sepanjang jalan pasir kaliki (Sp. kebonkawung-Sp padjajaran)	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	

	5	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 1802 smp/jam	Kapasitas: 2025 smp/jam
3	JL. PASIRKALIKI (Sp.Pasteur-Sp.Sukajadi/Eyckman) KOTA BANDUNG			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Parkir On Street	Depan pintu keluar RSHS	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
			Depan pom bensin	
			simpang 3 Eykman	
			jalan eykman pendek	
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	2	Aksesibilitas Gang/ Jalan	Akses jalan Dr radjiman dan kawasan perdagangan dan jasa	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	PKL	Depan pintu keluar RSHS	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	4	Volume lalu lintas yang tinggi	1827 smp/jam	2053 smp/jam
4	JL. OTTO ISKANDARDINATA			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem Angkutan Umum	Depan pasar baru	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
			sekitar taman tegalega	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
			seberang BRI syariah Suniaraja	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Parkir On Street	depan ruko pasar baru	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	APILL Persimpangan	Simpang pasar baru - simpang sudirman	Pengaturan waktu siklusnya di atur ulang atau di evaluasi
			simpang sudirman - simpang pasar karang anyar	
			simpang karang anyar - simpang kalipohapo	
			simpang pungkur via pasir koja - simpang ibu inggit ginarsih	
			simpang ibu inggit ginarsih - Lap. Tegalega	
	4	U-Turn	Dekat pertigaan Astana Anyar	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
5	Aksesibilitas Gang / Jalan	Jl simpang	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	

	6	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	Sekitar pasar baru	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	7	PKL	Depan ITC Pasar baru	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	8	Volume lalu lintas yang tinggi	1828 smp/jam	2257 smp/jam
Ruas Jalan yang di Atasi Tahun 2022				
1	JL. Asia Afrika			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	Didepan Museum KAA dan Di Depan Patung Globe	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Museum KAA dan Di Depan Patung Globe untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Disiplin Pengemudi angkum	Shelter Alun-alun	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Shelter Alun-alun untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	3	Aksesibilitas Gang / Jalan	Akses dari Jalan Naripan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Naripan untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	4	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan / pendidikan	d zone	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi D zone (Toko Pakian, Hotel, Pos Goro) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 3047 smp/jam	Volume : 3762 smp/jam
2	JL. KOPO (SP.JL.PETA-BTS.KOTA/ KAB.BANDUNG)			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem angkutan umum	Pertigaan Rajawali	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Pertigaan Rajawali (tempat ngetem angkot jurusan Cijerah-Ciwastra- Derwati, Cicaheum-Cibaduyut, sedang serang-Caringin, Pasar induk Caringin- Dago) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	didepan SMP - SMA Nusantara	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi didepan SMP - SMA Nusantara untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	APILL Persimpangan	Sp jalan peta - Sp Soekarno Hatta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Sp jalan peta - Sp Soekarno Hatta untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	4	Disiplin Pengemudi angkum	Pertigaan Rajawali	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Pertigaan Rajawali (tempat ngetem angkot jurusan Cijerah-Ciwastra- Derwati, Cicaheum-Cibaduyut, sedang serang-Caringin, Pasar induk Caringin- Dago) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	5	Aksesibilitas Gang/ Jalan	jl. Babakan ciparay	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi jl. Babakan ciparay untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
6	Aksesibilitas keluar masuk area per-tokoan/pendidikan	pedagang makanan ringan dan rumah makan di sepanjang jalan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi area pertokoan untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	

	7	PKL	di sekitaran persimpangan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi pedagang makanan ringan untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	8	Banjir / Genangan	Citarip	Pengalihan arus yang sebelumnya di pantau lewat CCTV kemudian di infokan melalui media social atau di infokan langsung lewat pengeras suara yang ada di persimpangan oleh anggota ATCS
	9	Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Jln Kopo - Soetta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jln Kopo - Soetta untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	10	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 1598 smp/jam	Volume : 1796 smp/jam
3	JL. Dalam Kaum			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Parkir On Street	Disepanjang jalan Dalam Kaum	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Disepanjang jalan Dalam Kaum untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	2	Aksesibilitas Gang/ Jalan	Jalan Alun-alun timur	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jalan Alun-alun timur untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	di seputaran dalam kaum	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi petokoan di seputaran Dalam Kaum untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	4	PKL	di seputaran dalam kaum	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi pertokoan di seputaran Dalam Kaum untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 1548 smp/jam	Volume : 1911 smp/jam
4	JL. Kopo (Peta s/d Pasir Koja)			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem Angkutan Umum	Depan Rs.Borromeus, Babaka Tarogong	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Depan Rs Borromeus Babakan Tarogonh (tempat ngetem Cibaduyut-Karang Setra, Ciroyom-Cikudapateuh, Elang-Gd.Bage- Ujung Berung, Abdul Muis-Elang)) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Parkir On Street	persimpangan TL kopo	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi persimpangan Tol Kopo untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	5	Aksesibilitas Gang / Jalan	JL. babakan ciparay	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi JL. babakan ciparay untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	Mall Festival City Link	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Mall Festival City Link untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	7	PKL	JL. Peta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jl. Peta (Pedagang makanan ringan) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	8	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 2551smp/jam	Volume : 2866 smp/jam

5	JL. Mochamad Toha			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Parkir On street	Didepan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Barat	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Didepan Badan Pemeriksa Keuangan RI perwakilan Jawa Barat untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	APILL Persimpangan	Sp Jalan Peta- Sp Soekarno Hatta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Sp Jalan Peta- Sp Soekarno Hatta untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	U Turn	jl. Mekarwangi	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jl. Mekarwangi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	4	Aksesibilitas Gang / Jalan	jl. Mekarwangi	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jl. Mekarwangi untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	toko HPL taco	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Toko HPL Taco untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	Pasar tumpah	Di Dekat Simpang Soekarno Hatta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi di dekat Simpang Soekarno Hatta untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	7	PKL	Disepanjang Jalan Moh Tohha	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Disepanjang Jalan Moh Tohha (pedagang makanan ringan) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
8	Banjir / Genangan	TOL toha	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi pintu masuk Tol Moh Tohha (pedagang makanan ringan) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	
9	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 1770 smp/jam	Volume : 2107 smp/jam	
6	JL. Pahlawan			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem angkutan umum	Depan makam pahlawan dan diperempatan pahlawan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Depan makam pahlawan dan diperempatan pahlawan (tempat ngetem Abdul muis- Caheum via Aceh, Bumi Panyileukan-Sekemirung, Abdul Muis-Caheum via Binong, Sadang Serang-Ciroyom, Pasar Induk Caringin-Dago, Cicaheum-Ledeng) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Penyebrang jalan / Gerakan pejalan kaki	jl. Pahlawan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jl. Pahlawan untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	APILL Persimpangan	Jl Pahlawan - Jl Surapati	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jl. Pahlawan – Jl. Surapati untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
4	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	griya pahlawan	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Griya Pahlawan untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	
5	Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Jln Pahlawan - Jln Sukasenang	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Jln Pahlawan - Jln Sukasenang untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	

6	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 1787 smp/jam	Volume 2234 smp/jam	
7	JL. Pasirkoja			
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Perhubungan			
	1	Ngetem angkutan umum	Di Simpang Lima Pasir Koja (Depan Pasar Sukahaji)	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi di Simpang Lima Pasir Koja (Depan Pasar Sukahaji) (tempat ngetem Elang-Gd. Bage, Ujung Berung, Ciroyom-Cikudapateuh, Abdul Muis- Elang, Cibaduyut-Karang Setra) untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	2	Parkir On street	Disepanjang Jalan PasirKoja	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi disepanjang Jalan PasirKoja untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	3	U Turn	Disepanjang Jalan PasirKoja	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi disepanjang Jalan PasirKoja untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	Aspek penyebab kemacetan : Uruasan Non Perhubungan			
	4	Aksesibilitas Gang / Jalan	Gg. Irigasi, JL. Kebon Kawung	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Gg. Irigasi, JL. Kebon Kawung untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	5	Aksesibilitas keluar masuk area pertokoan / pendidikan	Griya Sumbersari Paskal ,Hyper Square	Menempatkan Anggota PPL di sekitar lokasi Griya Sumbersari Paskal ,Hyper Square untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	6	PKL	Sepanjang jalan Pasir Kaliki	Menempatkan Anggota PPL di sekitar Sepanjang jalan Pasir Kaliki untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
	7	Banjir / Genangan	jl. Terusan pasir koja	Menempatkan Anggota PPL di sekitar jl. Terusan pasir koja untuk melakukan penghimbauan dan penertiban
8	Kualitas / kondisi infrastruktur jalan	Pasirkoja - Soetta	Menempatkan Anggota PPL di sekitar Pasirkoja - Soetta untuk melakukan penghimbauan dan penertiban	
9	Volume lalu lintas yang tinggi	Volume : 2309 smp/jam	Volume : 2594 smp/jam	

Pada tahun 2020 hasil identifikasi terhadap 115 ruas jalan di kota Bandung didapatkan hasil bahwa 28 ruas jalan masih dalam kategori macet (kondisi macet mempunyai kriteria kecepatan rata-rata tempuh < 21 km/jam dan V/C Ratio > 0,8). Pada tahun 2022 direncanakan untuk mengatasi 7 ruas jalan yaitu Dalem Kaum, Asia Afrika, Jl. Kopo (Peta - Pasir Koja), Jl. Pahlawan, Jl. Kopo (Sp.Jl.Peta-Bts.Kota/Kab.Bandung), Jl. Mochamad Toha dan Jl. Pasirkoja. Dari survey di lapangan didapatkan hasil sebagai berikut :

NO	RUAS	V/C RATIO		KECEPATAN <21	
		SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
a	b	c	d	e	f
1	Dalem Kaum	0,81	0,40	17,12	30,57
2	Asia Afrika	0,81	0,46	16,23	33,7
3	Jl. Kopo (Peta - Pasir Koja)	0,89	0,67	19,12	28,26
4	Jl. Pahlawan	0,80	0,54	20,11	24,65
5	Jl. Kopo (Sp.Jl.Peta-Bts.Kota/Kab.Bandung)	0,89	0,77	15,63	25,63
6	Jl. Mochamad Toha	0,84	0,67	16,00	26,06
7	Jl. Pasirkoja	0,87	0,78	15,94	28,36

Dari ke tujuh ruas jalan tersebut dapat dilihat bahwa kecepatan rata-rata tempuhnya di atas 21 km/jam dan V/C rasionya di bawah 0,8 sehingga dapat disimpulkan bahwa ke tujuh ruas jalan tersebut dapat dikategorikan tidak macet. Dengan bertambahnya ruas jalan dalam kategori tidak macet LoS minimal C maka ruas jalan dalam kategori macet menjadi berkurang dari semula 24 ruas jalan (20,78%) menjadi tinggal 17 ruas jalan (14,78%).

Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2023 maka capaian kinerja pada tahun 2022 baru mencapai 57,89% (kondisi eksisting tahun 2020 sebesar 24,35% akan diturunkan menjadi 7,83% pada akhir tahun RPJMD 2023, capaian di 2022 sebesar 14,78%).

FORMULASI PENGUKURAN

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Jumlah ruas jalan kategori macet}}{\text{Jumlah ruas jalan total}} \times 100\%$$

$$x = \frac{17}{115} \times 100\% = 14,78\%$$

Faktor Penghambat : Kurang disiplinnya pengguna jalan dalam menaati peraturan lalu lintas

Faktor Pendukung : Adanya kerjasama yang baik antar stake holder

Solusi : Memberikan edukasi melalui berbagai media massa agar tetap mematuhi aturan lalu lintas

1. Presentase Penurunan Kemacetan

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Tabel 2.6

Drainase Lingkungan di Jl. Aki Padma Utara (Gang Bapa Omay, Gang Bapa Maja) RT. 04 RW. 06 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay



Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan melaksanakan fasilitasi kebutuhan hunian bagi masyarakat

kurang mampu serta mengupayakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan nyaman.

Pada tahun 2019 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 4,28% dari target 4,55%. Pada tahun 2020 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,94% dari target 3,96%. Pada tahun 2021 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,79% dari target 2,80%. Pada tahun 2022 tercapai persentase luasan kawasan kumuh sebesar 2,32% dari target 2,76%.

Persentase luasan kawasan kumuh dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

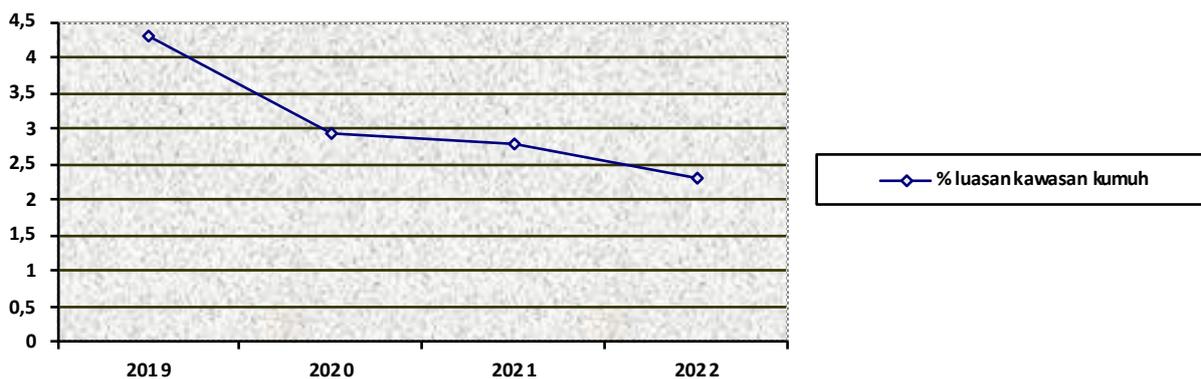
$$\text{Persentase luasan kawasan kumuh} = \frac{\text{Luas permukiman kumuh di Kota Bandung}}{\text{Luas wilayah Kota Bandung}} \times 100\%$$

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penghitungan dan Penetapan Luasan Kumuh tanggal 9 Desember 2022, diperoleh sisa luas permukiman kumuh seluas 389,15 Ha. Dengan luas Kota Bandung 16.729,65 Ha diperoleh persentase luasan kawasan kumuh sekitar 2,32%.

Pengukuran kawasan kumuh meliputi 7 (tujuh) aspek sebagai berikut :

1. Tersedianya proteksi kebakaran/bencana
2. Terpenuhinya kuantitas dan kualitas bangunan
3. Terpenuhinya kualitas jalan lingkungan
4. Terpenuhinya kualitas drainase lingkungan
5. Tersedianya pengolahan air limbah rumah tangga
6. Tersedianya cakupan layanan air minum
7. Terlaksananya pengelolaan sampah

Perubahan persentase luasan kawasan kumuh dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat terlihat pada grafik di bawah ini :



Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman kumuh adalah sebagai berikut :

1. Sinergitas pembiayaan pembangunan pusat dan daerah
2. Penataan Kawasan Kumuh perkotaan melalui penyediaan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat adalah terkendala status lahan yang bukan aset Pemerintah Kota.

Rekomendasi untuk pencapaian kinerja berkurangnya luas kawasan permukiman

Capaian cakupan layanan air bersih sampai tahun 2021 tercapai sebesar 82,19% dari target 81%, dimana DPKP bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 42.783 SR dari jumlah penduduk 2.518.260 jiwa sedangkan sisanya merupakan kewenangan Perumda Tirtawening.

Capaian cakupan layanan air bersih sampai tahun 2022 tercapai sebesar 85,14% dari target 82%, dimana DPKP bertanggung jawab atas pengelolaan non perpipaan dengan jumlah yang terlayani sebanyak 49.883 SR dari jumlah penduduk 2.530.448 jiwa sedangkan sisanya merupakan kewenangan Perumda Tirtawening.

Pada tahun 2022 telah terlaksana sambungan non perpipaan sebanyak 7100 SR pada 57 lokasi sebagai berikut :

1. Kantor Kelurahan Margasari Jl. Cipagalo Girang No. 9 Kec. Buah Batu
2. RT 02 RW 04 Kel. Cisaranten Bina Harapan Kecamatan Arcamanik
3. Jalan H. Basuki III RT. 4 RW. 10 Kel. Binong Kec. Batununggal
4. Jalan Jamaras RT. 04 / RT. 05 RW. 01 Kel. Jatihandap Kec. Mandalajati
5. Jl. Penyus No. 9 RT. 09 RW. 07 Kel. Turangga Kec. Malabar
6. Jalan Caringin No. 103 (Kantor DPKP) Kel. Babakan Ciparay Kec. Babakan Ciparay
7. Jl. Sindanglaya RT. 04 RW. 14 Kel. Pasir Impun Kec. Mandalajati
8. Gang Kartadinata RT. 03 RW. 14 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu
9. Masjid Ash Siddiq Jl. Karasak Utara I/III RW 06 Kel. Karasak Kec. Astana Anyar
10. Kp Mande RT. 06 RW. 05 Kel. Karang Pamulang Kec. Mandalajati
11. Taman RW. 09, RT. 02 RW. 09 Kel. Cisurupan Kec. Cibiru
12. Masjid Al Umariyyah Jl. Caringin No. 26 RT. 06 RW. 03 Kel. Kopo Kec. Bojongloa Kaler
13. Jalan Cirangrang Timur RT. 04 RW. 02 Kel. Cirangrang Kec. Babakan Ciparay
14. Masjid Al Faraz RT. 01 RW. 04 Kel. Pasirjati Kec. Ujungberung
15. Jl. Cibolerang Kp. Pangkalan RT 3 RW 6 Kel. Margahayu Utara Kec. Babakan Ciparay
16. Masjid Baitul Qudus Jl. Moh. Toha Gang. H. Mukti RT. 01 RW. 03 Kel. Karasak Kec. Astana Anyar
17. Masjid Nurul Iman Jl. Merkuri Timur No. 7 Kel. Sekejati Kec. Buah Batu
18. Taman Lembu Jalan Lembu RW. 10 Kel. Malabar Kec. Lengkong
19. Kantor Kecamatan Bandung kulon, Kel. Caringin, Kec. Bandung Kulon
20. Jl. Pasir Suci (Masjid) RT. 01 RW. 08 Ke. Cipadung Wetan Kec. Rancasari
21. Jalan Babakan Tarogong Kantor Kelurahan Babakan Tarogong, Bojongloa Kaler, Kota Bandung
22. SDN 025 Cikutra Kel. Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler
23. Jalan Kp. Sumur Sari RT. 03 RW. 03 Kel. Cigondewah Rahayu Kec. Bandung Kulon
24. SDN 064 Padasuka kel. Pasirlayang, Kec. Cibeunying kidul
25. SDN 249 Astana Anyar, Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar
26. Kantor Kelurahan Kopo, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler
27. Gang. Maadi RT. 07 RW. 21 Kel. Sadang Serang Kec. Coblong
28. SDN 158 Babakan Sari, Kel. Babakan Sari, Kec. Kiaracandong
29. Jl. Pangaritan RT. 01 RW. 03 Kel. Cipadung Wetan, Kec. Cibiru
30. Jl. Cikajang 18 (Mesjid Al-Hikmah), Kel. Antapani Tengah, Kec. Antapani
31. Jl. Srigunting 8 & 9 (Taman RW. 07 Maleber), Kel. Maleber, Kec. Andir
32. SMPN 38 Bandung, Kel. Cibaduyut Kidul, Bojongloa Kidul
33. Masjid Al-Kahfi, Komp. Pasir Impun Valey RT. 05/RW. 11, Kel. Karang Pamulang, Kec. Mandalajati
34. Gang. Sariwangi Masjid Miftahul RT. 08 RW. 04, Kel. Situsaeur, Kec. Bojongloa Kidul
35. Kantor Kelurahan Burangrang, Kel. Burangrang, Kec. Lengkong

36. Masjid Al-Furqon RT. 01 RW. 01, Kel. Sukaasih, Kec. Bojongloa Kaler
37. Masjid Nurul Huda RT. 04 RW. 01, Kel. Wates, Kec. Bandung Kidul
38. RT. 01 RW. 08 Kel. Kebon Gedang Kec. Batununggal
39. SDN 063 Kebon Gedang, Kel. Maleer, Kec. Batununggal
40. Masjid Asy-Syarif (Gang. Lapang) RT. 05 Rw. 04, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler
41. Masjid Nurul Iman Jl. Babakan Betawi RW. 08, Kel. Pasir Wangi Kec. Ujung Berung
42. Jl. Betok (Gedung Serbaguna RW. 07) RT. 06 RW. 07 Kel. Burangrang Kec. Lengkong
43. Masjid jami ahmad Hidayah, Jl. Ciburuy RT. 03 RW. 06 Kel. Ciseureuh Kec. Regol
44. SDN 126 Babakan, Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay
45. RT. 04 RW. 09 Kel. Ciumbuleuit Kec. Cidadap
46. RT. 01 RW. 10 Kel. Cijerah Kec. Bandung Kidul
47. Masjid Ar-Rahman Gang. Sukarma RT. 03 RW. 03 Kel. Babakan Asih Kec. Bojongloa Kaler
48. Jl. H. Mulya RT. 04 RW. 08 Kel. Gedebage Kec. Cisaranten Kidul
49. Masjid Al-Hidayah Jl. Lebak RT. 05 RW. 08 Kel. Kebonwaru Kec. Batununggal
50. Masjid Miftahul Jannnah RT. 02 RW. 02 Kel. Babakan Penghulu Kec. Cinambo
51. Yayasan Nurul Inayah, Jl. H. Bardan III RT. 02 RW. 10 Kel. Kujangsari Kec. Bandung kidul
52. Masjid Al-Huda RT. 07 RW. 05 Kel. Cipamokolan Kec. Rancasari
53. Masjid Anusri RT. 07 RW. 06 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay
54. Taman RW. 12 Kel. Sukamaju Kec. Cibeunying Kidul
55. RT. 05 RW. 16 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik
56. SDN 059 Cirangrang Kel. Cirangrang Kec. Babakan Ciparay
57. SDN 142 Dwikora, Jl. Inhoftank No. 16 Kel. Pelindung Hewan Kec. Astana Anyar

Cakupan layanan air bersih dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Cakupan layanan air bersih} = \frac{\text{Jumlah Sambungan Rumah (SR)}}{\text{Jumlah jiwa}} \times 100\%$$

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja cakupan layanan air bersih adalah sinergitas pembiayaan pembangunan pusat dan daerah.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja adalah sulitnya mencari sumber air baku dan penyediaan air bersih non perpipaan terkendala ketersediaan lahan milik Pemerintah.

Agar pencapaian sasaran dapat terwujud, diperlukan perbaikan kinerja sebagai solusi/rekomendasi untuk tahun yang akan datang; yaitu melakukan inventarisasi titik lokasi yang akan dibangun dalam penyediaan sanitasi dan air bersih.

1. Melakukan inventarisasi titik lokasi yang akan dibangun dalam penyediaan sanitasi dan air bersih
2. Mencari terobosan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bandung terkait lahan-lahan yang statusnya belum menjadi aset Pemerintah Kota agar pekerjaan tetap dapat dilaksanakan

4. Presentase Penurunan Titik Genangan

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, genangan adalah terendahnya suatu kawasan perkotaan lebih dari 30 cm selama lebih

dari 2 jam. Genangan yang dimaksud adalah air hujan yang terperangkap di suatu kawasan, yang tidak bisa mengalir ke badan air terdekat.

Tabel 2.7
Pemeliharaan Sungai



Jadi bukan banjir yang merupakan peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai. Semakin rendah nilai persentase penurunan titik genangan, maka semakin rendah jumlah titik genangan yang terjadi. Berdasarkan Perubahan RPJMD 2018-2023, kriteria keberhasilan yang diukur adalah tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan waktu surut tidak lebih dari 60 menit.

Tabel 2.8
Pemeliharaan Saluran Drainase



Penentuan kinerja persentase penurunan titik genangan diukur berdasarkan sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan yang sudah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD 2018-2023, yaitu tinggi genangan tidak lebih dari 30 cm dan durasi genangan tidak lebih dari 60 menit. Pada Tahun 2022 ditargetkan sisa titik genangan sebanyak 34 titik atau 50%.

Tabel 2.9
Pembuatan Sumur Resapan



Dari hasil pengukuran, sisa titik genangan yang belum memenuhi kriteria keberhasilan sebanyak 10 titik atau sebesar 14,71% dari jumlah titik genangan yang ditetapkan yakni 68 titik.

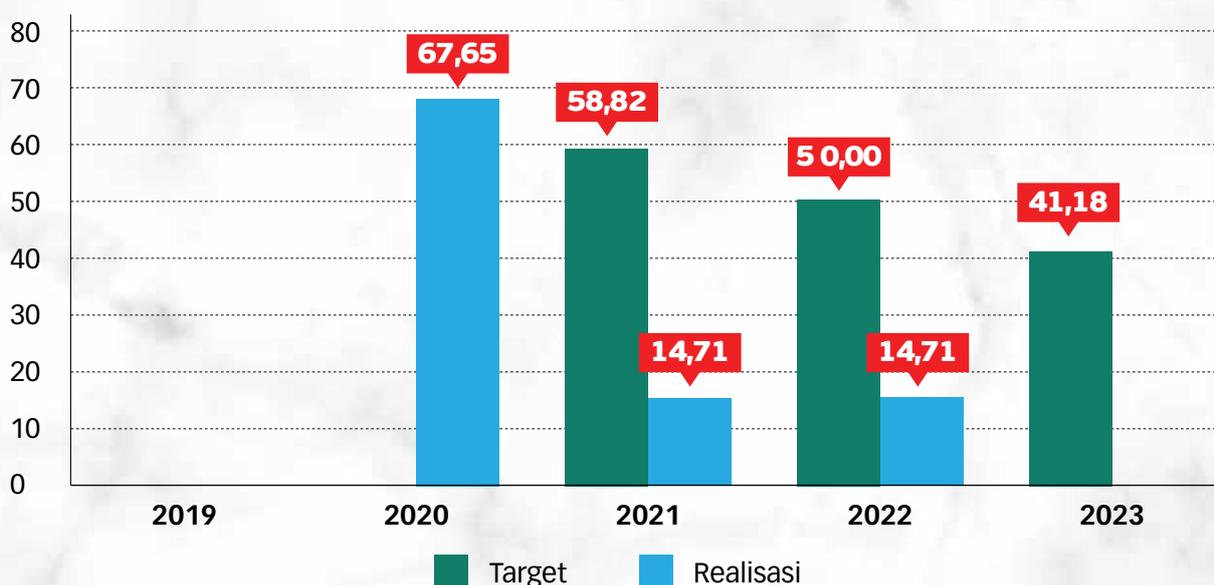
Tabel 2.44
Data Penurunan Titik Genangan Tahun 2022

NO	Wilayah UPT	Lokasi Genangan	2021			Perubahan			Memenuhi Kriteria			
			Tinggi Maks (cm)	Waktu Surut Maks (Menit)	Frekuensi	Tinggi Maks (cm)	Waktu Surut Maks (Menit)	Frekuensi				
1.	Bojonagara	Jl. Layang Cimindi / Gunung Batu (Sal. Ciwarga)	60	60	1	30	120	1	TURUN	NAIK	-	TIDAK
2.	Gedebage	Pasar Induk Gedebage Sal. Cipamulihan	50	90	13	30	180	12	TURUN	NAIK	TURUN	TIDAK
3.	Gedebage	Sal. Rancabolang - Pasantren Jl. Rancabolang	50	70	9	40	120	4	TURUN	NAIK	TURUN	TIDAK
4.	Gedebage	Perumahan Bumi Panyileukan (Sal. Cisolatri)	25	33	3	50	120	2	NAIK	NAIK	TURUN	TIDAK
5.	Tegalega	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta & Jl. Pasirkoja ke arah gerbang Tol	30	60	15	40	180	28	NAIK	NAIK	NAIK	TIDAK
6.	Tegalega	Jl. Kopo - Sal. Citarip	50	150	29	50	200	28	-	NAIK	TURUN	TIDAK
7.	Tegalega	Jl. Cibaduyut - Jl. Tol	40	70	21	30	120	13	TURUN	NAIK	TURUN	TIDAK
8.	Tegalega	Jl. Pagarsih - S. Citepus	20	80	1	40	150	2	NAIK	NAIK	NAIK	TIDAK
9.	Ujungberung	Persimpangan Jl. Soekarno Hatta - Jl. Rumah Sakit	30	53	13	30	180	9	-	NAIK	TURUN	TIDAK
10.	Ujungberung	Jl. A.H. NasutionS. Cikiley	30	60	5	50	120	8	NAIK	NAIK	NAIK	TIDAK
1.	Bojonagara	Jl. Raya Sudirman(Sal. Irigasi Leuwilimus I & Sal. Pembuang)	30	54	6	25	50	17	TURUN	TURUN	NAIK	MEMENUHI
2.	Bojonagara	S. Cicendo Jl. Kebon Kawung	5	-	1	15	40	2	NAIK	NAIK	NAIK	MEMENUHI
3.	Bojonagara	Sal. Cilimus Jl. Sukajadi	20	35	3	10	-	2	TURUN	TURUN	TURUN	MEMENUHI
4.	Bojonagara	Jl. Sukamulya - S. Cipedes	-	-	-	10	-	1	NAIK	-	NAIK	MEMENUHI

5.	Cibeunying	Jl.Cikutra Barat - Jl. Pahlawan (sal. Cikutra barat)	25	35	6	30	45	7	NAIK	NAIK	NAIK	MEMENUHI
6.	Cibeunying	Sal. Cikapayang - Jl. Supratman - Cisokan	20	30	4	15	50	1	TURUN	NAIK	TURUN	MEMENUHI
7.	Gedebage	Sal. Ciganitri Jl. Ciwastra	15	25	1	30	60	1	NAIK	NAIK	-	MEMENUHI
8.	Karees	Fly Over Kiaracondong / Sal. Cibeunying	-	-	-	15	-	7	NAIK	-	NAIK	MEMENUHI
9.	Karees	Jl.Moch. Toha - Sal. Cipalasari / Sal. Ciateul	25	50	5	20	50	7	TURUN	-	NAIK	MEMENUHI
10.	Karees	S. Cikapundung Kolot - belakang TSM	-	-	-	25	-	1	NAIK	-	NAIK	MEMENUHI
11.	Karees	Simpang Jl. Jakarta - Jl. Kiaracondong	20	-	1	10	-	1	TURUN	-	-	MEMENUHI
12.	Tegalega	Terminal Leuwipanjang	20	60	4	25	60	12	NAIK	-	NAIK	MEMENUHI
13.	Tegalega	S. Ciroyom Jl. Kopo	30	60	5	30	60	6	-	-	NAIK	MEMENUHI
14.	Tegalega	Jl. Caringin Sal. Leuwi Limus I	50	40	5	20	-	2	TURUN	TURUN	TURUN	MEMENUHI
15.	Ujungberung	Jl. Cibodas - antapani	20	30	1	20	-	1	-	TURUN	-	MEMENUHI
1.	Bojonegara	Jl. Terusan Pasteur - S. Cianting (depan Hotel Topaz & BTC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
2.	Bojonegara	Jl. Cipaganti - Jl. Setiabudi / Sal. Cikalintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
3.	Bojonegara	Jalan Cibogo / Sal. Cibogo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
4.	Bojonegara	Jl. Prof. Eickman - Sal. Leuwilimus I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
5.	Bojonegara	S. Citepus Jl. Arjuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
6.	Bojonegara	Jl. Sukahaji - Jl. Gegerkalong	10	-	1	-	-	-	TURUN	-	TURUN	SELESAI
7.	Bojonegara	Pasar SederhanaSal. Cikalintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
8.	Bojonegara	SMA 9 - Lapang Husen Sal. Cianting	20	30	2	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
9.	Bojonegara	Persimpangan Jl. Pa-sirkoja - Sal. Cilimus I	30	60	4	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
10.	Bojonegara	Fly Over Jl. Cimindi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
11.	Cibeunying	Jalan Naripan / Sal. Cikapayang	10	-	1	-	-	-	TURUN	-	TURUN	SELESAI
12.	Cibeunying	Pusdai Jl. Suci / Sal. Lebak Larang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
13.	Cibeunying	Sal. Cikapayang - Gasibu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
14.	Cibeunying	S. Cibunut - Barangsiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
15.	Cibeunying	Sal. Lebak larang - UNPAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
16.	Cibeunying	Sal. Ciborete - Alamanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
17.	Cibeunying	Jl. Sukamaju / Jl. Cikaso S. Cibeunying	30	45	1	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
18.	Cibeunying	Sal. Ciharalang - S. Cidurian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
19.	Cibeunying	Sal. Babakan DeseAntara Jl. A. Yani - Jl. Jakarta	40	60	3	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
20.	Cibeunying	Jl. Sumatra - SMPN 5 dan 2 (Sal. Melintas ke Jl. Jawa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
21.	Cibeunying	Jl. Stasiun Timur Kebon Jeruk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
22.	Cibeunying	Sal. Cikudapateuh - Jl. Kacapiring, Jl. Gudang Utara	40	60	1	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
23.	Cibeunying	Jl. Masuk FKOK UPI Sal. Ciparungpung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI

24.	Cibeunying	Sal. Crossing Jl. Soekarno Hatta - Sal. Cijagra (depan Hotel Lingga)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
25.	Cibeunying	S. Cikapundung Gg. Apandi Jl. Braga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
26.	Gedebage	Sal. Mercuri Jl. Tata Surya & Jl. Mercuri	20	-	1	-	-	-	TURUN	-	TURUN	SELESAI
27.	Gedebage	Sal. Drainase Jl. Komplek Santosa Asih	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
28.	Gedebage	S. Cipariuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
29.	Gedebage	Perumahan Riung Bandung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
30.	Karees	Jl. Windu - Jl. Galunggung - Seskoad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
31.	Karees	S. Cibunut - Pasar Kosambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
32.	Karees	Jl. Nilem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
33.	Karees	Terusan Jl. Kiaracondong - Jl. Soekarno Hatta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
34.	Tegalega	S. Cirangrang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
35.	Tegalega	Jl. Dian Molek - Sal. Cibuntu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
36.	Tegalega	S. Cibeureum - Cigondewah / Gempolsari / Sudiplak	40	50	1	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
37.	Tegalega	Sal. Irigasi Dungusema Jl. Moch. Toha	20	40	2	-	-	-	TURUN	TURUN	TURUN	SELESAI
38.	Ujungberung	S. Cijalupang - Leger Jalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
39.	Ujungberung	Jl. Cilengkrang II Sal. Cipalasari	10	-	1	-	-	-	TURUN	-	TURUN	SELESAI
40.	Ujungberung	Jl. Plered Sal. Antapani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
41.	Ujungberung	Jl. Purwakarta Sal. Ciparungpung	10	-	1	-	-	-	TURUN	-	TURUN	SELESAI
42.	Ujungberung	Jl. Ujung Beurung - Polresta Bandung Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI
43.	Ujungberung	S. Cipagalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SELESAI

Realisasi prosentase penurunan titik genangan sebesar 14,71% melebihi target rencana sebesar 50%, capaian kinerja dibandingkan target rencana sebesar 170,58%. Capaian Realisasi indikator ini pada Tahun 2022 sebesar 14,71% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 14,71% adalah 100,00%



Faktor pendukung pencapaian indikator “tingkat kemantapan jalan” antara lain adalah:

1. Telah berjalannya pemeliharaan rutin jalan dan trotoar melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh UPT OP Kewilayahan,
2. Telah berjalannya rehabilitasi jalan secara insidental yang dilaksanakan oleh UPT Produksi Campuran Aspal,
3. Telah berjalannya pengendalian mutu bahan konstruksi yang dilaksanakan oleh UPT Laboratorium Bahan Konstruksi.

Faktor penghambat indikator persentase penurunan titik genangan, antara lain adalah:

1. Kondisi curah hujan ekstrim yang menyebabkan kapasitas saluran tidak mampu menampung seluruh limpasan hujan
2. Masih tingginya praktik membuang sampah ke sungai/saluran, sehingga saluran mampat dan aliran air dari hulu ke hilir saluran terhambat
3. Masih adanya bangunan di sempadan sungai dan di atas badan saluran sehingga menghambat kelancaran normalisasi sungai/saluran
4. Berkurangnya daerah resapan air terutama di daerah hulu, sehingga menambah debit air limpasan hujan

Beberapa solusi yang dapat diupayakan dalam rangka mendukung tercapainya target kinerja “Persentase penurunan titik genangan” adalah sebagai berikut:

1. Segera menyusun Dokumen Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk acuan dalam membuat blue print / master plan drainase perkotaan
2. Meningkatkan upaya penanganan titik genangan dengan berbagai solusi yang bisa diambil, yakni: peningkatan kapasitas aliran sungai melalui pengerukan, pembangunan dan rehabilitasi tanggul sungai dan pembangunan rumah pompa; peningkatan kapasitas resapan melalui revitalisasi lahan di kawasan hulu dan pembangunan sumur-sumur resapan; peningkatan kapasitas parkir air melalui pembangunan kolam retensi; peningkatan kapasitas saluran drainase melalui pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase; peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung penurunan genangan melalui budaya membuang sampah pada tempatnya dan menyediakan resapan untuk mengurangi limpasan.



Sasaran 8 : Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan

Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan. Sasarannya berupa Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan. Untuk melihat capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke 4 RPJMD Kota Bandung 2018-2023, dapat dilihat pada indikator sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	-	-	-	-	-	-	5,98	20,68	345,82
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		-			-			345,82		

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023 Target Akhir Tahun RPJMD
		Target	Realisasi	%	Target
1	Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan	6,48	10,75	165,90%	6,69
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran		165,90%			

Sasaran Meningkatnya Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

Capaian indikator kinerja “Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan” dari target tahun 2022 yaitu 6,48 dengan realisasi sesuai dengan target yaitu 10,75 dengan persentase capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 165,90%. Realisasi tersebut dibandingkan tahun 2021 sebesar 20,68 mengalami penurunan sebesar 9,93. Bila dibandingkan dengan target tahun akhir RPJMD tahun 2023 sebesar 9,93 maka capaian kerjanya 160,69%.

1. Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan

Kinerja Misi 5 difokuskan pada partisipasi dan kolaborasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan infrastruktur Kota yang dibiayai dari Non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. Sumber-sumber tersebut antara lain APBN, APBD Provinsi, Kerjasama Daerah, KPBU, PINA, Obligasi Daerah, Tanggung Jawab Sosial, dan Lingkungan (TJSL), Sumbangan Pihak Ketiga dan Swadaya Masyarakat.

Pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, Tujuan dari Misi 5 adalah Terwujudnya Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan dengan target akhir pada Tahun 2023 adalah sebesar 6,69%, dengan formulasi pencapaian target dihitung dari 1 (satu) sasaran yaitu Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan.

Implementasi Kebijakan Strategis Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Pembangunan pada tahun 2022 dilaksanakan melalui 2 (dua) strategi yaitu Meningkatnya

Partisipasi Masyarakat dan Meningkatnya Inovasi

Capaian Kinerja Tujuan Misi 5 di Tahun 2022 adalah sebesar 141,82% dimana capaian pada sasaran realisasi Persentase Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan terhadap Pendapatan adalah sebesar 10,75% dari target 6,48%, atau mengalami penurunan sebesar 9,93 % dari realisasi tahun 2021 sebesar 20,68%, dengan akumulasi biaya Non-APBD Kota Bandung pada tahun 2022 sebesar Rp. 689.641.101.446,00 bila dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp6.415.745.415.059,39. Adapun rincian akumulasi biaya Non-APBD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46

Akumulasi Biaya Non-APBD Kota Bandung

	Kegiatan Non APBD	2022	Terkait Misi RPJMD
I Meningkatkan Partisipasi Masyarakat			
1	Partisipasi/Swadaya Masyarakat pada Program PIPPK	89.005.918.096	Misi 1, 2, 3 dan 4
2	Partisipasi/Swadaya Murni Masyarakat	124.395.274.549	Misi 1, 2, 3 dan 4
3	Partisipasi/Swadaya Masyarakat pada Program Rutilahu	7.588.619.600	Misi 1 dan 4
II Meningkatkan Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan			
1	TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga	17.254.538.786	Misi 1, 2, 3 dan 4
2	Kerja sama Daerah	9.725.575.250	Misi 5
3	Pembiayaan Proyek Strategis	5.692.520.328	Misi 4
4	Bantuan Sosial	339.443.200.000	Misi 3
Jumlah		Rp. 689.641.101.446	

Sumber: Bappelitbang, DPKP, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2023.

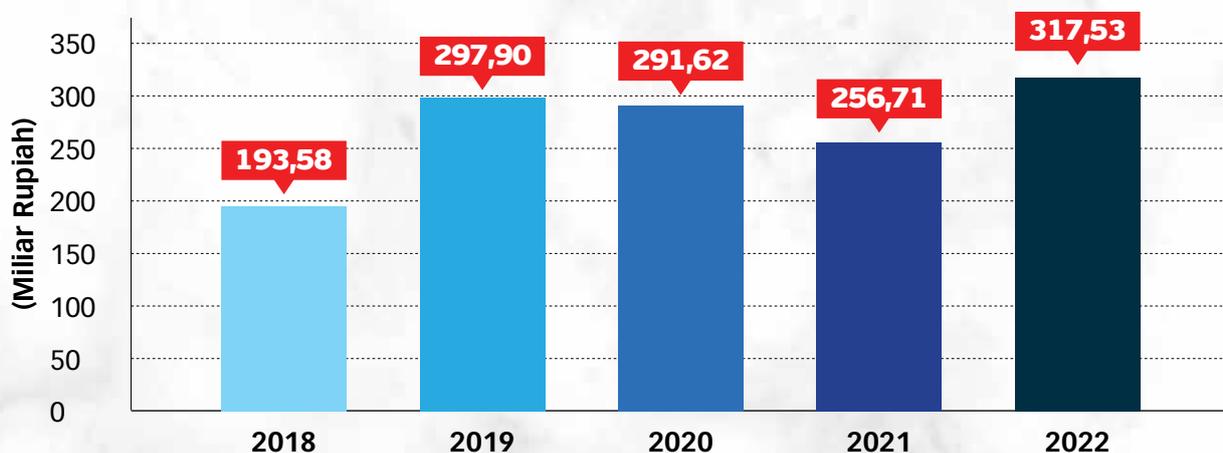
A. Partisipasi/Swadaya Masyarakat

Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Bandung dihitung dari partisipasi masyarakat dalam mendukung program PIPPK, partisipasi masyarakat (swadaya murni) dan partisipasi dalam program lainnya baik itu program Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2022 partisipasi masyarakat sebesar Rp.317,53 Miliar naik sebesar Rp.60,81 Miliar bila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp256,71 Miliar.

Grafik 2.26

Capaian Partisipasi Masyarakat Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)



Sumber: Bappelitbang, 2023 (diolah)

Implementasi Partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam pembangunan melalui Program Pemberdayaan Kewilayahan dengan pagu anggaran pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp213.745.953.718,00 dengan realisasi sebesar Rp199.011.726.717,00 atau penyerapan sebesar 93,11%.

Realisasi kegiatan melalui Program Pemberdayaan Kewilayahan terdiri dari 25 (dua puluh lima) jenis kegiatan infrastruktur, 26 (dua puluh enam) jenis kegiatan non infrastruktur dan 18 (delapan belas) jenis kegiatan fasilitasi kelembagaan masyarakat (pengadaan) yang menghasilkan Partisipasi swadaya masyarakat pada kegiatan PIPPK sebesar Rp.80.140.515.095.

Dengan adanya kegiatan PIPPK mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan di wilayahnya, berbagai partisipasi masyarakat untuk melakukan gotong-royong dalam rangka ikut serta dalam pembangunan di Kota Bandung, adapun data partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan PIPPK sebagai berikut:

Tabel 2.47

Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan PIPPK Per Kecamatan Tahun Anggaran 2022

NO	KECAMATAN	DATA REVISI LKPJ 2022
1	ANDIR	1.041.909.000
2	ANTAPANI	6.771.747.550
3	ARCAMANIK	5.627.182.528
4	ASTANA ANYAR	4.251.878.600
5	BABAKAN CIPARAY	2.540.074.500
6	BANDUNG KIDUL	6.800.953.877
7	BANDUNG KULON	3.669.501.000
8	BANDUNG WETAN	966.579.000
9	BATUNUNGGAL	5.296.925.486
10	BOJONGLOA KALER	442.560.000
11	BOJONGLOA KIDUL	1.560.450.000
12	BUAHBATU	1.683.225.000
13	CIBEUNYING KALER	2.479.202.048
14	CIBEUNYING KIDUL	2.135.007.500
15	CIBIRU	2.071.950.000
16	CICENDO	3.431.532.500
17	CIDADAP	578.650.000
18	CINAMBO	1.677.366.967
19	COBLONG	1.323.547.725
20	GEDEBAGE	1.751.072.500
21	KIARACONDONG	4.490.365.200
22	LENGKONG	1.293.636.025
23	MANDALAJATI	1.662.718.800
24	PANYILEUKAN	4.508.873.600
25	RANCASARI	2.037.615.559
26	REGOL	1.359.225.500
27	SUKAJADI	1.858.344.530
28	SUKASARI	3.000.670.500
29	SUMUR BANDUNG	2.343.874.600

30	UJUNGBERUNG	1.483.875.000
TOTAL		80.140.515.095

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023.



Selain berpartisipasi dalam swadaya program PIPPK, masyarakat juga melakukan partisipasi dalam berbagai kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan di Kota Bandung, pada tahun 2022, partisipasi masyarakat (swadaya murni) adalah sebesar Rp. 229.796.132.387,00.. Adapun rincian pada masing-masing jenis swadaya murni (Fisik dan Non Fisik) dan kegiatan (Kemasyarakatan, Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama dan Lingkungan) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48
Rekapitulasi Partisipasi Masyarakat (Swadaya Murni) Per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG			JUMLAH (Rp)
			Kemasyarakatan (Rp)	Ekonomi (Rp)	Sosbud & Agama (Rp)	
1	ANDIR	FISIK	621.603.000	36.000.000	1.722.900.000	2.620.705.000
		NON FISIK	637.980.000	70.850.000	866.950.784	2.074.054.609
TOTAL			1.259.583.000	106.850.000	2.589.850.784	4.694.759.609
2	ANTAPANI	FISIK	1.176.429.000	194.620.000	888.950.000	3.268.789.000
		NON FISIK	1.582.884.698	838.901.000	1.966.627.000	8.629.161.943
TOTAL			2.759.313.698	1.033.521.000	2.855.577.000	11.897.950.943
3	ARCAMANIK	FISIK	1.130.000.000	33.000.000	665.850.000	5.751.538.500
		NON FISIK	1.400.825.000	332.070.000	1.523.890.000	5.236.325.000
TOTAL			2.530.825.000	365.070.000	2.189.740.000	10.987.863.500
4	ASTANA ANYAR	FISIK	144.050.000	9.500.000	550.000.000	1.798.678.250
		NON FISIK	874.562.200	219.000.000	1.225.101.400	2.623.823.600
TOTAL			1.018.612.200	228.500.000	1.775.101.400	4.422.501.850
5	BABAKAN CIPARAY	FISIK	499.254.810	329.140.000	1.080.090.000	3.821.372.805
		NON FISIK	1.214.236.980	367.555.000	893.498.850	3.180.104.592
TOTAL			1.713.491.790	696.695.000	1.973.588.850	7.001.477.397
6	BANDUNG KIDUL	FISIK	239.770.300	85.459.500	696.788.500	1.714.647.425
		NON FISIK	1.801.616.167	557.721.920	1.933.240.365	5.086.306.452
TOTAL			2.041.386.467	643.181.420	2.630.028.865	6.800.953.877
7	BANDUNG KULON	FISIK	1.608.965.000	1.853.032.000	1.857.350.000	7.889.189.000
		NON FISIK	2.017.505.915	2.759.541.000	2.079.856.000	8.741.342.915
TOTAL			3.626.470.915	4.612.573.000	3.937.206.000	16.630.531.915
8	BANDUNG WETAN	FISIK	13.200.000	13.156.500	142.670.000	440.362.500
		NON FISIK	84.796.050	1.555.792.000	239.860.000	2.135.718.350
TOTAL			97.996.050	1.568.948.500	382.530.000	2.576.080.850

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG				JUMLAH (Rp)
			Kemasyarakatan (Rp)	Ekonomi (Rp)	Sosbud & Agama (Rp)	Lingkungan (Rp)	
9	BATUNUNGGAL	FISIK	442.200.000	10.000.000	268.000.000	882.390.611	1.602.590.611
		NON FISIK	3.223.457.124	603.999.540	5.630.328.644	665.851.221	10.123.636.529
	TOTAL		3.665.657.124	613.999.540	5.898.328.644	1.548.241.832	11.726.227.140
10	BOJONGLOA KALER	FISIK	26.594.500	6.796.500	20.480.000	392.240.000	446.111.000
		NON FISIK	605.887.000	287.924.500	468.155.000	98.772.000	1.460.738.500
	TOTAL		632.481.500	294.721.000	488.635.000	491.012.000	1.906.849.500
11	BOJONGLOA KIDUL	FISIK	785.300.000	43.500.000	410.363.000	675.750.000	1.914.913.000
		NON FISIK	877.235.000	89.300.000	346.230.500	475.750.500	1.788.516.000
	TOTAL		1.662.535.000	132.800.000	756.593.500	1.151.500.500	3.703.429.000
12	BUAHBATU	FISIK	105.750.000	30.000.000	105.005.000	1.949.400.000	2.190.155.000
		NON FISIK	2.711.332.000	176.450.000	952.355.000	592.593.750	4.432.730.750
	TOTAL		2.817.082.000	206.450.000	1.057.360.000	2.541.993.750	6.622.885.750
13	CIBEUNYING KALER	FISIK	420.893.680	173.499.150	596.795.115	272.390.364	1.463.578.309
		NON FISIK	1.040.010.840	196.929.150	2.773.037.912	596.214.320	4.606.192.222
	TOTAL		1.460.904.520	370.428.300	3.369.833.027	868.604.684	6.069.770.531
14	CIBEUNYING KIDUL	FISIK	329.381.500	449.254.900	403.283.000	712.130.000	1.894.049.400
		NON FISIK	567.091.500	335.443.200	1.085.257.000	692.812.000	2.680.603.700
	TOTAL		896.473.000	784.698.100	1.488.540.000	1.404.942.000	4.574.653.100
15	CIBIRU	FISIK	74.290.000	90.600.000	311.850.000	560.917.000	1.037.657.000
		NON FISIK	997.177.000	60.520.000	1.639.591.300	331.018.000	3.028.306.300
	TOTAL		1.071.467.000	151.120.000	1.951.441.300	891.935.000	4.065.963.300
16	CICENDO	FISIK	95.790.000	50.835.000	977.150.000	361.320.000	1.485.095.000
		NON FISIK	898.673.000	25.939.000	558.970.000	362.855.500	1.846.437.500
	TOTAL		994.463.000	76.774.000	1.536.120.000	724.175.500	3.331.532.500
17	CIDADAP	FISIK	30.000.000	-	-	60.300.000	90.300.000
		NON FISIK	203.650.000	40.000.000	163.700.000	104.200.000	511.550.000
	TOTAL		233.650.000	40.000.000	163.700.000	164.500.000	601.850.000

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG				JUMLAH (Rp)
			Kemasyarakatan (Rp)	Ekonomi (Rp)	Sosbud & Agama (Rp)	Lingkungan (Rp)	
18	CINAMBO	FISIK	199.863.140	4.773.166	53.250.000	410.831.292	668.717.598
		NON FISIK	70.528.598	86.006.750	201.969.400	173.924.030	532.428.778
	TOTAL		270.391.738	90.779.916	255.219.400	584.755.322	1.201.146.376
19	COBLONG	FISIK	737.317.841	365.448.725	297.547.500	712.164.975	2.112.479.041
		NON FISIK	937.075.182	231.580.097	354.690.160	890.840.511	2.414.185.950
	TOTAL		1.674.393.023	597.028.822	652.237.660	1.603.005.486	4.526.664.991
20	GEDEBAGE	FISIK	563.350.000	-	1.519.586.000	263.535.000	2.346.471.000
		NON FISIK	8.322.904.550	345.445.000	2.774.485.750	2.611.845.467	14.054.680.767
	TOTAL		8.886.254.550	345.445.000	4.294.071.750	2.875.380.467	16.401.151.767
21	KIARACONDONG	FISIK	1.385.810.000	39.200.000	676.560.000	773.959.400	2.875.529.400
		NON FISIK	1.686.456.800	1.294.170.800	9.281.012.750	1.015.319.700	13.276.960.050
	TOTAL		3.072.266.800	1.333.370.800	9.957.572.750	1.789.279.100	16.152.489.450
22	LENGKONG	FISIK	250.170.500	60.800.000	800.592.350	262.658.350	1.374.221.200
		NON FISIK	2.133.957.200	139.227.000	939.464.000	1.066.478.500	4.279.126.700
	TOTAL		2.384.127.700	200.027.000	1.740.056.350	1.329.136.850	5.653.347.900
23	MANDALAJATI	FISIK	600.669.985	351.078.830	561.129.642	582.801.149	2.095.679.606
		NON FISIK	395.480.673	236.134.040	493.489.080	322.519.520	1.447.623.313
	TOTAL		996.150.658	587.212.870	1.054.618.722	905.320.669	3.543.302.919
24	PANYILEUKAN	FISIK	442.412.000	224.836.800	1.458.060.000	420.991.000	2.546.299.800
		NON FISIK	1.318.500.300	120.664.800	956.470.000	429.050.500	2.824.685.600
	TOTAL		1.760.912.300	345.501.600	2.414.530.000	850.041.500	5.370.985.400
25	RANCASARI	FISIK	6.462.655.900	2.815.478.000	2.238.519.000	2.477.927.000	13.994.579.900
		NON FISIK	3.456.538.450	5.051.873.500	4.384.813.708	3.658.152.231	16.551.377.889
	TOTAL		9.919.194.350	7.867.351.500	6.623.332.708	6.136.079.231	30.545.957.789
26	REGOL	FISIK	238.507.000	6.245.000	1.011.811.000	1.132.343.000	2.388.906.000
		NON FISIK	2.298.374.000	37.048.450	3.445.365.449	2.506.268.100	8.287.055.999
	TOTAL		2.536.881.000	43.293.450	4.457.176.449	3.638.611.100	10.675.961.999

NO	KECAMATAN	FISIK/ NON FISIK	BIDANG				JUMLAH (Rp)
			Kemasyarakatan (Rp)	Ekonomi (Rp)	Sosbud & Agama (Rp)	Lingkungan (Rp)	
27	SUKAJADI	FISIK	2.924.814.784	28.811.000	1.445.943.000	539.976.000	4.939.544.784
		NON FISIK	1.929.185.900	2.414.930.000	1.706.119.900	819.630.750	6.869.866.550
	TOTAL		4.854.000.684	2.443.741.000	3.152.062.900	1.359.606.750	11.809.411.334
28	SUKASARI	FISIK	396.003.500	41.830.000	537.270.000	481.279.500	1.456.383.000
		NON FISIK	950.779.500	96.022.000	1.212.767.000	657.725.000	2.917.293.500
	TOTAL		1.346.783.000	137.852.000	1.750.037.000	1.139.004.500	4.373.676.500
29	SUMIUR BANDUNG	FISIK	68.700.000	-	92.070.000	31.800.000	192.570.000
		NON FISIK	1.063.638.000	420.750.000	1.228.830.000	443.139.000	3.156.357.000
	TOTAL		1.132.338.000	420.750.000	1.320.900.000	474.939.000	3.348.927.000
30	UJUNGBERUNG	FISIK	820.795.000	107.217.000	919.850.000	833.228.300	2.681.090.300
		NON FISIK	2.878.540.500	196.052.400	1.651.319.400	1.170.825.600	5.896.737.900
	TOTAL		3.699.335.500	303.269.400	2.571.169.400	2.004.053.900	8.577.828.200
	TOTAL KESELURUHAN		71.015.421.567	26.641.953.218	75.287.159.459	56.851.598.143	229.796.132.387

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, 2023.

Data partisipasi masyarakat pada Program Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas Perumahan pada kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp7.588.619.600,00. Adapun rincian pada masing-masing program, kegiatan serta lokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49

Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 Sumber Biaya APBD Kota Bandung

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Ciroyom	Andir	31	163.032.900	163.032.900
2	Dungus Cariang	Andir	17	103.566.900	103.566.900
3	Garuda	Andir	1	7.550.000	7.550.000
4	Kebon Jeruk	Andir	1	7.448.000	7.448.000
5	Maleber	Andir	5	33.246.400	33.246.400
6	Antapani Kulon	Antapani	12	65.500.000	65.500.000
7	Antapani Tengah	Antapani	24	56.075.000	56.075.000
8	Antapani Wetan	Antapani	2	48.278.000	48.278.000
9	Cisaranten Bina Harapan	Arcamanik	9	22.500.000	22.500.000
10	Cisaranten Endah	Arcamanik	23	49.000.000	49.000.000
11	Sukamiskin	Arcamanik	2	2.740.000	2.740.000
12	Cibadak	Astana Anyar	18	78.889.000	78.889.000
13	Karang Anyar	Astana Anyar	3	12.125.000	12.125.000
14	Karasak	Astana Anyar	15	34.340.000	34.340.000
15	Nyengseret	Astana Anyar	7	14.581.200	14.581.200
16	Panjunan	Astana Anyar	1	6.500.000	6.500.000
17	Pelindung Hewan	Astana Anyar	32	73.240.000	73.240.000
18	Babakan	Babakan Ciparay	12	34.545.000	34.545.000
19	Babakan Ciparay	Babakan Ciparay	5	6.640.000	6.640.000
20	Cirangrang	Babakan Ciparay	6	19.920.000	19.920.000
21	Margahayu Utara	Babakan Ciparay	2	3.320.000	3.320.000
22	Sukahaji	Babakan Ciparay	11	35.716.400	35.716.400
23	Wates	Bandung Kidul	22	174.600.000	174.600.000
24	Caringin	Bandung Kulon	7	23.000.000	23.000.000
25	Cigondewah Kaler	Bandung Kulon	23	206.675.000	206.675.000
26	Cigondewah Rahayu	Bandung Kulon	4	11.500.000	11.500.000
27	Cijerah	Bandung Kulon	20	129.223.800	129.223.800
28	Gempolsari	Bandung Kulon	11	46.356.000	46.356.000
29	Kujangsari	Bandung Kulon	12	48.000.000	48.000.000
30	Warung Muncang	Bandung Kulon	19	128.722.200	128.722.200
31	Tamansari	Bandung Wetan	3	5.678.800	5.678.800
32	Binong	Batununggal	15	39.835.000	39.835.000
33	Cibangkong	Batununggal	23	138.927.000	138.927.000
34	Gumuruh	Batununggal	13	82.035.000	82.035.000
35	Kaeapi ring	Batununggal	1	3.700.000	3.700.000
36	Kebon Gedang	Batununggal	12	43.233.000	43.233.000
37	Maleer	Batununggal	12	43.000.000	43.000.000
38	Samoja	Batununggal	8	33.000.000	33.000.000

39	Babakan Asih	Bojongloa Kaler	20	100.000.000	100.000.000
40	Babakan Tarogong	Bojongloa Kaler	12	51.000.000	51.000.000
41	Jamika	Bojongloa Kaler	19	103.350.000	103.350.000
42	Kopo	Bojongloa Kaler	68	204.690.000	204.690.000
43	Sukaasih	Bojongloa Kaler	62	366.823.200	366.823.200
44	Cibaduyut Wetan	Bojongloa Kidul	25	163.200.000	163.200.000
45	Mekarwangi	Bojongloa Kidul	23	144.730.700	144.730.700
46	Situsaeur	Bojongloa Kidul	6	77.500.000	77.500.000
47	Cijawura	Buah Batu	12	24.000.000	24.000.000
48	Margasari	Buah Batu	12	23.500.000	23.500.000
49	Cigadung	Cibeunying Kaler	4	8.000.000	8.000.000
50	Cihaurgeulis	Cibeunying Kaler	4	6.400.000	6.400.000
51	Sukaluyu	Cibeunying Kaler	4	84.600.000	84.600.000
52	Cicadas	Cibeunying Kidul	3	34.300.000	34.300.000
53	Cikutra	Cibeunying Kidul	11	40.000.000	40.000.000
54	Padasuka	Cibeunying Kidul	3	6.210.000	6.210.000
55	Sukamaju	Cibeunying Kidul	4	6.850.000	6.850.000
56	Sukapada	Cibeunying Kidul	2	4.430.000	4.430.000
57	Cisurupan	Cibiru	6	15.000.000	15.000.000
58	Palasari	Cibiru	4	11.500.000	11.500.000
59	Pasirbiru	Cibiru	6	26.760.000	26.760.000
60	Pajajaran	Cicendo	13	95.675.500	95.675.500
61	Ciumbuleuit	Cidadap	12	42.600.000	42.600.000
62	Hegarmanah	Cidadap	3	5.800.000	5.800.000
63	Babakan Penghulu	Cinambo	45	25.160.000	25.160.000
64	Pakemitan	Cinambo	3	10.500.000	10.500.000
65	Cipaganti	Coblong	15	29.100.000	29.100.000
66	Lebak Gede	Coblong	7	14.400.000	14.400.000
67	Sadang Serang	Coblong	6	12.000.000	12.000.000
68	Sekeloa	Coblong	3	6.726.900	6.726.900
69	Ciminrang	Gedebage	1	9.400.000	9.400.000
70	Cisaranten Kidul	Gedebage	23	51.500.000	51.500.000
71	Rancabolang	Gedebage	12	73.000.000	73.000.000
72	Rancanumpang	Gedebage	2	10.000.000	10.000.000
73	Babakan Surabaya	Kiaracondong	36	366.695.000	366.695.000
74	Cicaheum	Kiaracondong	6	19.900.000	19.900.000
75	Kebon Jayanti	Kiaracondong	7	16.500.000	16.500.000
76	Kebon Kangkung	Kiaracondong	7	51.000.000	51.000.000
77	Sukapura	Kiaracondong	3	10.875.000	10.875.000
78	Burangrang	Lengkong	1	3.525.400	3.525.400
79	Cikawao	Lengkong	1	5.590.000	5.590.000
80	Malabar	Lengkong	4	15.000.000	15.000.000
81	Jatihandap	Mandalajati	18	24.181.000	24.181.000
82	Karang Pamulang	Mandalajati	3	3.000.000	3.000.000
83	Pasir Impun	Mandalajati	12	13.034.000	13.034.000
84	Sindangjaya	Mandalajati	2	4.390.000	4.390.000
85	Cipadung Kulon	Panyileukan	12	29.800.000	29.800.000

86	Cipadung Wetan	Panyileukan	13	51.300.000	51.300.000
87	Derwati	Rancasari	2	6.800.000	6.800.000
88	Ciseureuh	Regol	1	4.200.000	4.200.000
89	Pasirluyu	Regol	16	74.500.000	74.500.000
90	Cipedes	Sukajadi	17	75.607.300	75.607.300
91	Pasteur	Sukajadi	3	2.400.000	2.400.000
92	Sukagalih	Sukajadi	12	20.250.000	20.250.000
93	Sukawarna	Sukajadi	1	8.500.000	8.500.000
94	Babakan Ciamis	Sumur Bandung	1	8.000.000	8.000.000
95	Braga	Sumur Bandung	3	6.200.000	6.200.000
96	Kebon Pisang	Sumur Bandung	1	821.000	821.000
97	Cigending	Ujungberung	10	25.600.000	25.600.000
98	Pasanggrahan	Ujungberung	16	71.150.000	71.150.000
99	Pasir Endah	Ujungberung	7	116.060.000	116.060.000
100	Pasirjati	Ujungberung	11	24.490.000	24.490.000
101	Pasirwangi	Ujungberung	22	21.348.000	21.348.000
Jumlah			1.147	5.005.662.600	5.005.662.600

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

Tabel 2.50
Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
Sumber Biaya APBD Provinsi Jawa Barat

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Babakan	Babakan Ciparay	20	385.500.000	385.500.000
2	Cirangrang	Babakan Ciparay	25	99.720.000	99.720.000
3	Margasuka	Babakan Ciparay	20	310.500.000	310.500.000
4	Sukahaji	Babakan Ciparay	25	225.613.000	225.613.000
5	Sukamulya	Cinambo	20	265.200.000	265.200.000
6	Manjahlega	Rancasari	20	186.124.000	186.124.000
7	Cipedes	Sukajadi	20	377.000.000	377.000.000
JUMLAH			150	1.849.657.000	1.849.657.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

Tabel 2.51
Rekapitulasi Partisipasi dan Swadaya Masyarakat
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung Tahun Anggaran 2022
Sumber Biaya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Kementerian PUPR

No.	Kelurahan	Kecamatan	Unit	Nilai (Rp)	Total (Rp)
1	Antapani Kulon	Antapani	2	13.000.000	13.000.000
2	Sukamiskin	Arcamanik	1	6.000.000	6.000.000
3	Batununggal	Bandung Kidul	1	3.500.000	3.500.000
4	Cibuntu	Bandung Kulon	1	3.500.000	3.500.000
5	Cijerah	Bandung Kulon	4	29.500.000	29.500.000
6	Binong	Batununggal	1	4.000.000	4.000.000
7	Gumuruh	Batununggal	2	19.500.000	19.500.000
8	Kebon Gedang	Batununggal	7	51.600.000	51.600.000

9	Jamika	Bojongloa Kaler	1	3.000.000	3.000.000
10	Sekejati	Buahbatu	5	35.700.000	35.700.000
11	Margasari	Buahbatu	1	55.000.000	55.000.000
12	Jatihandap	Mandalajati	1	7.000.000	7.000.000
13	Neglasari	Cibeunying Kaler	14	74.500.000	74.500.000
14	Sukaraja	Cicendo	1	8.000.000	8.000.000
15	Dago	Coblong	1	4.000.000	4.000.000
16	Babakan Surabaya	Kiaracondong	13	135.000.000	135.000.000
17	Kebon Kangkung	Kiaracondong	1	13.500.000	13.500.000
18	Sukapura	Kiaracondong	1	8.500.000	8.500.000
19	Derwati	Rancasari	6	71.500.000	71.500.000
20	Pasirwangi	Ujungberung	8	187.000.000	187.000.000
JUMLAH			72	733.300.000	733.300.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2023.

B. Inovasi Skema Pembiayaan Pembangunan

1) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan Sumbangan Pihak Ketiga

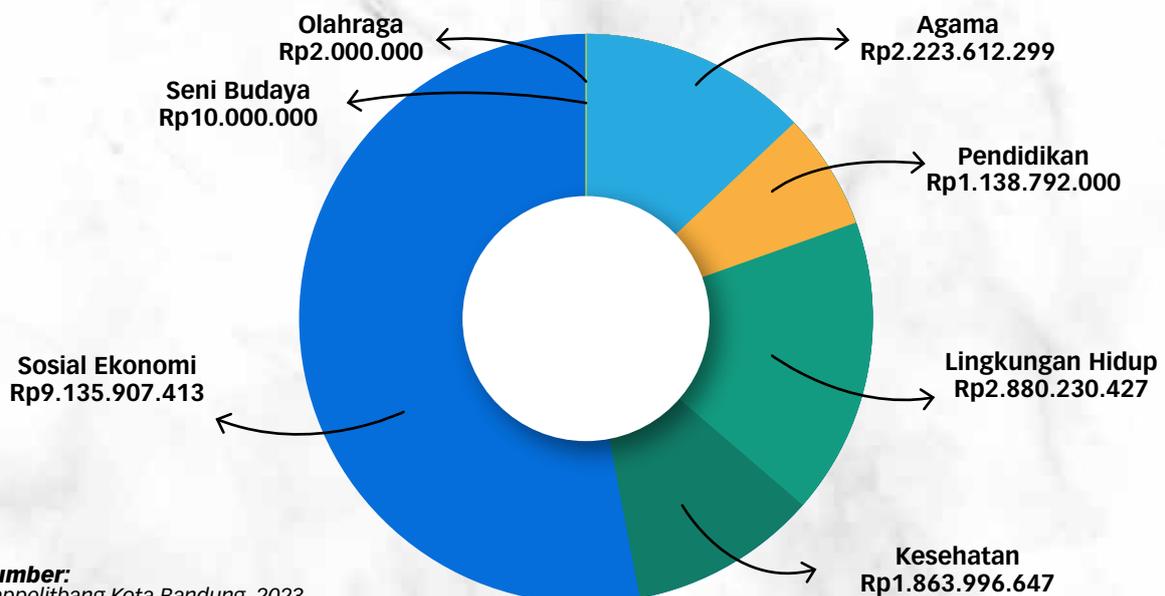
Adapun Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan sumbangan pihak ketiga diukur berdasarkan jumlah bidang Program TJSL yang meliputi 7 (tujuh) Program Bidang Prioritas yaitu: Lingkungan Hidup, Sosial Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Agama, Olah Raga, Seni dan Budaya.

Realisasi program bidang prioritas pembangunan yang dibiayai dari TJSL pada tahun 2022 sebesar 17.254.538.786,00 (Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang tersebar pada 7 (tujuh) Program Bidang Prioritas dengan rincian besaran sebagai berikut: Lingkungan Hidup sebesar Rp2,88 Miliar (16,69%), Sosial Ekonomi sebesar Rp9,13 Miliar (52,95%), Pendidikan sebesar Rp1,14 Miliar (6,01%), Kesehatan sebesar Rp1,86 Miliar (10,80%), Agama sebesar Rp2,22 Miliar (12,89%), Olahraga sebesar Rp2 Juta (0,01%), Seni dan Budaya sebesar Rp10 Juta (0,06%).

Perusahaan yang tercatat berkontribusi dalam pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebanyak 426 (empat ratus dua puluh enam).

Grafik 2.27

Rekapitulasi Besaran TJLS Tahun 2021 Per Bidang Prioritas



Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2023

Tabel 2.52
Rekapitulasi Data Program Kegiatan TJSL Perusahaan
Tahun 2022

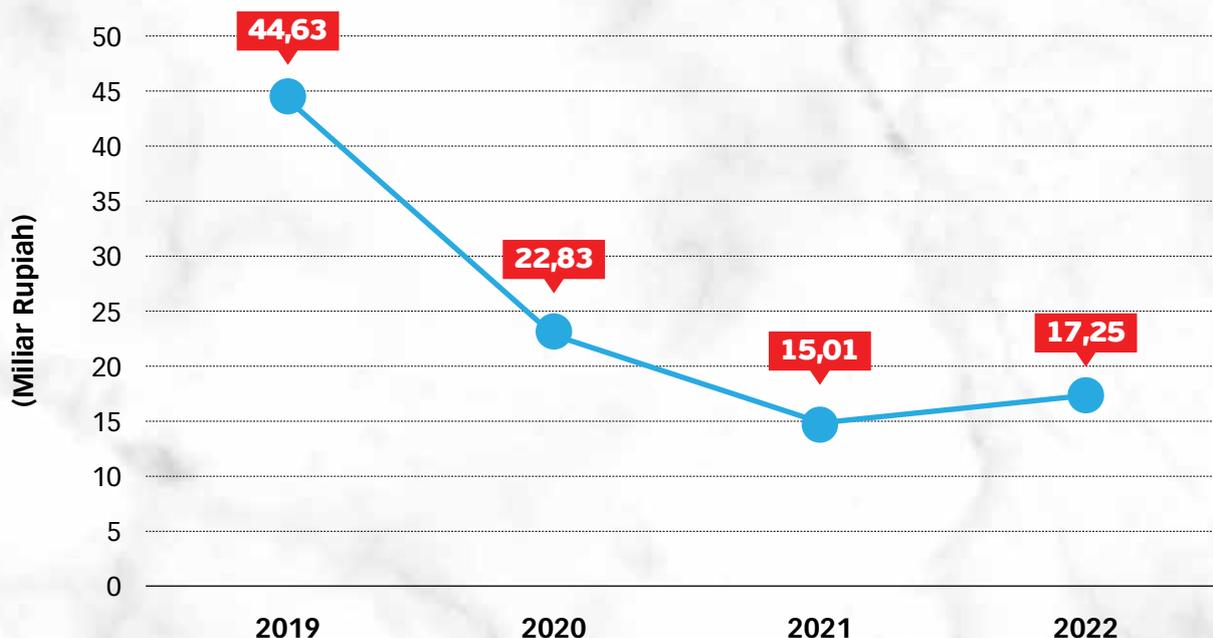
No	Bidang	Perkiraan Besaran	Persentase
1	Agama	Rp2.223.612.299	12,89
2	Pendidikan	Rp1.138.792.000	6,60
3	Lingkungan Hidup	Rp2.880.230.427	16,69
4	Kesehatan	Rp1.863.996.647	10,80
5	Sosial Ekonomi	Rp9.135.907.413	52,95
6	Olahraga	Rp2.000.000	0,01
7	Seni Budaya	Rp10.000.000	0,06
Total		Rp17.254.538.786	100

Sumber: Bappelitbang Kota Bandung, 2023

Terjadinya Pandemi Covid 19 menyebabkan stabilitasi perekonomian terganggu, termasuk di Kota Bandung, hal tersebut juga berdampak bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bandung. Bagi dunia usaha memprioritaskan produksi dan pegawai serta keberlangsungan perusahaan menjadi hal yang utama, sehingga hal tersebut berdampak pada banyaknya perusahaan di Kota Bandung yang melakukan relokasi anggaran kegiatan CSR/TJSL ke alokasi anggaran operasional perusahaan.

Pada tahun 2022, seiring dengan menurunnya angka Covid-19 di Kota Bandung hal tersebut berdampak pada membaiknya stabilitas perekonomian, hal tersebut juga terjadi di Kota Bandung. Dengan kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya besaran TJSL di Kota Bandung, kenaikan besaran TJSL pada tahun 2022 sebesar 2,24 Miliar bila dibandingkan dengan tahun 2021, hal tersebut tergambar pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.28
Realisasi Program TJLS Tahun 2019-2022
(Miliar Rupiah)



Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2023.



2) Skema Kerjasama dengan Swasta/Badan Usaha

Program/Agenda Prioritas Pembangunan Kota Bandung yang dibiayai dari Swasta dengan skema Kerjasama Daerah, KPBU, dan Penugasan BUMD atau Obligasi Daerah pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Untuk mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pada tahun 2021 Pemerintah Kota Bandung bersama dengan Pemerintah Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah melalui Proyek Pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Lengok Nangka. Pemerintah Kota Bandung juga terus berupaya menggagas proyek KPBU Rumah Susun Cisaranten Bina Harapan dan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada tahun 2023 progres dari proyek KPBU ini pada tahap transaksi.

Proyek Rusun Cisaranten Bina Harapan merupakan salah satu proyek KPBU yang menjadi pilot project pada sektor perumahan dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024 pada penyediaan 1 juta rumah susun. Kementerian PUPR selaku PJPK memperhatikan perumahan Rusun Cisaranten untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, Rusun Cisaranten direncanakan akan menggunakan skema KPBU berupa DBFMT (Design – Build – Finance – Maintain – Transfer) dengan rencana jumlah hunian sebanyak 1.879 unit. Pada tahun 2022 progres skema KPBU penyediaan Rusun Cisaranten Bina Harapan sudah pada tahap Penyusunan Kajian AMDAL, Persetujuan Teknis, dan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Belum terlaksananya mekanisme KPBU, Penerbitan Obligasi Daerah dan Pembiayaan Investasi Non-Anggaran (PINA) Pemerintah antara lain disebabkan karena mekanisme pembiayaan tersebut yang masih baru bagi Pemerintah Kota Bandung. Pada skema pembiayaan KPBU, Penerbitan Obligasi dan PINA banyaknya parameter yang harus dihitung pada dokumen proses perencanaan dan penyiapan mengakibatkan waktu pelaksanaannya menjadi lebih lama, serta pemahaman aparaturnya serta stakeholder lainnya

masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) semua stakeholder dalam rangka percepatan pelaksanaan mekanisme pembiayaan tersebut juga perlunya pendampingan dari Pemerintah Pusat serta stakeholder lainnya.

3) Fasilitas Kerjasama Daerah (Dalam Negeri dan Luar Negeri)

Dalam rangka peningkatan pembiayaan pembangunan dari Non-APBD dan optimalisasi kerjasama daerah dengan berbagai pihak, Pemerintah Kota Bandung pada tahun 2022 melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Lembaga Donor Swasta/Lembaga lainnya. Adapun besaran pembiayaan pembangunan melalui skema kerja sama yaitu sebesar . Rp.9.725.575.250 (Sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan rincian kegiatannya yaitu:

Tabel 2.53

Rekapitulasi Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta Melalui Fasilitas Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Tahun 2022

NO	MITRA PEMBERI BANTUAN	JENIS BANTUAN	NILAI BANTUAN	PERANGKAT DAERAH YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1	Bloomberg Philanthropies	Pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat	US \$ 75.000 (± Rp.1,072,196,250)	Dinkes, Bappelitbang, DPPKB, DKPP, Diskominfo, Disbudpar	Tindaklanjut kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Lembaga Asing
2	Pemerintah Kota Kawasaki, Jepang (Melalui pendanaan MOEJ)	Pelatihan dan Lokakarya Rencana Perbaikan Kualitas/Mutu Air Anak Sungai Citarum di Kota Bandung	Rp.1.519.011.000,-	Bappelitbang, DLH, DSDABM, DPKP, DISCIPT-ABINTAR	Tindaklanjut kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Kota Kawasaki
	<i>Capacity Building Project to Improve Wastewater Quality In Bandung City</i>	Pelatihan dan Lokakarya Rencana Perbaikan Kualitas/Mutu Air di Kota Bandung	Rp. 3.382.500.000,- Pelaksanaan kegiatan di Bulan Mei 2023-April2026 namun dokumen kerja sama Minute of Meeting (MoM) telah ditandatangani pada bulan Oktober 2022		
3	JHPIEGO	Program Keluarga Berencana Pasca Persalinan Pilihan	Total bantuan selama 4 tahun Keseluruhan US \$ 224,300 (± Rp.3.191.650.000), Tahun 2022 Rp.675.000.000	Dinkes, DPPKB	<ul style="list-style-type: none"> • Penerusan kerja sama Kemenkes RI dengan JHPIEGO • utk tahun 2020-2023
4	CISDI	Program penguatan Transformasi Layanan Kesehatan Primer yang Responsif, Inklusif dan Masyarakat Aktif Bermakna (PN PRIMA)	Rp. 2.576.868.000	Dinas Kesehatan	Tindaklanjut kerja sama antara CISDI dengan Pemerintah Daerah Kota Bandung
5	PT. SMI	Hibah bantuan teknis berupa studi kelayakan terkait tatakelola kawasan kumuh	Rp. 500.000.000	DPKP	-

TOTAL PEROLEHAN DARI PERAN SERTA PIHAK SWASTA	± Rp. 9.725.575.250,-	Terbilang : Sembilan milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah
--	------------------------------	---

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2023.

4) Pembiayaan Proyek Strategis dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Barat

Program Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities atau disingkat ISWMP adalah sebuah program peningkatan pengelolaan sampah nasional dengan target utama kota metropolitan dan skala regional. ISWMP diimplementasikan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, bekerja sama dengan Bank Dunia. Tujuan dari ISWMP di Kota Bandung adalah Memperoleh dukungan investasi pembangunan infrastruktur pengolahan sampah yang menerapkan prinsip sirkular ekonomi, kepastian keberlanjutan pemanfaatan hasil olahan sampah dan kepastian kinerja pengurangan sampah yang harus dicapai berdasarkan target RPJMD Tahun 2018-2023 dan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Tabel 2.54
Status Implementasi Infrastuktur ISWMP - Kota Bandung

Tahap	Lokasi	Tahap Pelaksanaan Kegiatan			Keterangan
		Penyiapan Rencana Teknis (FS dan DED)	Konstruksi TPS	Operasional dan Pemeliharaan	
Tahap I	(1) TPST Cicukang Holis	√	√	Uji coba opr Nov 2022 -Maret 2023 Pendampingan Operasional Mar – Des 2023	Pendampingan O/P oleh ISWMP selama 10 bulan sejak dilaksanakan operasional. Teknologi : Pengolahan Sampah menjadi Biomassa Coal Fermented (BCF) sebagai bahan alternatif pengganti Batubara pada Industri (tekstil).
Tahap II	(2) Ex-TPA Cicabe	√		Sept 2023	Target FS dan DED s/d Agustus 2022 Agustus – September 2022 Persiapan konsultasi public dan penyusunan Dokumen Lingkungan untuk Persetujuan Lingkungan dan perolehan Persetujuan Bangunan Gedung September – Proses lelang dst
	(3) POO Tegalega	√			
	(4) TPS Nyengseret	√			
Tahap III	(5) Jelekong, Kel. Jelekong Kab Bandung			2004	Dalam pengajuan Kesesuaian Ruang ke Pemkab Bandung

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah, 2023.

Pada tahun 2022, progress pembangunan TPST Tahap I di Cicukang Holis dengan kapasitas pegolahan sampah sebanyak 10 ton/hari dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 5.266.561.928,00.

Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan pembiayaan pembangunan strategis yang berasal dari APBD Provinsi Jawa Barat yaitu Pembangunan Sarana dan Prasarana Pilot Project Kawasan Tuntas Sampah berupa Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Jl. Subang, Antapani sebesar Rp.425.958.400,00, dengan pelaksana kegiatan dari Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.



5) Bantuan Sosial

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Sosial Kota Bandung mendapatkan bantuan sosial dari APBN yang langsung disalurkan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Kecamatan/Kelurahan di Kota Bandung. Pada Bantuan Sosial Pangan (BSP)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) jumlah besaran realisasi anggaran sebesar Rp214.437.600.000,00 dengan jumlah KPM sebanyak 89.349 KK.

Untuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) atau program perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin, jumlah besaran realisasi anggaran sebesar Rp125.005.600.000,00 dengan jumlah KPM sebanyak 49.084 KK.



PEMERINTAH
KOTA BANDUNG

